



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP



TAHUN
2023

 dkp.sumbarprov.go.id

 dkp@sumbarprov.go.id

 (0751) 841584

 Jl. Koto Tinggi. No. 9. Padang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 1 April 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 di sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini merupakan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.



Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi di bidang kelautan dan perikanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara produktif, efektif dan efisien sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Akhir kata LKjIP Tahun Anggaran 2023 ini dapat disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2024
Kepala Dinas

Dr. Ir. RETI WAFDA, M.Tp
Pembina Utama Madya
Nip. 19670312 199308

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja (keberhasilan dan kegagalan) yang berdasarkan pada pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi LKjIP/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun sebelumnya dan menjadi Sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan
4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan
5. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.
 - Target capaian kinerja yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap terealisasi sebesar 5,83% dengan capaian 544,86% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
2. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

- Target capaian kinerja yaitu persentase peningkatan produksi perikanan budidaya terealisasi sebesar 2,052% dengan capaian 60,53% dengan demikian capaian ini tidak mencapai target (Rendah).
3. Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai ekspor Hasil Perikanan.
- Target capaian kinerja yaitu nilai ekspor hasil perikanan terealisasi sebesar 291 Milyar dengan capaian 185,53% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
4. Capaian sasaran strategis 4 "Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan
- Target capaian kinerja yaitu persentase produksi olahan hasil perikanan terealisasi sebesar 7,5% dengan capaian 103,30% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
5. Capaian sasaran strategis 5 "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konserevasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Target capaian kinerja yaitu persentase efektifitas pengelolaan terealisasi sebesar 59,75% dengan capaian 112,86% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
6. Capaian sasaran strategis 6 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD A (80,15).
- Target capaian kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD terealisasi sebesar 80,22 dengan capaian 100,09% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
7. Capaian sasaran strategis 7 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
- Target capaian kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terealisasi sebesar 86,65 dengan capaian 105,03% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Diperlukan inovasi program dan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan PDRB subsektor perikanan. Pendapatan nelayan, pembudidaya maupun pengolah perlu ditingkatkan lagi melalui pendampingan dan penyediaan sarana prasarana produksi.
2. Pemasaran produk perikanan dan kelautan akan melalui *marketplace* serta pemasaran *e-comerse* untuk meningkatkan omzet penjualan.

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Gubernur Penggerak Pengelolaan Sampah Laut Pada Kegiatan Puncak Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Gubernur dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Surabaya, 08 November 2023
2	Kawasan Konservasi Daerah dengan Progres Nilai Evaluasi Efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tertinggi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan (Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat)	Batam, 08 Mei 2023

Untuk masa yang akan datang hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasaran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	4
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	
Daftar Grafik	
I. PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Gambaran Umum	10
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	12
1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)	27
1.6 Aset dan Modal	28
1.7 Aspek Strategis Organisasi	29
1.8 Peta Proses Bisnis.....	32
1.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	35
1.10 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	38
II. PERENCANAAN KINERJA	41
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	41
2.2 Rencana Strategis	42
2.3 Program dan Kegiatan	48
III. AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	58
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	59
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	62
3.4 Realisasi Anggaran	187
3.4.1. Realisasi Anggaran APBD	187
3.4.2. Realisasi Anggaran APBN	187
3.4.3. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	188
IV. PENUTUP	195
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	
2. Lain-lain yang dirasa perlu	

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan sebagai wujud akuntabilitas/ pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Hal ini merupakan bagian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance And Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Laporan kinerja ini menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Hasil yang telah diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu satu tahun tersebut merupakan bagian dari kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mewujudkan masyarakat nelayan sejahtera.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk sarana penyampaian informasi atas pertanggungjawaban kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dan memberikan informasi kinerja ringkas, lengkap dan terukur.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja terkait dengan keberhasilan, kegagalan, hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan di periode mendatang.

1.3. GAMBARAN UMUM

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD tersebut adalah UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

- a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- e. Penyelenggaraan Fungsi Lain dan Tugas Pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang uraian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dijabat oleh : Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp
2. Sekretariat, dijabat oleh : Resi Suriati, S.Pi, M.Si
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dijabat oleh : Marwan, S.Pi, M.Si
4. Bidang Perikanan Tangkap, dijabat oleh : Sandy Waldi, S.Sos, M.Si
5. Bidang Perikanan Budidaya, dijabat oleh : Ir. Noviyanti, MM
6. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dijabat oleh : Yulia Madhona, S.Pi
7. UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD PPW I, dijabat oleh Irwan, S.Pi
 - b. UPTD PPW II, dijabat oleh Hasnil Haris, S.Pi, M.Si
 - c. UPTD PPW III, dijabat oleh Yofrianto, S.St. Pi
 - d. UPTD KPSDKP, dijabat oleh Lastri Mulyanti, S.Pi, M.Si
 - e. UPTD BPBALP, dijabat oleh Wandu Afrizal, S.Pi, M.Si
 - f. UPTD PPMHP, dijabat oleh Indra Arief Nasution, S.Pi, M.Si
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan.

- d. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Menyelenggarakan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Program

Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PRL PSDKP)

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang Laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penyiapan batas kawasan konservasi;
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Mitra Konservasi;
- i. Pelaksanaan pengawasan terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. Penyelenggaraan pengkajian data dan informasi bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut

sampai dengan 12 (dua belas) mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Tangkap sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Tangkap;
- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Tangkap;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi/Kelompok Nelayan;
- g. Penyelenggaraan pengkajian data dan informasi bidang Perikanan Tangkap;
- h. Penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Perikanan Tangkap;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan perairan umum daratan;
- j. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- m. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- n. Pelaksanaan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Tangkap; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Budidaya sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;

- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Budidaya;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan budidaya dan penyiapan dokumen rencana budidaya, penyiapan batas kawasan budidaya;
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan budidaya;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pembudidaya;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pembudidaya ikan;
- i. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
- k. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- l. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- m. Pelaksanaan pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya;
- n. Pelaksanaan pengelolaan Perbenihan dan pakan ikan;
- o. Pelaksanaan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- p. Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produksi perikanan budidaya;
- q. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya; dan
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan (PDSKP)

Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha;
- f. Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- i. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- j. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;

- l. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan ;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan dan penyiapan dokumen rencana Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- n. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat;
- p. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (PPW I)
- c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (PPW II)
- d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III (PPW III)
- e. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)
- f. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)

7.1 UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau

Susunan Organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis Produksi;
- d. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air laut dan payau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan penyusunan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pembenihan ikan
- b. Pelaksanaan pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan
- c. Pelaksanaan pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi balai benih ikan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, praktek dan magang pembenihan ikan
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan
- g. Pelaksanaan tugas teknis dinas di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan ,kepegawaian dan teknis UPTD; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.2 UPTD Pelabuhan Perikanan

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan;
- d. Seksi Tata Operasional Pelabuhan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pelabuhan
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan pada pelabuhan perikanan
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
- d. Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan
- e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis lainnya pada UPTD; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wilayah kerja UPTD Pelabuhan Perikanan, meliputi :

1. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I berkedudukan di Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Wilayah kerjanya yaitu :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kabupaten Pesisir Selatan,
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Surantih Kabupaten Pesisir Selatan,
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muaro Anai Kota Padang.
2. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II berkedudukan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

Wilayah kerjanya yaitu :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Baru Kabupaten Padang Pariaman,
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tikus Kabupaten Agam,
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sasak Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
3. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III berkedudukan di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.

7.3 UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Konservasi
- d. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam Kawasan Konservasi d Perairan Daerah (KKPD) serta Perairan Umum Danau Singkarak;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.4 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)

Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian Mutu
- d. Seksi Penerapan Mutu dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengujian dan Penerapan mutu

hasil perikanan.

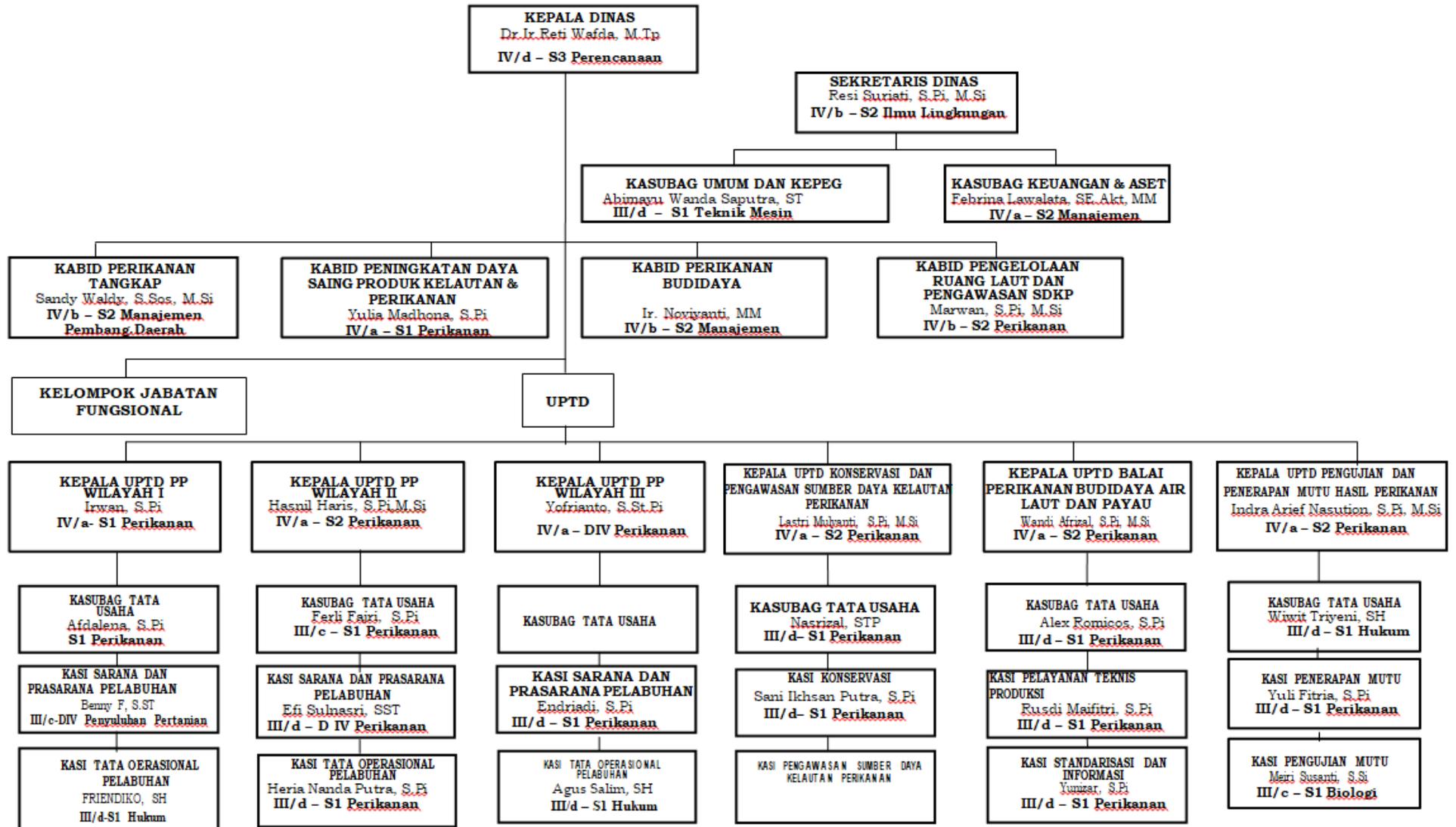
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi pengendalian dan pelaporan
- b. Pelaksanaan/penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dan kriteria di bidang pengujian, penerapan dan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan
- d. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan dan pemantauan terhadap produk perikanan di daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan laboratorium mutu hasil perikanan
- f. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen pengembangan UPTD
- g. Pengelolaan penyediaan sarana, fasilitas, bahan dan peralatan laboratorium
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT



1.5. SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung dengan jumlah pegawai sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekap Data PNS dan Non PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat keadaan : Desember Tahun 2023

NO	URAIAN	PNS	PPPK
I BERDASARKAN GOLONGAN			
1	GOL IV	19	0
2	GOL III	101	5
3	GOL II	22	1
4	GOL I	3	0
	JUMLAH	145	6
	JUMLAH KESELURUHAN	151	
II BERDASARKAN PENDIDIKAN			
1	S3	1	0
2	S2	21	0
3	S1	78	5
4	DIV	6	0
5	DIII	8	1
6	SLTA	28	0
7	SLTP	2	0
8	SD	1	0
	JUMLAH	145	6
	JUMLAH KESELURUHAN	151	
III BERDASARKAN JENIS KELAMIN			
1	LAKI-LAKI	79	1
2	PEREMPUAN	66	5
	JUMLAH	145	6
	JUMLAH KESELURUHAN	151	

NO	URAIAN	PEGAWAI NON ASN	
		TENAGA HONORER/ KONTRAK	OUTSOUR CHING
I	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1	LAKI-LAKI	59	51
2	PEREMPUAN	8	11
	JUMLAH	67	62
	JUMLAH KESELURUHAN	129	

1.6. ASET/MODAL

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset/modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai beberapa sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda empat maupun roda 2 yang digunakan untuk operasional kedinasan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki kendaraan dinas di atas air seperti kapal pengawasan dan speed boat yang digunakan untuk melakukan operasional pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Kelautan dan Perikanan baik di Provinsi maupun di UPTD memiliki sarana elektronik berupa komputer, laptop dan printer. Sarana komunikasi seperti telephone dan faximile. Mobiler dan peralatan kantor lainnya seperti meja dan kursi kantor, lemari arsip dan sarana penunjang lainnya.

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya : 1). UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2). UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, 3). UPTD Pelabuhan

Perikanan Wilayah I, 4).UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, 5). UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III dan 6). UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau yang hingga saat ini masih beroperasi.

1.7. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, mengisi pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan menyelaraskan dan menjalankan misi – misi yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Provinsi Sumatera Barat yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah : ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"***. Dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dalam 1 misi yaitu :

Misi 3: Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Untuk mencapai visi misi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh

pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dengan misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

Sumatera Barat terdiri dari 19 Kab/Kota, memiliki potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber ekonomi baru dalam menunjang pembangunan dalam peningkatan roda perekonomian di Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km² dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 2.299,08 Km, 218 pulau-pulau kecil dan 3 pulau kecil terluar.

Untuk usaha Perikanan Budidaya air tawar, Sumatera Barat mempunyai empat danau yaitu Maninjau, Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan luas keseluruhan 27.511 Ha. Ditambah dengan lahan yang dapat dijadikan tambak yang berada di daerah pantai.

Peran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sesuai dengan

tugas pokok fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung ke **Misi 3: Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.** Dukungan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui 6 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.8 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan/tantangan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu :

1. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
2. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan.
4. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih dan calon induk untuk usaha budidaya laut dan payau.
5. Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembagaan usaha.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.

7. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik di laut maupun perairan umum.
8. Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir dan juga perairan umum.
9. Pemanfaatan lahan usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.

1.9 PETA PROSES BISNIS

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Peta bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan sebagaimana terlampir :

Tabel 1.2 Identifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
NO.		UTAMA/ PENDUKUNG/ LAINNYA	KODE
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	UTAMA	DKP.SBR-01
2	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	UTAMA	DKP.SBR-02
3	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	UTAMA	DKP.SBR-03
4	Meningktanya produksi olahan hasil perikanan	UTAMA	DKP.SBR-04
5	Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	UTAMA	DKP.SBR-05
6	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	PENDUKUNG	DKP.SBR-06
7	Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	PENDUKUNG	DKP.SBR-07

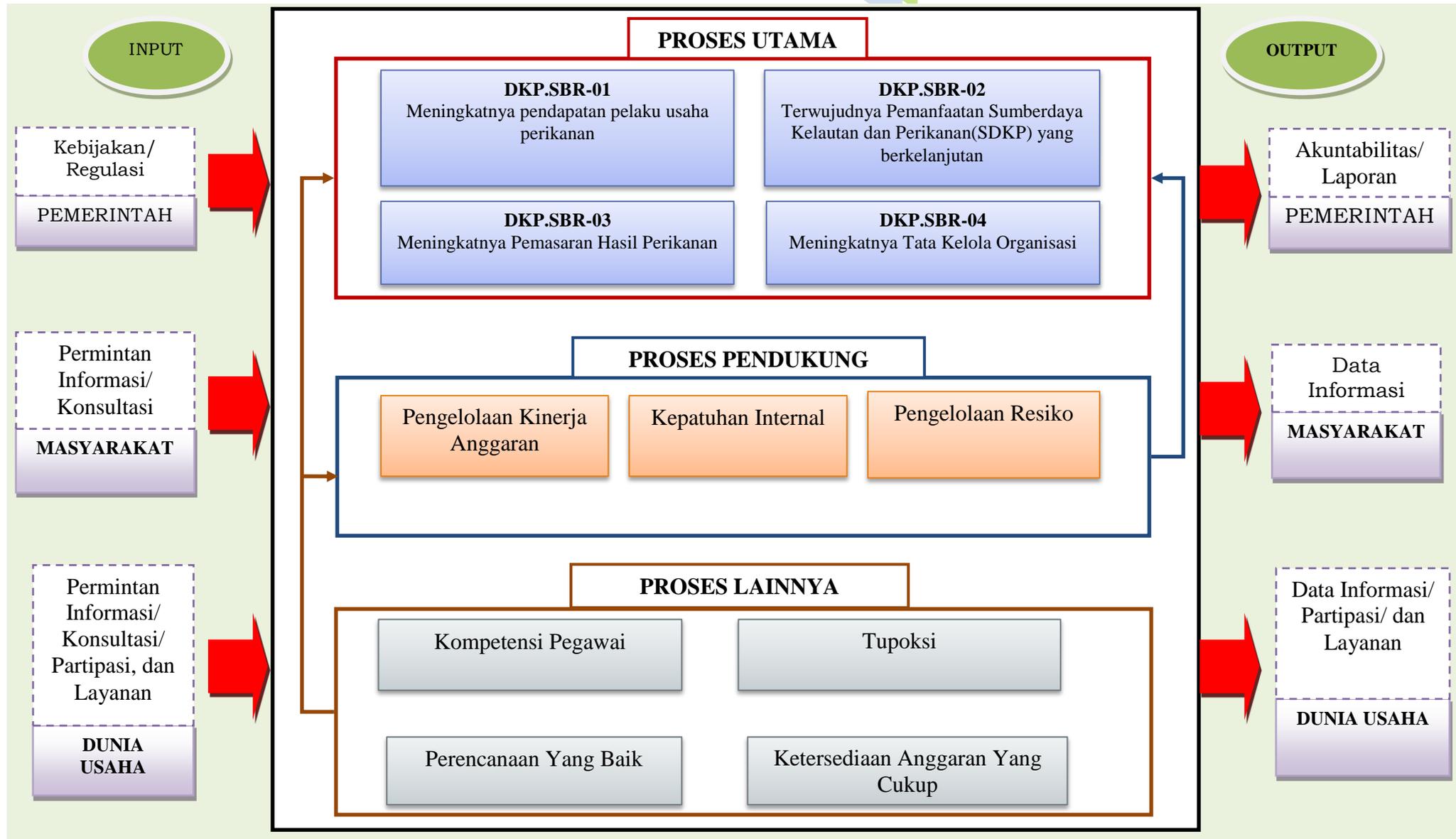
Sasaran
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
pada
RENSTRA

Tabel 1.3 Identifikasi Sub-Proses-Lintas Fungsi- Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)

No	SUB-PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)
No	NAMA SUB-PROSES	KODE
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP.SBR-01.01
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP.SBR-01.02
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP.SBR-01.03
4	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	DKP.SBR-01.04
5	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	DKP.SBR-01.05

Turunan dari Sasaran di Tabel Atas) Program Utama Pada Renstra

Tabel 1.4 PETA PROSES BISNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT



1.10 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/10/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah 80,22 termasuk kategori A dengan predikat “Sangat Baik” dengan catatan hasil sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Pengukuran realisasi rencana aksi telah dilaksanakan tingkat eselon II, III, IV yang dilakukan pertriwulan dan namun bukti pemantauan atas realisasi rencana aksi berupa notulen yang telah memberikan alternatif perbaikan untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan pada tingkat eselon II, III dan IV sedangkan untuk level staf masih terdapat rencana aksi yang belum dipantau secara berkala.
 - b. Belum setiap pegawai peduli dan memahami serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan hal ini terlihat dari masih terdapat pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang belum menyusun rencana aksi dan mengukur realisasi rencana aksi secara berkala.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran kinerja secara berkala sudah dilakukan pertriwulan mulai tingkat eselon II sampai staf namun belum terhadap seluruh pegawai.
 - b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga capaian atau progress kinerja belum dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.
 - c. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijasikan dasar pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - d. Belum seluruh pegawai memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja, hal ini terlihat dari hasil wawancara dan

kuisisioner yang dilakukan terhadap eselon III, IV dan beberapa staf dan masih adanya pegawai yang belum melakukan pengukuran secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Informasi pelaporan kinerja telah memberikan dampak perbaikan namun belum signifikan.
- b. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, hal ini terlihat dari belum seluruh pegawai peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja, belum ada bukti informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Belum terdapat bukti dokumentasi pemantauan kinerja sampai level staf.
- b. Bukti pemantauan capaian kinerja internal yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyajikan bukti telah terdapat pendalaman yang memadai untuk setiap capaian kinerja diantaranya belum menyajikan faktor pendorong, hambatan/kendala, rekomendasi dan evaluasi pada pemantauan berikutnya untuk target atau aksi yang tidak tercapai.
- c. Hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
- d. Pemantauan capaian kinerja internal belum memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi).

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala setiap bulannya mulai eselon II sampai staf dan didokumentasikan dengan baik, apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisis atas hambatan/kendala yang ditemukan serta dicarikan solusinya.

- b. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai target kinerja yang direncanakan pada dokumen perencanaan yang telah disusun (penetapan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target).
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran kinerja secara berkala dilaksanakan setiap bulannya mulai di tingkat eselon II, III, IV dan staf.
 - b. Pemantauan kinerja dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat eselon II, III, IV dan staf dan dilakukan setiap bulannya yang dapat memberikan alternatif perbaikan untuk pencapaian target yang ditetapkan, bukti pemantauan didokumentasikan dengan baik.
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip (sakip.sumbarprov.go.id) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.
 - d. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.
 - e. Pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - f. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai atas hasil pengukuran kinerja.
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Informasi kinerja hendaknya dimanfaatkan dalam penilaian dan perbaikan pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan dan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
 - b. Agar meningkatkan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan pemantauan kinerja mulai tingkat eselon II sampai staf dan mendokumentasikan bukti pemantauan tersebut dan dilaksanakan oleh SDM dan pendalaman yang memadai.
- b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-sakip (sakip.sumbarprov.go.id) dalam melakukan pemantauan capaian kinerja sehingga memudahkan atasan langsung dalam mengetahui capaian progres kinerja secara cepat dan tepat.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.11. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
- b. Aspek Strategis Organisasi

c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan :

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel)

- c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan capaian kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- d. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) **Perjanjian Kinerja Esselon II**
- 2) **Lain-lain yang dirasa perlu**



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan regional Sumatera Barat. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program supaya mampu eksis dan unggul dan bersaing semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1. RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana pembangunan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk mencapai tujuan dan saran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 tanggal 9 September 2021. Sehubungan dengan itu telah ditetapkan kerangka visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”***, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban.
2. **Sumatera Barat Yang Unggul** adalah masyarakat yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional.
3. **Pembangunan Berkelanjutan** adalah memenuhi kebutuhan dari generasi

sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Visi Pemerintah Sumatera Barat tersebut dijabarkan dalam misi pembangunan tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

2.2 RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan kebutuhan sektor pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaannya seperti: a) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sesuai dengan PERPRES Nomor 05 Tahun 2010, tanggal 20 Januari 2010, b) RENSTRA KKP RI (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 20 Juni 2020, c) RPJPD

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 - 2025, d) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses dengan orientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Secara ringkas Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka **TUJUAN** jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1. *Meningkatnya Pendapatan dengan indikator tujuan yaitu :***
 1. Pendapatan Pembudidaya Ikan
 2. Pendapatan Nelayan
- 2. *Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan dengan indikator tujuan :***
 1. Persentase efektivitas pengelolaan kawasan perairan
- 3. *Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan yaitu:***
 1. Nilai Akuntabilitas kinerja
 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa Indikator Tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian tujuan sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan Rp/org/th	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp/org/th	2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
			3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan
			4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan
2.	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan perairan	1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	- Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

B. SASARAN

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan nilai ekspor hasil perikanan
4. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator kinerja
 - Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan
5. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan dengan indikator kinerja
 - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi :
 - Nilai akuntabilitas Kinerja : A
7. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi
 - Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Secara lengkap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke..				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan Rp/org/th			Rp.	39.995.000	40.795.000	41.611.000	42.443.000	43.292.000	44.158.000
			1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp/org/th			Rp.	45.800.000	47.175.000	48.590.000	50.048.000	51.549.000	53.096.000
			2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
			3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	153,76	155,50	156,85	158,42	160	161,60
			4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	6,30	6,49	7,26	7,95	8,05	11

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke..				
							2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan perairan			%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
			1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	- Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja			Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			Nilai	B (81,50)	B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)
			3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	B (81,50)	B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat, maka dilaksanakan program/atau kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,

dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

IV. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, dengan kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- b. Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- c. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

V. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

dengan kegiatan :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- c. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya

VI. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL, dengan kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan:

- a. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07 %
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39%
3.	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	1. Nilai Ekspor hasil Perikanan (Milyar)	156,85
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	1. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26 %
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	1. Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	52,94 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,15)
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (82,50%)

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat

kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07 %
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39%
3.	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	1. Nilai Ekspor hasil Perikanan (Milyar)	156,85
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	1. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26 %
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	1. Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	52.94 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,15)
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (82,50%)

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.437.833.644,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.663.526.401,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.820.494.643,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.992.215.032,-	APBD
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.719.844.957,-	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	5.203.673.774,-	APBD
	JUMLAH APBD	89.837.588.451,-	
7.	Sekretariat Jenderal (01)	220.392.000,-	APBN – DK
8.	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	440.600.000,-	APBN – DK
9.	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	536.682.000,-	APBN - DK
10.	Ditjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05)	180.477.000,-	APBN – DK
11.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06)	323.517.000,-	APBN – DK
12.	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (07)	232.500.000,-	APBN - DK
	JUMLAH APBN	1.934.168.000,-	
	JUMLAH APBD + APBN	91.771.756.451,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan berorientasi hasil. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berpedoman Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/974/ED/GSB-2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah 2023.

Adapun pencapaian tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat hingga Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

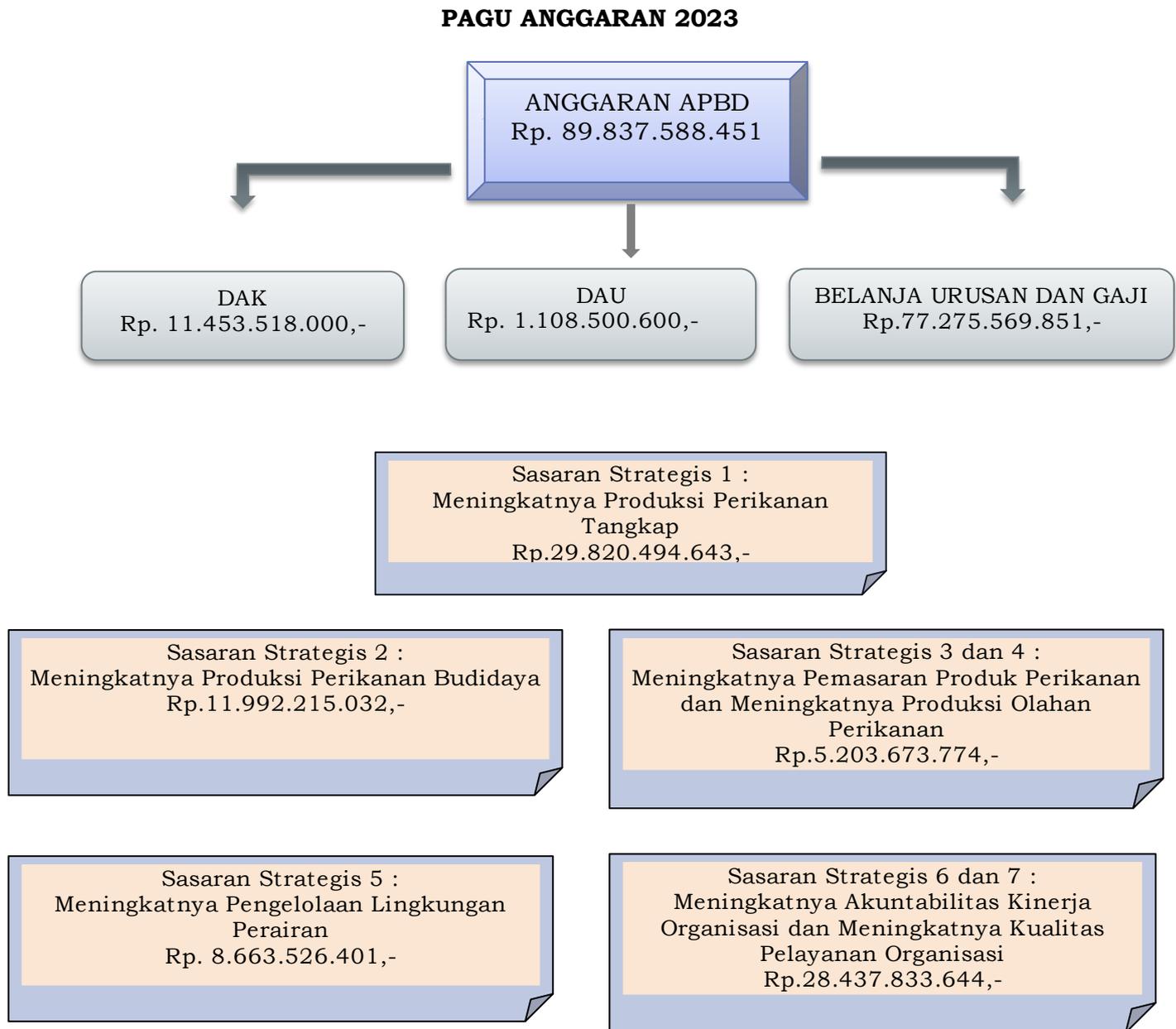
Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 5 (lima) kategori mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Penilaian Peringkat Kinerja Tahun 2023

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75 %	Sedang
4.	51% ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja



Gambar 3.1. Pagu Anggaran Tahun 2023

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional dan provinsi lain yang berdekatan. Klasifikasi penilaian

kinerja kinerja yang diuraikan pada tabel 3.1. akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

Tabel. 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07	5,83	544,86
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39	2,052	60,53
3.	Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	156,85	291	185,53
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26	7,5	103,30
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	- Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	52,94	59,75	112,86
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,15)	A (80,22)	100,09
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	A (82,50)	A (86,65)	105,03
Rata-Rata Capaian Kinerja					173,17

Sumber : Diolah dari data primer, penetapan kinerja DKP 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan 7 (tujuh) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dari 7 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 173,17% hal ini termasuk keberhasilan **Sangat Tinggi**. Dari 7 indikator kinerja, 6 indikator kinerja capaiannya di atas 100% (Sangat Tinggi) dan 1 indikator kinerja capaiannya di bawah 100% yaitu indikator sasaran 2 dengan capaian Rendah. Pencapaian Sasaran strategis tersebut diukur dari pencapaian 7 indikator kinerja.

Indikator kinerja tertinggi adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan capaian 544,86% terdapat pada sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap, kemudian diikuti oleh indikator nilai ekspor hasil perikanan dengan capaian 185,53% terdapat pada sasaran meningkatnya hasil pemasaran perikanan, kedua indikator tersebut dengan kategori Sangat Tinggi.



Grafik 3.1. Gambaran Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Dilihat dari grafik di atas bahwa persentase peningkatan produksi budidaya tidak tercapai karena berkurangnya produksi dari kolam air deras dan kolam air tenang akibat berkurangnya permintaan pasar. Harga pakan yang tinggi dan belum ditemukan pengganti yang memadai dan potensial juga

merupakan salah satu penyebab. Dan dari 7 sasaran, 6 indikator kinerja diatas mencapai target Sangat Tinggi dan 1 indikator dengan kategori cukup.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi capaian indikator kinerja dilakukan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari capaian indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026. Adapun capaian kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.	Tujuan 1	Meningkatnya Pendapatan
-----------	-----------------	--------------------------------

Tujuan Meningkatkan Pendapatan dengan indikator tujuan terdiri dari:

- a. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/thn)
- b. Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/thn)

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.

Pendapatan pembudidaya ikan adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidayaan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan membudidayakan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya.

Sedangkan pendapatan nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga rata rata per Kg setelah dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, selanjutnya dari penerimaan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Pendapatan rata-rata nelayan dalam 1 tahun diperoleh dari penjumlahan pendapatan nelayan per triwulan (I-IV) dan dibagi dengan jumlah nelayan pada tahun yang bersangkutan.

Dilihat dari realisasi 2 indikator tujuan dapat dilihat dari uraian di bawah ini :

1. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dengan target : Rp. 48.590.000,- org/thn
 2. Jumlah Pendapatan Nelayan dengan target : Rp. 41.611.000,- org /thn
- Hasil Pengukuran Kinerja Provinsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Pengukuran Jumlah Pendapatan Pembudidaya dan Nelayan 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian%	Kategori
1.	Jumlah pendapatan pembudidaya ikan Rp/org/thn	48.590.000	50.989.400	104,94	Sangat Tinggi
2.	Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/thn	41.611.000	41.758.325	100,35	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 target dari indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan dari target sebesar Rp. 48.590.000/org/thn dapat terealisasi sebesar Rp. 50.989.400/org/thn dengan tingkat capaian sebesar 104,94% termasuk kriteria Sangat Tinggi. Sedangkan jumlah pendapatan nelayan dari target Rp. 41.611.000/org/thn dapat terealisasi sebesar Rp.41.758.325/org/thn dengan tingkat capaian 100,35%, pendapatan nelayan ini juga mencapai target, dengan kriteria Sangat Tinggi. Hal ini dapat kita lihat pada uraian di bawah ini:

a. Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan

Indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan dari target Rp.48.590.000/org/thn terealisasi sebesar Rp.50.989.400/org/thn dengan capaian 104,94% dengan kriteria Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan per pembudidaya Tahun 2023 pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Pendapatan Per Pembudidaya Tahun 2023

No	Jenis Usaha	Produksi Menurut Jenis Usaha (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)	Jumlah Pembudidaya (Org)	Biaya Produksi (Rp.000)	Pendapatan (Rp.000)	Pendapatan (Rp.000)
1	Kolam Air Tenang	227.931,49	5.926.218.740,00	65,558	4.148.353.118,00	1.777.865.622,00	27.118,97
2	Kolam Air Deras	5.585,74	145.229.240,00	12,771	101.660.468,00	43.568.772,00	3.411,54
3	Jaring Apung Tawar	23.060,03	507.320.660,00	1,938	355.124.426,00	152.196.198,00	78.532,61
4	Tambak	6.694,36	435.133.400,00	723	304.593.380,00	130.540.020,00	180.553,28
5	Keramba	6.875,25	171.881.250,00	637	128.910.937,50	42.970.312,50	67.457,32
6	Sawah	2.943,09	73.577.250,00	1,686	51.504.075,00	22.073.175,00	13.092,04
7	Budidaya Laut	159,54	24.728.700,00	442	18.546.525,00	6.182.175,00	13.986,82
8	Jaring Tancap Tawar	950,50	24.713.000,00	260	18.534.750,00	6.178.250,00	23.762,50
JUMLAH		274.200,000	7.308.802.240,00	84,015	5.127.227.716	2.181.574.525	407.915,08
Pendapatan Per Jenis Usaha Tahun 2023							50.989,40
Pendapatan Per Org/Bln Tahun 2023							4.249,12

Sumber : DKP,2023

Cara menghitung pendapatan pembudidaya berdasarkan jumlah produksi ikan budidaya yang dilakukan pemanenan 3 - 4 kali dalam setahun. Jumlah produksi yang didapat pada tahun tersebut dikalikan dengan nilai jual perjenis ikan budidaya tersebut dikurangi dengan biaya produksi. Atau uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidaya ikan yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya. Pendapatan pembudidaya perorangan diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah pembudidaya ikan pada tahun tersebut, sedangkan pendapatan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi. Adapun jumlah produksi budidaya sebesar 274.290 ton pada tahun 2023, jumlah pembudidaya ikan 84.015 orang, sedangkan data produksi budidaya tahun 2022 sebesar 268.774,30 ton dan jumlah pembudidaya ikan 84.863 orang.

Data pendapatan pembudidaya ikan tahun 2023 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

b. Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Nelayan

Indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual perjenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 222.940,89 ton dan perairan umum sebesar 8.502,31 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 231.443,20 ton pada tahun 2023 dan jumlah nelayan tahun 2023 sebanyak 45.249 orang. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan nelayan ini dikarenakan harga jual ikan pada umumnya mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya.

Data pendapatan nelayan tahun 2023 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 3.5 Pendapatan Nelayan Tahun 2023

Tri Wulan	Produksi (Ton)	Harga Rata-Rata Per Kg	Nilai Produksi (Rp.000)	Biaya Produksi (Rp.000)	Penerimaan (Rp.000)	Pendapatan Pemilik Kapal (Rp.000)	Pendapatan Nelayan (Rp.000)	Jumlah Nelayan
I	57.905,33	27.362,00	1.584.405.639	475.321.692	1.109.083.948	609.996.171	499.087.776	45.249
II	57.697,02	27.176,00	1.567.974.216	470.392.265	1.097.581.951	603.670.073	493.911.878	45.249
III	56.899,77	27.685,00	1.575.270.132	472.581.040	1.102.689.093	661.613.456	441.075.637	45.249
IV	58.941,08	27.597,00	1.626.596.985	487.979.095	1.138.617.889	683.170.734	455.447.156	45.249
Jumlah	231.443,20			1.906.274.092	4.447.972.881	2.558.450.433	1.889.522.447	
Pendapatan Nelayan Pertahun (Rp.000)							1.889.522.447	41.758,325
Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)							157.460.204	3.479,860
Pendapatan Pemilik Kapal Pertahun (Rp.000)							2.558.450.433	
Pendapatan Pemilik Kapal Perbulan (Rp.000)							213.204.203	

Sumber : DKP,2023

Rekapitulasi hasil Pengukuran Pendapatan Tahun 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Pengukuran Pendapatan Tahun 2022 – 2023

No.	Indikator Kinerja	2022			2023 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	47.175.000	50.465.580	106,98	48.590.000	50.989.400	104,94
2.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	40.795.000	41.661.646	102,12	41.611.000	41.758.325	100,35

*Angka sementara Sumber : DKP,2023

Realisasi pendapatan pembudidaya tahun 2023 mengalami kenaikan 1,04% dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan realisasi pendapatan nelayan tahun 2023 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,23% dibandingkan dengan tahun 2022.

Berikut sajian persandingan antara jumlah pendapatan pembudidaya dan pendapatan nelayan Provinsi Sumatera Barat dengan angka nasional tahun 2023.

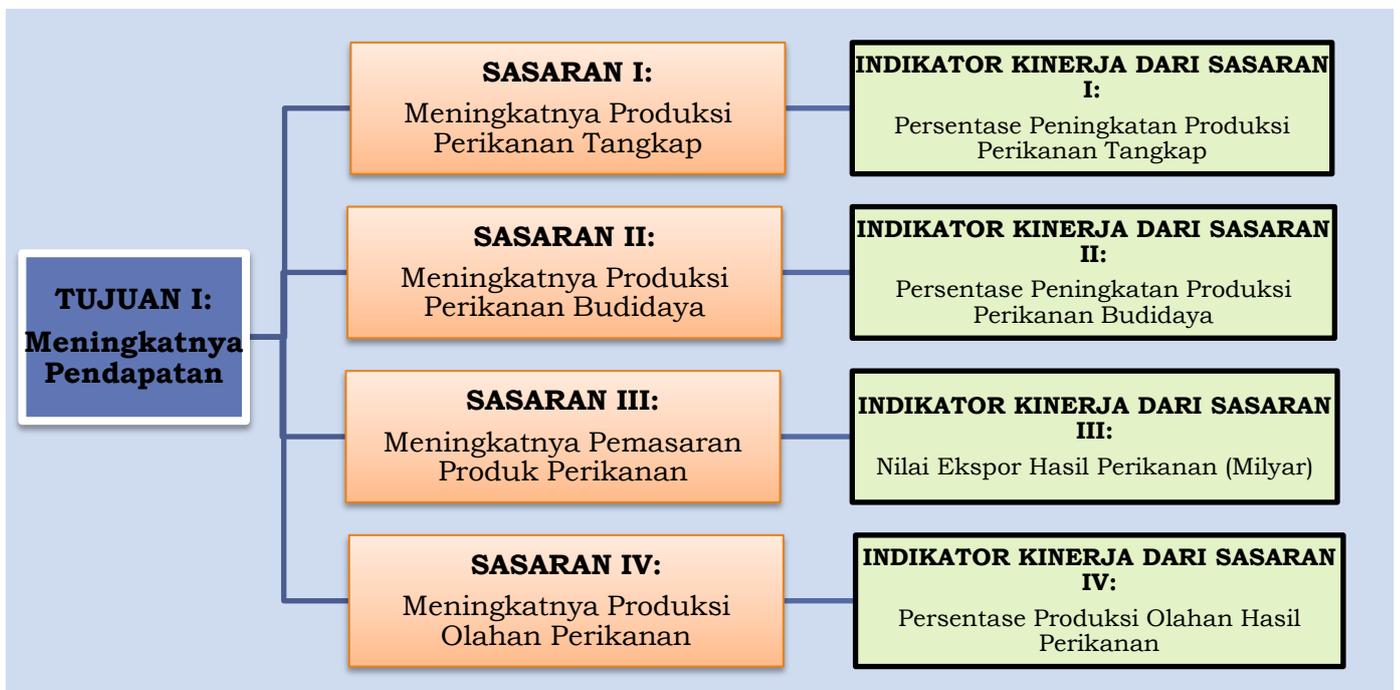
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional *	Capaian (%)
1.	Jumlah Pendapatan pembudidaya (Rp/org/th)	50.989.400	58.953.780	100.12
2.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	41.758.325	59.875.488	69.74

*Angka sementara Sumber : Pusdatin KKP, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional walaupun masih di bawah capaian nasional.

Tujuan Meningkatnya Pendapatan dicapai dengan menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3.2. Tujuan I dan 4 Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pendapatan yang telah ditetapkan dengan 4 sasaran dan 4 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian empat sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
------------------	--

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi/lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan. Keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Cara Penghitungan
1.	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07	5,83	544,86	<p>a. Target 1,07 %</p> <p>b. Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 sebesar 231.443,20 ton sehingga persentase peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar :</p> $\frac{\text{Realisasi Thn 2023} - \text{Realisasi Thn 2022}}{\text{Realisasi Tahun 2022}} \times 100\%$ $= \frac{231.443,20 \text{ ton} - 218.688,65 \text{ ton}}{218.688,65 \text{ ton}} \times 100\%$ $= \frac{12.754,54}{218.688,65} \times 100\% = 5,83\%$ <p>c. Maka persentase Capaian yaitu :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ </div> $= \frac{5,83}{1,07} \times 100 = 544,86 \%$

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 target dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target sebesar 1,07% dan terealisasi sebesar 5,83% dengan tingkat capaian sebesar 544,86% termasuk kriteria penilaian Sangat Tinggi. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 terdiri dari produksi perairan laut sebesar 222.940,89 ton dan produksi perairan umum sebesar 8.502,31 ton jadi jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 231.443,20 ton.

Dari hasil produksi perikanan tangkap tahun 2023 maka dapat diperoleh persentase peningkatan produksi dengan rumus produksi tahun 2023 dikurang produksi tahun sebelumnya (2022) dibagi dengan produksi 2022 dikalikan 100 yaitu $231.443,20 \text{ ton} - 218.688,65 \text{ ton} = 12.754,55:218.688,65 = 5,83 \%$.

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan penghitungan besarnya produksi perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu dikali 100%.

Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing – masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 dan 2023

No.	Kab/Kota	2022		2023	
		Laut	Perairan Umum	Laut	Perairan Umum
1	Kab. Agam	7.864,05	1.117,76	8.627,41	509,07
2	Kab. Kep. Mentawai	10.276,77	-	11.213,67	
3	Kota Padang	24.503,52	14,97	25.447,73	15,29
4	Kota Pariaman	6.243,42	-	6.011,90	
5	Kab. Padang Pariaman	18.768,70	361,80	15.901,30	494,60
6	Kab. Pasaman Barat	99.649,67	-	100.333,10	
7	Kab. Pesisir Selatan	40.653,26	190,60	55.405,78	114,25
8	Kab. Dharmasraya	-	231,15		249,35
9	Kota Bukittinggi	-	3,53		9,68
10	Kota Padang Panjang	-	8,31		6,04
11	Kota Payakumbuh	-	10,95		9,42
12	Kota Sawahlunto	-	30,91		29,34
13	Kota Solok	-	4,74		2,19
14	Kab. Lima Puluh Kota	-	3.296,26		1.487,76
15	Kab. Pasaman	-	1.115,68		1.176,03
16	Kab. Sijunjung	-	216,70		202,17
17	Kab. Solok	-	823,26		934,26
18	Kab. Solok Selatan	-	537,13		391,79
19	Kab. Tanah Datar	-	2.765,51		2.871,08
	Total	207.959,39	10.729,26	222.940,89	8.502,31
	Total Keseluruhan		218.688,65		231.443,20

Sumber : DKP, 2023

Data produksi perikanan tangkap dapat juga dilihat dari grafik di bawah ini :



Grafik 3.2 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022-2023

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu tongkol, teri, tuna, kerapu dan lain-lain. Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-572 yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda (WPP-572) dengan potensi sebesar 1.229.950 ton, tingkat pemanfaatannya dikategorikan sudah penuh yakni \pm 94,44 persen atau sebesar 1.161.564,78 ton.

Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim. Beberapa hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain dengan melakukan pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan,

pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan sarana alat tangkap dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara optimal dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan ke setiap Kab/Kota mencakup bimbingan teknis, pemanfaatan teknologi penangkapan dan sarana penangkapan lainnya, sehingga pada akhirnya nelayan dapat memanfaatkan sarana penangkapan yang ada untuk meningkatkan hasil produksi/hasil tangkapan.

Pemberian bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring, rumpon laut dangkal dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

Dalam 2 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 3.10. Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Tahun 2022 dan 2023

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jaring	328 unit	246 unit
2.	Mesin	640 unit	611 unit
3.	Fish Box	1.125 unit	950 unit
4.	Perahu Fiber	33 unit	0
5.	Alat Tangkap Kepiting	0	1.360 unit
6.	Rumpon Laut Dangkal	0	1 unit
	Total	2.126 unit	3.168 unit

Tabel 3.11. Rekapitulasi Bantuan Perikanan Tangkap Tahun 2023

NO	JENIS BANTUAN	KABUPATEN / KOTA									TOTAL
		MENTAWAI	PESISIR SELATAN	PADANG	PARIAMAN	PADANG PARIAMAN	AGAM	PASAMAN BARAT	TANAH DATAR	SOLOK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mesin Diesel Kapal Perikanan							20			20
2	Mesin Longtail 13 PK		10		25	9					44
3	Mesin Tempel 4 PK						7				7
4	Mesin Tempel 8 PK		6					4			10
5	Trammel Net		27	10			10	29			76
6	Fish Box 100 Liter		200	150		100	100	250			800

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

NO	JENIS BANTUAN	KABUPATEN / KOTA									TOTAL
		MENTAWAI	PESISIR SELATAN	PADANG	PARIAMAN	PADANG PARIAMAN	AGAM	PASAMAN BARAT	TANAH DATAR	SOLOK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Fish Box 200 Liter		50	30				70			150
8	Alat Tangkap Kepiting							1360			1360
9	Mesin Tempel 2,5 PK								20	20	40
10	Mesin Longtail 9 PK		39	21	5	18		23			106
11	Mesin Tempel 15 PK	5	81	22	38	70	50	37			303
12	Mesin Tempel 40 PK		9	4	14	19	10				56
13	Jaring Hijau					8	2				10
14	Gillnet Singkarak								20	20	40
15	Gillnet		57	10		13	7	33			120
16	Mesin Tempel 20 PK	5		20							25
17	Rumpon Laut Dangkal		1								1
	TOTAL KESELURUHAN	10	480	267	82	237	186	1826	40	40	3168

Dari tabel dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan ke nelayan memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap. Dengan bantuan mesin, jarak tempuh nelayan dalam menangkap ikan lebih jauh, dan dengan bantuan jaring yang baru dan kuat, nelayan lebih mudah melakukan penangkapan ikan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

BANTUAN MESIN



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

BANTUAN JARING DAN FISH BOX



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

GERAI PERIZINAN TERPADU



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

SOSIALISASI



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

ASURANSI NELAYAN



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

GERAI PERIZINAN TERP



Peluang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan adalah:

1. Penambahan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu.
2. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.

Disamping pemberian bantuan berupa sarana penangkapan ikan, untuk menjaga produksi hasil perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan upaya peningkatan fasilitasi sarana prasarana di UPTD pelabuhan perikanan yaitu (Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Tarusan Kab. Pesisir Selatan, Pelabuhan Perikanan Wilayah II Air Bangis Kab. Pasaman Barat dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III di Sikakap Kab. Kep. Mentawai) seperti pabrik es, fasilitas sarana air bersih, pembangunan drainase, pembangunan TPI dan lain-lain untuk kebutuhan operasional penangkapan. Untuk tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan di ketiga UPTD pelabuhan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan dan beberapa pengadaan yang dibutuhkan. Disamping itu juga dilakukan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan dan juga dilakukan sosialisasi.

Dilakukan rekap penerbitan buku kapal tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 3.12 Rekap Penerbitan Buku Kapal Perikanan Tahun 2023

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
1	B13.000275	275	FAUZI 06	MIDDIA RAHMAN	02.21.04.1398.0034	JORONG PASAR POKAN, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	GT.30/B.13.00151/527/J2/KP-LN	2021 AAa No. 1748/N	GT.30/B13000275/572-J2/KP-LN
2	B13.000276	276	TUANKU LANANG BISAI	ADE SYAMSU	02.22.04.1398.0079	JORONG PASAR MUARA, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	GT25/B-13.00152/572/J2/KP-LN	2020 AAa No. 1589/N	GT.25/B13000276/572-J2/KP-LN
3	B13.000277	277	TUAKU LANANG BISAI 02	ADE SYAMSU	02.22.04.1398.0079	JORONG PASAR MUARA, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	GT28/B-13.00153/572/J2/KP.LN	2022 AAa No. 1869/N	GT.28/B13000277/572-J2/KP-LN
4	B13.000278	278	FAUZI 04	MIDDIA RAHMAN	02.21.04.1398.0034	JORONG PASAR POKAN, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1584/N	GT.29/B13000278/572-J2/KP-LN
5	B13.000279	279	ZAM 02	IKHWAN	02.21.04.1398.0108	JORONG PASAR BARU TIMUR, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2014 AAa No. 991/N	GT.30/B13000279/572-J2/KP-LN
6	B13.000280	280	SEMBARI 05	ILHAMI FENDRA	02.21.01.1398.0003	JORONG PASAR BARU BARAT, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1735/N	GT.30/B13000280/572-J2/KP-LN
7	B13.000281	281	IKHWAN	ISLAHUL ABDI	02.21.04.1398.0075	JORONG PASAR SATU, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1795/N	GT.30/B13000281/572-J2/KP-LN
8	B13.000282	282	ANBER 01	AULIA DEFRIANSYAH	02.21.04.1398.0082	JORONG PASAR SATU, 0, AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1632	GT.27/B13000282/572-J2/KP-LN
9	B13.000283	283	FAZILA	BASMAL ARIF	02.20.01.1398.0048	JORONG PASAR POKAN, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1658/N	GT.25/B13000283/572-J2/KP-LN
10	B13.000284	284	ANBER 02	AULIA DEFRIANSYAH	02.21.04.1398.0082	JORONG PASAR SATU, 0, AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1807/N	GT.30/B13000284/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
11	B13.000285	285	HAFASURI 01	WANHARSYAH	02.21.04.1398.0098	JORONG PASAR BARU BARAT, -, AIA BANGIH, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2016 AAa No. 1124/N	GT.25/B13000285/572-J2/KP-LN
12	B13.000286	286	ENJOY	WANHARSYAH	02.21.04.1398.0098	JORONG PASAR BARU BARAT, -, AIA BANGIH, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1583/N	GT.26/B13000286/572-J2/KP-LN
13	B13.000287	287	TAUFIK 06	RIFDAL	02.21.04.1398.0096	JORONG PASAR BARU BARAT, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1829/N	GT.30/B13000287/572-J2/KP-LN
14	B13.000288	288	TAUFIK 05	RIFDAL	02.21.04.1398.0096	JORONG PASAR BARU BARAT, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1549/N	GT.30/B13000288/572-J2/KP-LN
15	B13.000289	289	RWD JR	RIKI HIDAYAT	02.19.01.1398.0095	JORONG PASAR MUARA, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1580/N	GT.30/B13000289/572-J2/KP-LN
16	B13.000290	290	REZKI RWD 014	WEBI UYUN	02.22.01.1398.0088	JORONG PASAR MUARA, 0, AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1871/N	GT.29/B13000290/572-J2/KP-LN
17	B13.000291	291	W F	WANDIKA ALHAQ	02.22.04.1398.0092	PASAR BARU BARAT, 0, AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1699/N	GT.30/B13000291/572-J2/KP-LN
18	B13.000292	292	WF 03	WANDIKA ALHAQ	02.22.04.1398.0092	PASAR BARU BARAT, 0, AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1870/N	GT.13/B13000292/572-J2/KP-LN
19	B13.000293	293	SBY 05	WIDYA AFDI	02.20.01.1398.0029	JL. PATIMURA JORONG PASA SATU, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1627/N	GT.25/B13000293/572-J2/KP-LN
20	B13.000294	294	KUALA INTAN 08	APRILWAN	02.20.01.1398.0065	JORONG PASAR MUARA, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1684/N	GT.29/B13000294/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
21	B13.000295	295	BUNGA LAUT BARU	HASBI HELKI	02.21.04.1398.0102	JORONG PASARA BARAU UTARA, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2018 AAa No. 1410/N	GT.21/B130002 95/572-J2/KP-LN
22	B13.000296	296	ADR 02	JANUWARTRI	02.20.01.1398.0027	PASAR SATU, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1626/N	GT.26/B130002 96/572-J2/KP-LN
23	B13.000297	297	BAHARI MANDIRI 02	BENI MURDANI	02.21.04.1398.0109	JORONG PASAR SATU, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2018 AAa No. 1402/N	GT.23/B130002 97/572-J2/KP-LN
24	B13.000298	298	BAHARI MANDIRI 03	BENI MURDANI	02.21.04.1398.0109	JORONG PASAR SATU, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1868/N	GT.30/B130002 98/572-J2/KP-LN
25	B13.000298	298	BAHARI MANDIRI 03	BENI MURDANI	02.21.04.1398.0109	JORONG PASAR SATU, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1868/N	GT.30/B130002 98/572-J2/KP-LN
26	B13.000299	299	MPT BARU 02	IFZA MARLINA	02.21.04.1398.0062	JORONG PASAR SATU, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1777/N	GT.29/B130002 99/572-J2/KP-LN
27	B13.000300	300	MPT BARU 01	IFZA MARLINA	02.21.04.1398.0062	JORONG PASAR SATU, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1471/N	GT.24/B130003 00/572-J2/KP-LN
28	B13.000301	301	YOGA BARU	ZULKIFLI	02.20.01.1398.0058	JORONG PASAR POKAN, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1657/N	GT.21/B130003 01/572-J2/KP-LN
29	B13.000302	302	AF 04	ALFERDIAN GUSMERI	02.22.04.1398.0012	JORONG KAMPUNG PADANG, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1562/N	GT.30/B130003 02/572-J2/KP-LN
30	B13.000302	302	AF 04	ALFERDIAN GUSMERI	02.22.04.1398.0012	JORONG KAMPUNG PADANG, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1562/N	GT.30/B130003 02/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
31	B13.000303	303	AF 06	ALFERDIAN GUSMERI	02.22.04.1398.0012	JORONG KAMPUNG PADANG, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1836/N	GT.22/B130003 03/572-J2/KP-LN
32	B13.000304	304	CAMAR 01	ALFERDIAN GUSMERI	02.22.04.1398.0012	JORONG KAMPUNG PADANG, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2011 AAa No. 879/N	GT.30/B130003 04/572-J2/KP-LN
33	B13.000305	305	HARAPAN BARU 01	FARIZI FILDI	02.17.01.1398.0106	JORONG PASAR BARU BARAT, - , AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2018 AAa No. 1286/N	GT.20/B130003 05/572-J2/KP-LN
34	B13.000306	306	REZA BARU 01	FRENGKI NUARI	02.22.01.1398.0148	BANDA BARU, 0, JORONG PADANG HALABAN, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2014 AAa No. 985/N	GT.27/B130003 06/572-J2/KP-PS
35	B13.000307	307	KM. GARUDO	HENDRA	02.22.04.1398.0093	LABUHAN TAROK, 001, BUNGUS BARAT, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2017 AAa No. 1167/N	GT.12/B130003 07/572-J2/KP-LH
36	B13.000308	308	IKHWAN JAYA 04	ISLAHUL ABDI	02.21.04.1398.0075	JORONG PASAR SATU, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1498/N	GT.28/B130003 08/572-J2/KP-LN
37	B13.000309	309	JASA KARYA 01	DONI IKHSAN	02.19.06.1398.0059	JORONG SASAK PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2007 AAa No. 815/N	GT.21/B130003 09/572-J2/KP-PS
38	B13.000310	310	JASA KARYA PRIMA 02	DONI IKHSAN	02.19.06.1398.0059	JORONG SASAK PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2007 AAa No. 817/N	GT.30/B130003 10/572-J2/KP-PS
39	B13.000311	311	DUA F 03	NOFRION ATRANISA PUTRA	02.22.01.1398.0031	JORONG PASA LAMO, 0, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1483/N	GT.23/B130003 11/572-J2/KP-PS
40	B13.000312	312	LAKSAMANA 03	ERMAN	02.19.01.1398.0107	JORONG PASAR MUARA, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1542/N	GT.17/B130003 12/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
41	B13.000313	313	ROSES 02	ZAL PRIANTO	02.20.01.1398.0004	JORONG KAMPUNG PADANG UTARA, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1628/N	GT.30/B130003 13/572-J2/KP-LN
42	B13.000314	314	PUTRI KENCANA 015	WERRY ERWIN	02.23.01.1398.0012	JL. RAWANG TIMUR IV, 1, RAWANG, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1832/N	GT.21/B130003 14/572-J2/KP-LH
43	B13.000274	274	KM. Alfin	INDRA, DT Rajo Lelo	02.23.01.1398.0050	JL. MAKASAR NO. 8 A, 0, GATES NAN XX, PADANG, SUMATERA BARAT	523.1/94/KET/D KP.2/IX/2023	-	GT.30/B130002 74/572-J2/KP-LN
44	B13.000315	315	PUTRI KENCANA 019	MASRIZAL	02.23.01.1398.0008	LABUAH LURUS TINGGAM, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1465/N	GT.30/B130003 15/572-J2/KP-PS
45	B13.000316	316	MAILIDA 02	MASUD	02.22.01.1398.0051	PONDOK, 0, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2007 AAa No. 809/N	GT.30/B130003 16/572-J2/KP-PS
46	B13.000317	317	WASPADA SAYANG 01	MESY SAFITRY	02.23.01.1398.0045	JORONG SIMPANG TIGA NAGARI KOTO BARU, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1659/N	GT.30/B130003 17/572-J2/KP-PS
47	B13.000318	318	GILANG 04	YUDI FENDRA	02.23.01.1398.0053	JORONG PASAR BARU UTARA, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2015 AAa No. 1071/N	GT.22/B130003 18/572-J2/KP-LN
48	B13.000319	319	REZKI RWD 012	YUHARLIS	02.20.06.1398.0075	JORONG PASAR LAMA, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1685/N	GT.30/B130003 19/572-J2/KP-LN
49	B13.000320	320	YURA 03	KEKIS	02.22.04.1398.0083	JORONG BUNGA TANJUNG, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1883/N	GT.23/B130003 20/572-J2/KP-LN
50	B13.000320	320	YURA 03	KEKIS	02.22.04.1398.0083	JORONG BUNGA TANJUNG, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1883/N	GT.23/B130003 20/572-J2/KP-LN
51	B13.000321	321	YURA	KEKIS	02.22.04.1398.0083	JORONG BUNGA TANJUNG, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1716/N	GT.24/B130003 21/572-J2/KP-LN
52	B13.000322	322	ZAM 03	IKHWAN	02.21.04.1398.0108	JORONG PASAR BARU TIMUR, -, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1900/N	GT.30/B130003 22/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
53	B13.000323	323	NINIENG 01	AFLI ULHAK	02.22.01.1398.0115	JORONG PASAR BARU UTARA, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1891/N	GT.29/B130003 23/572-J2/KP-LN
54	B13.000324	324	JASA KAWAN BARU 01	ARLIS. AD	02.22.01.1398.0082	JORONG PASAR BARU TIMUR, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1890/N	GT.30/B130003 24/572-J2/KP-LN
55	B13.000325	325	GILANG 07	RONI CENGKI KARNO	02.23.04.1398.0041	JORONG BUNGA TANJUNG, -, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1660/N	GT.24/B130003 25/572-J2/KP-LN
56	B13.000326	326	GILANG BARU 05	RONI CENGKI KARNO	02.23.04.1398.0041	JORONG BUNGA TANJUNG, -, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1468/N	GT.26/B130003 26/572-J2/KP-LN
57	B13.000327	327	FORTUNA WASPADA 04	DAHLIARNI	02.22.04.1398.0039	JORONG PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1843/N	GT.30/B130003 27/572-J2/KP-PS
58	B13.000328	328	MUTIARA LAUT USIN SEAFOOD 02	NORIS	02.22.01.1398.0064	JORONG PADANG HALABAN, 0, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1884/N	GT.30/B130003 28/572-J2/KP-PS
59	B13.000329	329	KENCANA 14	NURMATIAS	02.19.01.1398.0025	UJUNG PANDANG, 0, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2011 AAa No. 867/N	GT.30/B130003 29/572-J2/KP-PS
60	B13.000330	330	CAMAR LAUT	INDRIATI	02.21.04.1398.0097	JORONG SARIAK, 0, KOTO BARU, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2011 AAa No. 670/N	GT.30/B130003 30/572-J2/KP-PS
61	B13.000331	331	KARYA BERSAMA 55	ROLAN KRISTIAWAN H	02.22.01.1398.0044	JALUR I JORONG JAMBAK, 0, KOTO BARU, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 Qa No. 1078/N	GT.27/B130003 31/572-J2/KP-PS
62	B13.000332	332	ZONA SAIYO 01	AHMAD IFZON	02.21.01.1398.0084	JORONG KAMPUNG PADANG SELATAN, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1816/N	GT.20/B130003 32/572-J2/KP-LN
63	B13.000333	333	MAESTRO BARU 04	HELDI YARWAN	02.21.01.1398.0036	JORONG KAMPUNG PADANG UTARA, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1749/N	GT.26/B130003 33/572-J2/KP-PS
64	B13.000334	334	RAIS 03	SYAHRIDAL	02.21.04.1398.0076	JORONG PASAR POKAN, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1780/N	GT.25/B130003 34/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
65	B13.000335	335	JASA KARYA 11	ALI AMRAN	02.19.06.1398.0060	PASAR GORO, PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2008 AAa No. 824/N	GT.29/B130003 35/572-J2/KP-PS
66	B13.000336	336	JASA KARYA 08	ALI AMRAN	02.19.06.1398.0060	PASAR GORO, PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2008 AAa No. 823/N	GT.30/B130003 36/572-J2/KP-PS
67	B13.000337	337	BINTANG SAMUDRA 06	JON EFENDI	02.22.04.1398.0063	JAWI - JAWI JORONG PASA TIKU, -, TIKU SELATAN, AGAM, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1842/N	GT.30/B130003 37/572-J2/KP-PS
68	B13.000338	338	BINTANG CHARISA	INDRIATI	02.21.04.1398.0097	JORONG SARIAK, 0, KOTO BARU, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1710/N	GT.28/B130003 38/572-J2/KP-PS
69	B13.000339	339	JASA KARYA 04	ALI AMRAN	02.19.06.1398.0060	PASAR GORO, PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2004 AAa No. 798/N	GT.27/B130003 39/572-J2/KP-PS
70	B13.000340	340	HANIF	FEDRIANTO	02.23.01.1398.0039	SUNGAI PISANG, 000, TELUK KABUNG SELATAN, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2017 AAa No. 1257/N	GT.13/B130003 40/572-J2/KP-GN
71	B13.000341	341	WASPADA 01	DAHLIARNI	02.22.04.1398.0039	JORONG PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2010 AAa No. 858/N	GT.29/B130003 41/572-J2/KP-PS
72	B13.000345	345	FORTUNA 05	DAHLIARNI	02.22.04.1398.0039	JORONG PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2011 AAa No. 888/N	GT.30/B130003 45/572-J2/KP-PS
73	B13.000343	343	HALIM WIJAYA	ADEK SYAH PUTRA	02.21.03.1398.0004	JORONG PASAR LAMA SASAK, 0, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1718/N	GT.24/B130003 43/572-J2/KP-PS
74	B13.000346	346	ANTEL	PEBRIANDI	02.22.04.1398.0136	JL. BATANG KAMPAR NO. 3, 001, RIMBO KALUANG, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1667/N	GT.15/B130003 46/572-J2/KP-GN
75	B13.000347	347	POJA INDAH	FITRI NELDI	02.22.04.1398.0104	JORONG PASAR BARU TIMUR, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1779/N	GT.14/B130003 47/572-J2/KP-LN
76	B13.000353	353	Hello Kitty 02	TAMRIN	02.19.01.1398.0052	TELUK BETUNG, 0, IV KOTO HILIE, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2019 AAa No. 1507/N	GT.17/B130003 53/572-J2/KP-LN
77	B13.000364	364	DILLA DE VICKY 03	AFDAL SURYA		KALUMBUK, RT.002/RW.005	-	2022 AAa No. 1823/N	GT.30/B130003 64/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
78	B13.000366	366	RIKI - 01	JONEDI	02.16.04.1398.0011	KOMP. HARKA PERMAI PASIR KANDANG, 004, PASIR NAN TIGO, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2016 AAa No. 1112/N	GT.12/B13000366/572-J2/KP-LN
79	B13.000367	367	DILLA DE VICKY 05	AFDAL SURYA		KALUMBUK, RT.002/RW.005	-	2022 AAa No. 1877/N	GT.24/B13000367/572-J2/KP-LH
80	B13.000365	365	KM SAFINA 01	M. IHSAN	02.22.01.1398.0090	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN PAINAN, 0, PAINAN TIMUR PAINAN, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1859/N	GT.20/B13000365/572-J2/KP-LN
81	B13.000344	344	MONALISA - 2202	PEBRIANDI	02.22.04.1398.0136		-	2018 AAa No. 1300/N	GT.13/B13B13000344/572-undefined/KP-GN
82	B13.000369	369	KM. HABIBULLAH 01	RICAN TOMI	02.22.01.1398.0110	TAMBANG, 000, AMPANG PULAI, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1805/N	GT.10/B13000369/572-J2/KP-LN
83	B13.000370	370	KM. Wahyu Putra 03	RUSTAM	02.23.04.1398	Pasar Gompong, Desa Kambang Barat, Kec. Lenggayang Kab. Pesisir Selatan	-	2018 AAa No 1290/N	GT.11/B13000370/572-J2/KP-LH
84	B13.000371	371	KM. Wahyu Putra 06	RUSTAM	02.23.04.1398	Pasar Gompong, Desa Kambang Barat, Kec. Lenggayang Kab. Pesisir Selatan	-	2018 AAa No 1291/N	GT.10/B13000371/572-J2/KP-LH
85	B13.000372	372	KM. Wahyu Putra 02	RUSTAM	02.23.04.1398	Pasar Gompong, Desa Kambang Barat, Kec. Lenggayang Kab. Pesisir Selatan	-	2022 AAa No. 1857/N	GT.13/B13000372/572-J2/KP-LH
86	B13.000376	376	Tuna Laut	MUKTAR	02.21.04.1398.0046	PASAR GOMPONG, 0, KAMBANG BARAT, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1666/N	GT.11/B13000376/572-J2/KP-LH
87	B13.000377	377	KM. Tuna Laut 02	MUKTAR	02.21.04.1398.0046	PASAR GOMPONG, 0, KAMBANG BARAT, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1666/N	GT.13/B13000377/572-J2/KP-LH
88	B13.000383	383	HIBO 03	SHERLIANA SUNDARI	02.22.04.1398.0124	KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA BUNGUS	-	2016 AAa No. 1109/N	GT.19/B13000383/572-J2/KP-LH
89	B13.000384	384	HALIMAH	SHERLIANA SUNDARI	02.22.04.1398.0124	KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA BUNGUS	-	2021 AAa No. 1686/N	GT.28/B13000384/572-J2/KP-LH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
90	B13.000385	385	HIBO 05	SHERLIANA SUNDARI	02.22.04.1398.0124	KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA BUNGUS	-	2016 AAa No. 1119/N	GT.17/B13000385/572-J2/KP-LH
91	B13.000391	391	KM. SALSA 03	JASWAN	02.22.01.1398.0049	JORONG PASAR POKAN	-	SUB 1 No 269	GT.6/B13000391/KP
92	B13.000394	394	KM.WAHYU PUTRA 07	RUSTAM	02.23.04.1398	Pasar Gompong, Desa Kambang Barat, Kec. Lenggayang Kab. Pesisir Selatan	-	2022 AAa No.1858/N	GT.13/B13000394/572-J3/KP-LH
93	B13.000395	395	FAUZI 07	MIDDIA RAHMAN	02.21.04.1398.0034	JORONG PASAR POKAN, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1965/N	GT.27/B13000395/572-J2/KP-LN
94	B13.000395	395	FAUZI 07	MIDDIA RAHMAN	02.21.04.1398.0034	JORONG PASAR POKAN, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1965/N	GT.27/B13000395/572-J2/KP-LN
95	B13.000395	395	FAUZI 07	MIDDIA RAHMAN	02.21.04.1398.0034	JORONG PASAR POKAN, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1965/N	GT.27/B13000395/572-J2/KP-LN
96	B13.000396	396	JAHFAL JADID	DEFFI ARMAN	02.23.01.1398.0056	JORONG PASAR BARU TIMUR, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1962/N	GT.21/B13000396/572-J2/KP-LN
97	B13.000397	397	WF 02	WANDIKA ALHAQ	02.22.04.1398.0092	PASAR BARU BARAT, 0, AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1940/N	GT.30/B13000397/572-J2/KP-LN
98	B13.000398	398	TAUFIK 04	RIFDAL	02.21.04.1398.0096	JORONG PASAR BARU BARAT, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1961/N	GT.27/B13000398/572-J2/KP-LN
99	B13.000399	399	GILANG 08	GILANG SAFIKRI	02.23.01.1398.0002	JORONG BUNGA TANJUNG, 000, AIR BANGIS, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1941/N	GT.30/B13000399/572-J2/KP-LN
100	B13.000400	400	RIZKI KAMI	RIKA MULYADI	02.23.01.1398.0004	JORONG PASAR DUA SUAK, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1927/N	GT.26/B13000400/572-J2/KP-LN
101	B13.000401	401	SYAKINA 02	DIDI ANDESTA PUTRA	02.23.01.1398.0040	GANG MAWAR NO.52	-	2023 AAa No. 1956/N	GT.30/B13000401/572-J2/KP-LN
102	B13.000402	402	FORTUNA 01	ISMEDI	02.22.01.1398.0152	PASAR BARU BARAT	-	2023 AAa No. 1925/N	GT.29/B13000402/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
103	B13.000403	403	NF	ERI ZALMAN	02.23.01.1398.0001	JORONG PASAR POKAN, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1926/N	GT.24/B130004 03/572-J2/KP-LN
104	B13.000406	406	KM FITRA 06	RINO MINARTO	02.23.01.1398.0077	Pasar gompong, desa/kelurahan kambang barat, kec.Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi.Sumatera barat	-	2018 Aaa No 1317/ N	GT.10/B130004 06/572-J2/KP-LH
105	B13.000410	410	RDN 05	JON EFI		KOMP. HARKA PASIR PERMAI BLOK C-9	-	2023 AAa No. 1937/N	GT.30/B130004 10/572-J2/KP-LN
106	B13.000409	409	HARAPAN BAROE 01	AMRI FUADI		PERUM GRIYA ELANG SEMESTA V BLOK B No.15	-	2018 QQc No. 439/N	GT.21/B130004 09/572-J2/KP-LH
107	B13.000408	408	KM. FITRA 08	ELI	02.23.04.1398.0079	Padang marapalam, Desa Lakitan Utara, Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan	-	2018 Aaa No. 1364/N	GT.11/B130004 08/572-J2/KP-LH
108	B13.000407	407	KM. FITRA 05	RINO MINARTO	02.23.01.1398.0077	Pasar gompong, desa/kelurahan kambang barat, kec.Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi.Sumatera barat	-	2018 Aaa No 1316/N	GT.10/B130004 07/572-J2/KP-LH
109	B13.000412	412	JEBEL 01	EMI		PASIR SEBELAH	-	2021 AAa No.1723/N	GT.28/B130004 12/572-J2/KP-LN
110	B13.000411	411	CHALIL	WIDYA NINGSIH		CINDAKIR	-	2023 AAa No.1953/N	GT.20/B130004 11/-undefined-J2-J2-J2-J2-J2-J2/KP-LN
111	B13.000416	416	AL FATIH	NOUVAL SAUQI	02.23.01.1398.0069	JORONG PASAR SATU	-	2023 AAa No. 1970/N	GT.30/B130004 16/572-J2/KP-LN
112	B13.000415	415	PIA 02	MEGA SILVIANI	02.23.04.1398.0011	PASAR GOMPONG	-	2023 AAa No. 1934/N	GT.13/B130004 15/572-J2/KP-LH
113	B13.000417	417	KM. JAMCHA 01	DARWIN	02.23.04.1398.0093	TARUKO NO.5 NANGGALO	-	2023AAaNo.1966/N	GT.30/B130004 17/572-J2/KP-LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
114	B13.000349	349	HAYYUN ANBIYA	SYAHMINAN	02.20.06.1398.0011	TELUK BETUNG, -, IV KOTO HILIE, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2018AAaNo.1424/N	GT.10/B13000349/-undefined-J2-J2-J2-J2-J2-J2/KP-LN
115	B13.000350	350	ZAID 01	RIKI RACI MIKO	02.21.01.1398.0012	JL. DIPONEGORO, 0, PAINAN SELATAN PAINAN, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No.1635/N	GT.12/B13000350/572-J2/KP-LN
116	B13.000368	368	KM SHOWIE 02	HARPEN DALIK	02.22.04.1398.0053	SAPAN, 0, KOTO NAN DUO IV KOTO, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1759/N	GT.11/B13000368/572-J2/KP-LN
117	B13.000378	378	KM. MOREVER	IVAL RIYERA	02.22.04.1398.0034	TELUK BETUNG, 0, IV KOTO HILIE, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No 1756/N	GT.14/B13000378/572-J2/KP-LN
118	B13.000380	380	KM. Sepasang Merpati	MARTA JAYA	02.21.04.1398.0074	TELUK BETUNG, -, IV KOTO HILIE, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2020AAa No. 1597/N	GT.18/B13000380/572-J2/KP-LN
119	B13.000381	381	KM. Sepasang Merpati 02	MARTA JAYA	02.21.04.1398.0074	TELUK BETUNG, -, IV KOTO HILIE, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	-	GT.18/B13000381/572-J2/KP-LN
120	B13.000390	390	KM. YOESANI KY	AGUSTIN	02.22.01.1398.0132	KAMPUNG LADANG	-	2017 AAa No. 1216/N	GT.14/B13000390/572-J2/KP-LH
121	B13.000393	393	KM. DEEVAN	TRISNO MARDIAN	02.23.01.1398.0044	KAMPUNG PINANG RT. 002 RW. 005	-	2023 AAa No.1943	GT.16/B13000393/572-J2/KP-LN
122	B13.000404	404	RAJO INTAN	DIKE SUPRATA	02.23.01.1398.0043	GURUN PANJANG DUSUN. GURUN PANJANG	-	2023 AAa No. 1955/N	GT.30/B13000404/572-J2/KP-LN
123	B13.000413	413	RATUU	PEBRIANDI	02.22.04.1398.0136	JL. BATANG KAMPAR NO. 3, 001, RIMBO KALUANG, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1892/N	GT.20/B13000413/572-J2/KP-GN
124	B13.000342	342	HADISTI	YONEDI	02.22.01.1398.0105		-	2022 AAa No. 1885/N	GT.15/B13B13000342/572-J2/KP-LN
125	B13.000355	355	WASPADA 02	DAHLIARNI	02.22.04.1398.0039	JORONG PADANG HALABAN, -, SASAK, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2016 AAa No. 1102/N	GT.30/B13000355/572-J2/KP-PS

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
126	B13.000356	356	KARINA 01	MESRA		LABUHAN TAROK, RT.002/RW.001	-	2018 AAa No. 1435/N	GT.25/B130003 56/572-J2/KP- LH
127	B13.000348	348	KM. Kurnia 501	JASMIRAL	02.22.04.1398.0111	PASAR KAMBANG, 0, KAMBANG BARAT, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2018 AAa No.1365/N	GT.11/B130003 48/572-J2/KP- LH
128	B13.000357	357	MUTIARA - 31	MUHAMMAD JAMIL		WISMA INDAH X BLOK A No.4, RT.002/RW.009	-	2019 AAa No. 1553/N	GT.30/B130003 57/572-J2/KP- LN
129	B13.000358	358	FARID - 03	MAHDIAR	02.21.01.1398.0031	JORONG PASAR SATU, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2013 AAa No. 953/N	GT.29/B130003 58/572-J2/KP- LN
130	B13.000359	359	RATU BARU - 02	MAHDIAR	02.21.01.1398.0031	JORONG PASAR SATU, 0, AIA BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2016 AAa No. 1116/N	GT.30/B130003 59/572-J2/KP- LN
131	B13.000360	360	DILLA DE VICKY 01	AFDAL SURYA		KALUMBUK, RT.002/RW.005	-	2021 AAa No.1752/N	GT.29/B130003 60/572-J2/KP- LN
132	B13.000361	361	DILLA DE VICKY	AFDAL SURYA		KALUMBUK, RT.002/RW.005	-	2021 AAa No.167/N	GT.30/B130003 61/572-J2/KP- LN
133	B13.000362	362	RIDHO 05	ULIL AMRI	02.20.01.1398.0016	JORONG PASAR MUARA, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2020 AAa No. 1630/N	GT.29/B130003 62/572-J2/KP- LN
134	B13.000351	351	KM. Qonita Radar Laut	Kornelis		Anakan, Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan	-	2021AAa No.1785/N	GT.20/B130003 51/572-J2/KP- LN
135	B13.000352	352	HELLO KITTY 06	HAMDANI	02.21.04.1398.0027	SUNGAI PAMPAN, 0, KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2020AAa No.1633/N	GT.15/B130003 52/572-J2/KP- LN
136	B13.000354	354	KM. Nilon 02	RANDI SAPUTRA	02.23.01.1398.0025	CINDAKIR RT. 001 RW. 003 , 3, TELUK KABUNG UTARA, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No.1924/N	GT.15/B130003 54/572-J2/KP- LN
137	B13.000363	363	KM. Kambang Saiyo 01	DODI HARIANTO	02.19.01.1398.0081	PADANG MANDIANGIN, 0, LAKITAN UTARA, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	2018 AAa No 1401/N	GT.11/B130003 63/572-J2/KP- LH
138	B13.000374	374	JAGAD NATARA	ASFIRMAN	02.21.01.1398.0073	JORONG PULAU PANJANG, 0, AIR BANGIH, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2021 AAa No. 1778/N	GT.16/B130003 74/572-J2/KP- LN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

No.	No Register	Nomor BKP	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Pemilik	No Seri BKP	No Tanda Pendaftaran	No Tanda Pengenal
139	B13.000373	373	KM. Naila 06	DONI OKTRIADI	02.22.01.1398.0038	KOMPLEK PRATAMA INDAH CINDAKIR, 0, TELUK KABUNG UTARA, PADANG, SUMATERA BARAT	-	2022 AAa No. 1863/N	GT.16/B13000373/572-J2/KP-LN
140	B13.000375	375	KM. SINAR MUTIARA	DAPIT TRISNO	02.23.04.1398.0076	JL. SEMPIT SIMPANG, 0, AMPANG PULAI, PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT	-	SUB 1 No.626	GT.6/B13000375/KP
141	B13.000379	379	KM. IKHSAN 01	SYAHRIAL	02.23.01.1398.0075	JL. Kaluak Nanggalo, Desa Nanggalo, Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	-	SUB 1 No. 626	GT.6/B13000379/KP
142	B13.000382	382	KM. Fitra 10	ELI	02.23.04.1398.0079	Padang marapalam, Desa Lakitan Utara, Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan	-	2018 AAa No.1366/N	GT.12/B13000382/572-J2/KP-LH
143	B13.000386	386	KM.SINDI 02	Novi hendri	02.23.04.1398.0082		-	2017 AAa no.1272/N	GT.NaN/B13B13000386/572-J1A/KP-LH
144	B13.000388	388	KM.SINDI 02	Novi hendri	02.23.04.1398.0082	Kambang barat	-	2017 AAa no 1272 N	GT.7/B13000388/572-J3/KP-LH
145	B13.000387	387	KM.INDAH 08	Apriandi indramulya		Padang mandiingin,lakitan utara kec. lengayang	-	2017 AAa no 1213	GT.12/B13000387/572-J3/KP-LH
146	B13.000389	389	NADIF 03	DEKRI VORNANDES CHAN	02.23.01.1398.0027	BATU KALANG	-	2023 AAa No1936/N	GT.28/B13000389/572-J2/KP-LN
147	B13.000392	392	RAIS 04	DILA VERA AYI	02.23.01.1398.0061	JORONG PASAR POKAN, PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT	-	2023 AAa No. 1964/N	GT.29/B13000392/572-J2/KP-LN
148	B13.000405	405	TSJA02	EKI INDRA PUTRA	02.23.04.1398.0006	RAWANG	-	-	GT.30/B13000405/572-J2/KP-LN
149	B13.000414	414	HARAPAN BASAMO 01	delfian satria		pasar amping parak	-	2022 AAa No. 1906/N	GT.9/B13000414/572-J2/KP-LH

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran 1 ini jika dibandingkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Kinerja	2021			2022			2023 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-	-1,68	-	0,99	2,90	292,93	1,07	5,83	544,86

* angka sementara

Jika dilihat dari indikator kinerja, persentase peningkatan produksi perikanan tangkap meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yang sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1,68%, meningkat menjadi 2,90% dan mencapai 5,83% di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.3 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 - 2023

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 *	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2023 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5,83	1,17	498,29

*angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 5,83% dengan capaian sebesar 498,29% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 1,17%. Dilihat dari capaian tahun ini, sebenarnya telah jauh melebihi target akhir Renstra, sehingga perlu perbaikan target Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Nasional *	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5,83	-18,98	+

*angka sementara

Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

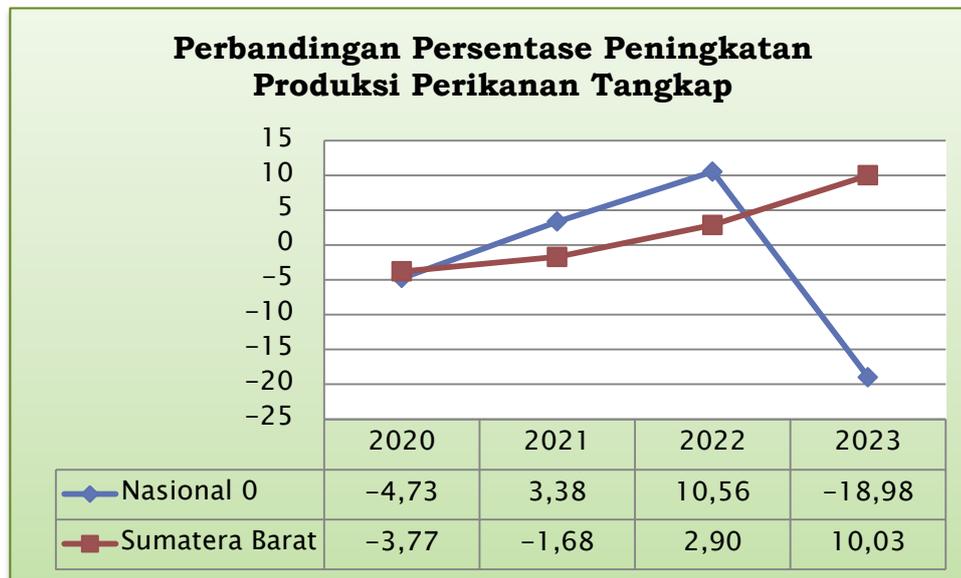
Tabel 3.16 Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Nasional

Capaian	Produksi (ton)		
	2021	2022	2023*
Nasional (ton)	7.224.501	7.987.704	6.471.730
Peningkatan (%)	3,38	10,56	-18,98
Sumatera Barat (ton)	212.520,50	218.688,65	231.443,20
Peningkatan (%)	-1,68	2,90	5,83

*angka sementara Sumber : Pusdatin KKP, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Produksi kelautan dan perikanan nasional tahun 2023 menurun sebesar 18,98% karena terjadi penurunan pada target Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu 6 juta ton.

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Sumatera Barat jika dibandingkan secara Nasional dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Dari grafik di atas, Produksi Perikanan Tangkap baik secara nasional maupun provinsi mengalami variasi peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar - 1.68%, pada tahun 2022 peningkatan naik sebesar 2,90% dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,83%.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 5,83 dengan tingkat capaian 544,86%. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai *upaya* yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

Pada Perairan Umum :

1. Kegiatan penebaran benih ikan / restocking di perairan umum (danau dan sungai) untuk meningkatkan populasi ikan. Restocking ikan di perairan umum sebanyak 300.000 ekor benih ikan garing.
2. Pembangunan Reservat di danau Singkarak dan Maninjau untuk pelestarian dan peningkatan populasi ikan.
3. Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan Perairan Umum berupa pemberian bantuan mesin tempel 2,5 PK dan gillnet. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok.

Laut :

1. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan berupa mesin (mesin tempel, mesin diesel, mesin longtail), jaring, Fish Box, alat tangkap kepiting dan Rumpon laut dangkal.

Rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Rumpon dalam bahasa kelautan adalah karang buatan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan sebagai tempat berkumpul ikan. Rumpon merupakan rumah buatan bagi ikan di dasar laut yang dibuat secara sengaja dengan menaruh berbagai jenis barang di dasar laut seperti ban, dahan dan ranting dengan pohonnya sekaligus. Barang-barang tersebut dimasukkan dengan diberikan pemberat berupa beton, batu-batuan dan pemberat lainnya sehingga posisi dari rumpon tidak bergerak karena arus laut. Barang-barang yang dimasukkan ke dalam laut dapat terus ditambah secara berlanjut untuk menambah massa rumpon.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keahlian melalui kegiatan;
 - a. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan
 - b. Sosialisasi Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan di 3 Kabupaten

- c. Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT) di Kabupaten/Kota
 - d. Sosialisasi Penertiban Perizinan kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI) dan Peraturan Perizinan Kapal Perikanan
 - e. Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) agar hasil tangkap optimal dengan memperhatikan aspek keselamatan
 - f. Pelayanan Terpadu penerbitan dokumen kapal penangkap ikan dengan tujuan agar adanya rasa aman bagi nelayan dalam mengoperasikan kapal mereka di laut
3. Terlaksananya pemberian asuransi nelayan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil sesuai amanat Pergub Nomor 2 Tahun 2023 (4109 Nelayan).

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah:

1. Populasi sumberdaya ikan terbatas dan terjadi penurunan, baik dari laut maupun perairan umum.
2. Faktor cuaca dan iklim yang tidak menentu.
3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi overfishing di perairan umum.
4. Terbatasnya BBM bersubsidi, sehingga belum memenuhi kebutuhan melaut.
5. Terbatasnya modal usaha, sehingga sarana prasarana menjadi terbatas.

Upaya ke depan yang akan dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi hambatan pencapaian sasaran strategis peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain:

1. Meningkatkan penebaran benih ikan / restocking di perairan umum (danau dan sungai) untuk meningkatkan populasi ikan
2. Lebih intensif melakukan pengawasan reservat dengan melibatkan masyarakat.
3. Pengawasan dan sosialisasi alat tangkap sesuai ketentuan
4. Meningkatkan Koordinasi serta pengawasan dengan lintas sector dalam dalam distribusi BBM bersubsidi.

5. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Perikanan yang membidangi perikanan di Kab/Kota dalam upaya langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap beserta kendala yang dihadapi.
6. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan UPTD Pelabuhan Perikanan dan UPT Pusat tentang fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai dengan identifikasi kebutuhan masing-masing UPTD Pelabuhan Perikanan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.17. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Mendorong investor untuk berinvestasi pada kapal motor dengan ukuran skala besar sehingga nelayan dapat menjangkau wilayah laut lepas	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp.29.820.494.643,- dan terealisasi Rp.27.993.438.978,- (93,87%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar dengan uraian tabel di bawah ini:

Tabel 3.17 Program/Kegiatan dan Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.820.494.643	27.993.438.978	93,87	99,78	1.827.055.665
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	25.582.421.774	23.820.162.946	93,11	99,75	1.762.258.828
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	29.648.250	27.185.603	91,69	100	2.462.647
1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD PPW	604.019.800	475.969.565	78,80	89,29	128.050.235
1.3	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD – UPTD PPW II]	4.299.832.522	3.102.924.375	72,16	100	1.196.908.147
1.4	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD – UPTD PPW III]	1.733.904.650	1.491.345.791	86,01	100	242.558.859
1.5	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	18.915.016.552	18.722.737.612	98,98	100	192.278.940
2	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Prov	1.456.501.920	1.437.183.255	98,67	100	19.318.665
2.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.456.501.920	1.437.183.255	98,67	100	19.318.665

3	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai 30 GT	300.776.750	270.043.910	89,78	100	30.732.840
3.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	59.252.000	58.997.000	99,57	100	255.000
3.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	241.524.750	211.046.910	87,38	100	30.477.840
4	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.480.794.199	2.466.048.867	99,41	100	14.745.332
4.1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW I]	700.718.970	688.601.717	98,27	100	12.117.253
4.2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW II]	1.308.152.879	1.306.985.850	99,91	100	1.167.029
4.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW III]	471.922.350	470.461.300	99,69	100	1.461.050

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 1 (satu) ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungannya.

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran	
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07	5,83	544,86	29.820.494.643	27.993.438.978

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	544,86%	93,87%	83%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017) tertuang dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020, yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(29.820.494.643 \times 544,86\%) - 27.993.438.978}{(29.820.494.643 \times 544,86\%)} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap adalah 83% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Sasaran 2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
------------------	---

Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kabupaten/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu ada potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.

Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat tahun 2023 yaitu potensi budidaya air laut 17.703 Ha dengan pemanfaatan lahan baru 14,54 Ha, potensi lahan budidaya air payau 5.326,2 Ha dengan pemanfaatan lahan

sebesar 540,84 Ha, dan potensi lahan budidaya air tawar 30.899,31 Ha dengan pemanfaatan lahan sebesar 15.040,12. Potensi lahan budidaya di kolam 19.682,23 Ha. Potensi budidaya ikan di sawah seluas 491,53 Ha, potensi lahan budidaya tambak 165,06 Ha, potensi keramba jaring apung 35,66 Ha dan potensi kolam air deras 72,76 Ha.

Komoditi utama untuk budidaya air tawar adalah ikan mas, nila, gurami dan lele. Pada Tahun 2023 produksi perikanan budidaya sebesar 274.290.000 ton dengan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 84.015 orang. Pada saat ini juga mulai berkembang budidaya air payau di tambak yaitu budidaya udang vaname di Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi perikanan budidaya air tawar ini tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota yaitu antara lain : Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar.

Bentuk kegiatan perikanan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah budidaya pada kolam air tenang, kolam air deras, keramba jaring apung dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah Minapadi.

Tahun 2023 telah ditetapkan 6 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai Kampung Perikanan Budidaya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 111 tahun 2023 yaitu :

1. Kabupaten Pasaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan mas
2. Kabupaten Agam sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan nila
3. Kota Pariaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan lele
4. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami
5. Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami
6. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami

Provinsi Sumatera Barat juga bisa menjadi lokasi pengembangan budidaya Rumput Laut dengan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan pada daerah :

- a. Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- c. Kabupaten Pasaman Barat

Hasilnya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan rumput laut menjadi produk-produk turunannya yang bernilai tambah tinggi.

Capaian indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengelolaan budidaya perikanan. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produksi perikanan budidaya adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Cara Penghitungan
1.	Persentase peningkatan produksi Perikanan Budidaya	3,39	2,052	60,53	<p>a. Target 3,39 %</p> <p>b. Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 sebesar 274.290 ton sehingga persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar</p> $\frac{\text{Realisasi Thn 2023} - \text{Realisasi Thn 2022}}{\text{Realisasi Tahun 2022}} \times 100\%$ $= \frac{274.290 \text{ ton} - 268.774,30 \text{ ton}}{268.774,30 \text{ ton}} \times 100\%$ $= \frac{5.515,7}{268.774,30} \times 100\% = 2,052\%$ <p>c. Maka persentase Capaian yaitu :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ </div> $= \frac{2,052}{3,39} \times 100 = 60,53 \%$

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 target dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target sebesar 3,39% dan terealisasi sebesar 2,052% dengan tingkat capaian sebesar 60,53% termasuk kategori Rendah.

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya merupakan penghitungan besarnya penghitungan produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu (sebelumnya) dikali 100%.

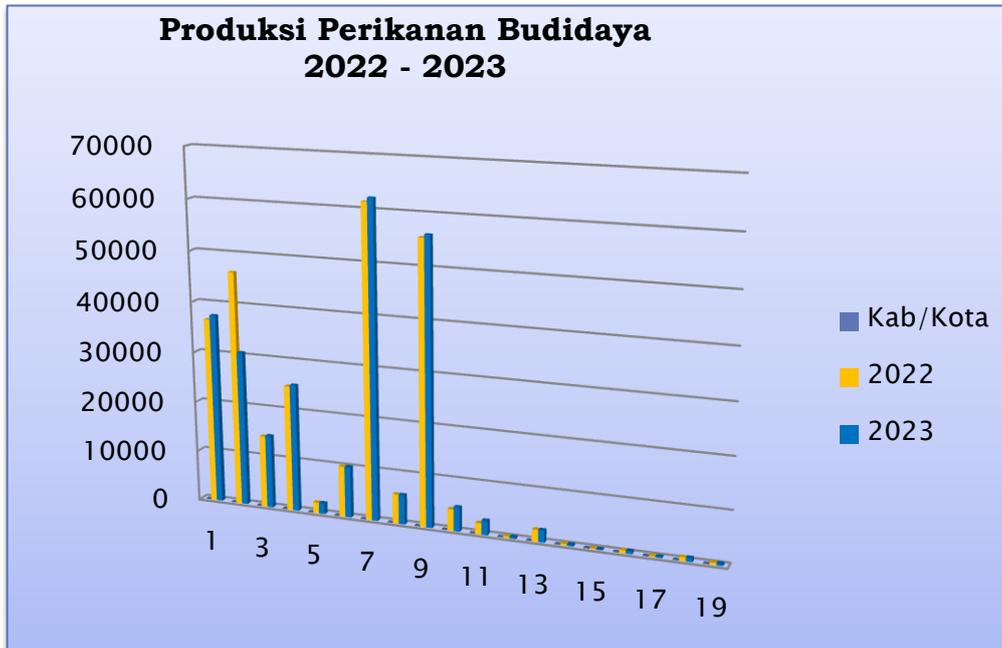
Produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 274.290 ton meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 268.774,30 ton. Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing – masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 dan 2023

No	Kab/Kota	Produksi (Ton)	
		2022	2023
1	Lima Puluh Kota	36.641,08	39.535,779
2	Agam	46.332,78	30.660,684
3	Pesisir Selatan	14.277,26	16.490
4	Dharmasraya	24.891,11	27.224,100
5	Sijunjung	2.160,80	3.103,938
6	Tanah Datar	10.062,26	11.475,771
7	Pasaman	61.454,13	64.268,442
8	Pasaman Barat	5.825,51	7.830,123
9	Padang Pariaman	55.561,82	58.170
10	Kab. Solok	4.252,12	6.001,883
11	Solok Selatan	2.212,70	3.820,939
12	Mentawai	320,61	329,136
13	Padang	2.359,05	2.859,105
14	Pariaman	325,01	340,900
15	Ko.Solok	154,20	161,400
16	Payakumbuh	568,98	580,080
17	Sawahlunto	201,22	217,542
18	Padang Panjang	735,50	775,028
19	Bukittinggi	438,17	445,150
Total		268.774,30	274.290

Sumber : DKP, 2023

Dari hasil produksi perikanan budidaya Tahun 2023 dapat diperoleh persentase peningkatan produksi budidaya sebesar 2,052% dengan rumus produksi tahun 2023 dikurang produksi tahun sebelumnya (2022) dibagi dengan produksi 2022 dikalikan 100 yaitu $274.290 \text{ ton} - 268.774,30 \text{ ton} = 5.515,7 / 268.774,30 = 2,052\%$. Produksi perikanan budidaya tahun 2023 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu mas, nila, lele, gurami dan lain-lain. Data produksi perikanan budidaya dapat juga dilihat dari grafik di bawah ini :



Grafik 3.5 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022-2023

Dari grafik terlihat adanya peningkatan dan penurunan produksi dari Kab/Kota, produksi yang tertinggi dari Kab. Pasaman sebesar 62.268,442 ton karena banyak kolam-kolam ikan dan produksi ikan meningkat dan Kab. Padang Pariaman produksi perikanan budidaya sebesar 56.170 ton, hal ini karena banyaknya lahan untuk tambak udang vaname.

Angka capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya masih bersifat sementara dimana untuk data produksi perikanan budidaya secara umum dari Kabupaten/Kota masih menggunakan capaian yang diproyeksikan dan nantinya semua data tersebut akan divalidasikan secara nasional baik di Provinsi maupun di Pusat.

Produksi perikanan budidaya tiap tahunnya naik turun dan dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim, banjir dan serangan hama dan penyakit ikan.

Peluang untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan adalah :

1. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar (kolam air deras dan kolam mina padi) dan budidaya secara intensif.

2. Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan.

Dokumentasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DOKUMENTASI KEGIATAN 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

KEGIATAN SERTIFIKASI CPIB



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

KEGIATAN PENGEMBANGAN INDI UNGGUL



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

KEGIATAN SERTIFIKASI CBIB



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

KEGIATAN PEMETAAN LOBSTER



DOKUMENTASI KEGIATAN 2023

KEGIATAN PENGEMBANGAN UDANG VANAME



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

Tabel 3.22 Bantuan perikanan budidaya yang diberikan pada tahun 2023 :

NO	JENIS BANTUAN	KABUPATEN / KOTA																			TOTAL
		MENTAWAI	PESISIR SELATAN	PADANG	PASAMAN	PARIAMAN	PDG PARIAMAN	AGAM	TANAH DATAR	50 KOTA	PAYAKUMBUH	PASBAR	KO. SOLOK	KAB. SOLOK	SIJUNJUNG	SOLSEL	PDG PJJ	DHAR MASRAYA	BUKIT TINGGI	SAWAHLUNTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Benih Ikan Nila	25.000		155.000			30.000	320.000	285.000	40.000				40.000	90.000		30.000	60.000		75.000	1.150.000
2	Pakan Benih Ikan Nila (Kg)	810		7.140			680	9.290	9.900	1.290				1.570	3.250		1.080	2.580		2.460	40.050
3	Benih Ikan Mas (ekor)			60.000	400.000														80.000		540.000
4	Pakan Ikan Mas (Kg)			2.200	7.290														5.200		14.690
5	Benih Lele		100.800	30.100			11.655	122.800	16.560	90.375		60.200					4.530				437.020
6	Pakan Lele (Kg)		6.640	2.650			1.070	8.940	1.460	6.850		5.300					292				33.202
7	Benih Gurami		28.624	31.124	10.000	4.000	64.958	44.676		19.000									31.124		233.506
8	Pakan Gurami		2.140	3.480	500	355	2.933	5.010		895									3.480		18.793
9	Benih kerapu hybrid (ekor)	5.600	20.400																		26.000
10	Pakan kerapu (Kg)	3.240	11.320																		14.560
11	Calon induk ikan Nila		400	400	1.600			6.800				800	800	2.000	1.600	800					15.200
12	Pakan Induk Ikan Nila (Kg)		200	200	800			3.400				400	400	1.000	800	400					7.600
13	Calon induk ikan Lele		50		100	100	150	50		150	100	50	50	50	50	100				50	1.100
14	Pakan induk ikan Lele (Kg)		200		400	400	600	200		600	400	200	200	200	200	400				200	4.400
15	Benur vaname		500.000																		500.000
16	Pakan vaname		15.000																		15.000
17	Obat (Botol)		26	11			4	29	3	17		10					1	6			107
18	Waring	8	10																		18
	TOTAL KESELURUHAN	34.658	685.810	292.305	420.690	4.855	112.050	521.195	312.923	159.177	500	66.960	1.450	44.820	95.900	1.450	36.403	97.190	85.200	77.710	3.051.246

Dari tabel di atas, dapat kita rekapitulasi jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2023
1.	Benih ikan nila	1.150.000 ekor
2.	Benih ikan mas	540.000 ekor
3.	Benih ikan lele	437.020 ekor
4.	Benih ikan gurami	233.506 ekor
5.	Pakan benih	106.735 Kg
6.	Calon induk nila	15.200 Kg
7.	Calon induk lele	1.100 Kg
8.	Pakan induk	12.000 Kg
9.	Benih kerapu hybrid	26.000 ekor
10.	Pakan Kerapu	14.560 Kg
11.	Benur vaname	500.000 ekor
9.	Pakan vaname	15.000 Kg
10.	Obat-obatan	107 botol
11.	Waring	18 unit

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran 2 ini jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021 – 2023

No.	Indikator Kinerja	2021			2022			2023 *		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		5,48		3,33	3,36	100,90	3,39	2,052	60,53

*angka sementara

Jika dilihat dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.6 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021 - 2023

Dilihat dari grafik di atas adanya peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu 3,36% dan tahun 2023 menurun menjadi 2,052%.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.24 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 *	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2023 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,052	3,97	51,69

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 2,052 % dengan capaian sebesar 51,69% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 3,97%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Nasional *	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,052	3,51	+

*Angka Sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Produksi kelautan dan perikanan nasional tahun 2023 meningkat sebesar 3,51%.

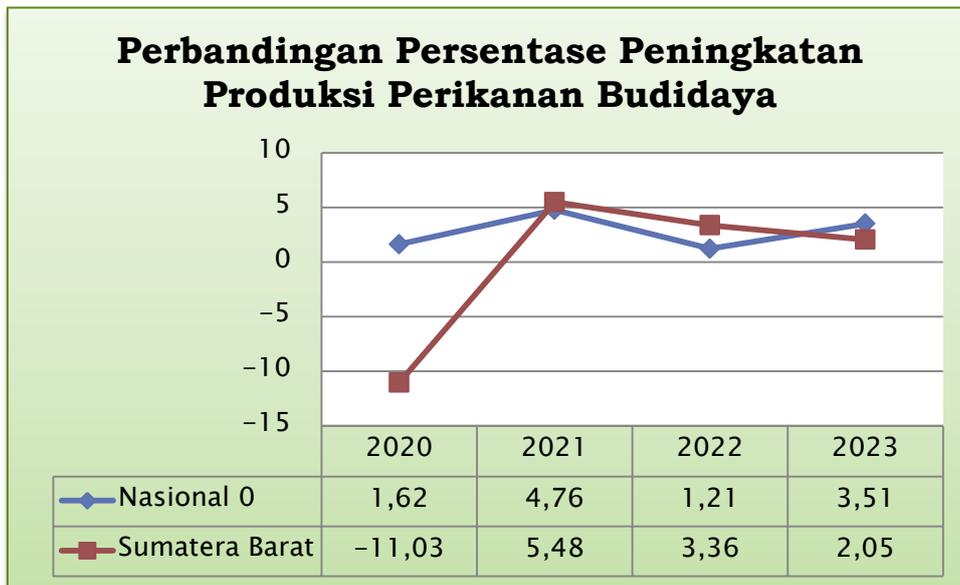
Capaian produksi perikanan budidaya jika dilihat dengan capaian nasional dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.26 Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Nasional

Capaian	Produksi (ton)		
	2021	2022	2023*
Nasional (ton)	16.195.461,8	16.392.167	16.967.518
Peningkatan (%)	4,76	1,21	3,51
Sumatera Barat (ton)	260.042,05	268.774,30	274.290,00
Peningkatan (%)	5,48	3,36	2,052

*Angka Sementara Sumber : Pusdatin KKP, 2023

Produksi perikanan budidaya nasional meningkat sebesar 3,51% pada tahun 2023. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Sumatera Barat jika dibandingkan secara Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.7 Perbandingan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari grafik di atas, Produksi Perikanan Budidaya baik secara nasional maupun provinsi mengalami variasi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada Tahun 2020 produksi perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar -11,03%, pada tahun 2021 peningkatan sebesar 5,48%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3.36% dan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,052%.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 2,052% dengan tingkat capaian 60,53%. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya, Rendah. Target Produksi perikanan budidaya tahun 2023 tidak mencapai target karena berkurangnya produksi dari kolam air deras dan kolam air tenang akibat berkurangnya permintaan pasar dan harga pakan yang tinggi. Selain itu, berkurangnya jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak +/- 20-30% di Danau Maninjau juga mengakibatkan penurunan +/- 15 ribu ton hasil produksi budidaya ikan di Danau Maninjau, Kabupaten Agam.

Pengurangan jumlah Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau saat ini sejalan dengan Program Penyelamatan Danau Maninjau. Pemicu terjadinya penurunan kualitas air di Danau Maninjau yakni jumlah Keramba Jaring Apung yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya peristiwa *Upwelling*/umbalan menyebabkan naiknya massa air yang mendorong zat organik, sisa pakan/amoniak naik ke atas permukaan air, hal ini dapat mendorong terjadinya kematian massal ikan di Danau Maninjau. Kendala yang dihadapi pada saat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh jumlah KJA aktif yang melampaui ambang batas di Danau Maninjau. Diperlukan upaya serius penyelamatan Danau Maninjau yang bekerja sama dengan instansi terkait dan mata pencaharian alternatif masyarakat selingkar Danau Maninjau terutama yang bekerja dengan memanfaatkan perairan Danau Maninjau.

Selain hal tersebut di atas, tidak tercapainya target Produksi perikanan budidaya tahun 2023 juga disebabkan karena banyaknya bantuan benih yang mengalami kematian saat pendistribusian ke daerah tujuan, jarak tempuh yang jauh antara daerah asal pengantaran benih dengan daerah tujuan bantuan merupakan faktor penyebab yang perlu diperhatikan ke depannya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan pembudidaya antara lain :

1. Peningkatan produksi ikan dengan melakukan pemberian bantuan benih ikan mas, benih ikan nila, benih ikan gurami, benih ikan lele, benih ikan kerapu beserta pakan ikan dan obat-obatan.
2. Pengembangan budidaya udang dengan melakukan pemberian bantuan benur udang vaname dan pakan.
3. Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya.

4. Pengembangan ikan kerapu pada kawasan sentra produksi dengan melakukan pelatihan teknis budidaya kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan.
5. Sosialisasi Perizinan terhadap pembudidaya ikan terutama kepada pelaku usaha tambak udang untuk dapat melakukan pengurusan izin usaha dan tanda daftar usaha.
6. Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik sehingga Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) bisa diterapkan di Provinsi Sumatera Barat untuk menekan biaya pakan.
7. Diskusi dan koordinasi antara petugas BBI se-Sumatera Barat untuk meningkatkan kompetensi petugas BBI melalui Forum Pengelolaan BBI Se-Sumatera Barat
8. Pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, temu tekins hama dan penyakit ikan.
9. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat.
10. Membantu pemasaran hasil budidaya dengan informasi pasar yang luas

Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan persentase peningkatan produksi budidaya adalah :

1. Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.
2. Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan.
3. Ketersediaan benih dan induk unggul terbatas.
4. Pemasaran yang sifatnya masih local dan regional membuat pembudidaya kurang berkembang.
5. Masih rendahnya SDM Pembudidaya ikan

Upaya ke depan yang akan dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi hambatan pencapaian sasaran strategis peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain:

1. Menekan Biaya pakan dengan upaya melakukan Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik sehingga Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) yang bisa diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dan membangun Pabrik Pakan di Sumatera Barat agar biaya produksi lebih kecil.
2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, baik itu dalam penyediaan benih melalui UPR-UPR yang ada di Kabupaten/Kota, maupun dalam membantu ketersediaan pakan, sebagai catatan, di Kabupaten Pasaman telah terdapat pabrik pakan.
3. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Perikanan yang membidangi perikanan di Kab/Kota, yang memiliki kewenangan terhadap kelompok pembudidaya serta langkah langkah yang ditempuh untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya beserta kendala yang dihadapi.
4. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan UPTD BPBALP dan UPTD KPSDKP.
5. Membentuk forum Pembudidaya ikan kabupaten/kota
6. Melakukan pengujian kualitas air secara berkala dan menganalisa trend ketidaksesuaian kualitas air
7. Memberikan bantuan obat-obatan untuk menanggulangi hama dan penyakit ikan.
8. Meningkatkan kompetensi Petugas Pembina budidaya di Kabupaten/Kota.
9. Meningkatkan koordinasi dengan balai benih ikan nasional untuk penyediaan induk unggul.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.27. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Keterbatasan anggaran daerah	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan budidaya adalah sebesar Rp.11.992.215.032,- dan terealisasi Rp.11.640.707.917,- (97,07%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran dengan uraian tabel di bawah ini :

Tabel 3.28 Program/Kegiatan dan Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
Persentase Peningkatan Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.992.215.032	11.640.707.917	97,07	99,85	351.507.115
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	41.725.600	41.222.400	98,79	100	503.200
1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	41.725.600	41.222.400	98,79	100	503.200
2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	11.950.489.432	11.599.485.517	97,06	99,85	351.003.915
2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD - UPTD BPBALP]	488.248.600	482.316.600	98,79	100	5.932.000
2.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.144.332.400	1.143.353.225	99,91	100	979.175
2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD - UPTD BPBALP]	1.224.901.750	1.220.664.150	99,65	100	4.237.600
2.4	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.796.963.629	7.470.838.725	95,82	99,77	326.124.904
2.5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat	568.346.000	559.084.717	98,37	100	9.261.283

	atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD - UPTD KPSDKP]					
2.6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	227.208.853	227.081.400	99,94	100	127.453
2.7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	171.267.700	170.207.100	99,38	100	1.060.600
2.8	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi [UPTD - UPTD BPBALP]	329.220.500	325.939.600	99,00	100	3.280.900

Manfaat yang dilihat dari pencapaian sasaran 2 (dua) ini adalah Meningkatnya produksi perikanan budidaya untuk peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pembudidaya.

Tabel 3.29 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39	2,052	60,53	11.992.215.032	11.640.707.917	97,07

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 3.30 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	60,53 %	97,07%	-60%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(11.992.215.032 \times 60,53\%) - 11.640.707.917}{(11.992.215.032 \times 60,53\%)} \times 100\% \\ &= -60\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah -60% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Nilai minus disini berarti inefisiensi. Maka inefisiensi adalah tidak maksimalnya pemanfaatan yang diberikan bila dibandingkan dengan ketersediaan SDM, anggaran dan sarana prasarana, tidak ada peningkatan atau rendahnya nilai. Fungsi lainnya adalah kemampuannya untuk menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan rendah.

Sasaran 3 | Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran)

Pemasaran produk perikanan dapat menjadi penghela bagi pengembangan sub sistem produksi baik dari hulu sampai hilir. Peningkatan pemasaran akan mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi di sisi hulu maupun peningkatan produksi pengolahan di sisi hilir yang pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja sektor perikanan yang cukup besar. Sebagai penyedia lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Sasaran 3 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan dengan indikator kinerja yaitu Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan target 156,85 Milyar

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya pemasaran produk perikanan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.311 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	156,85	291	185,53	Sangat Tinggi



Grafik 3.8 Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 3 pada tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa semua capaian indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi 291 Milyar dengan capaian 185,53%. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan, sehingga harga ikan sangat mahal.

Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly perishable).

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan berperan dalam pengembangan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta jangkauan pemasaran produk hasil perikanan dalam rangka menjaga stabilitas produksi

serta ketahanan pangan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan, sasaran ke 3 yang akan diwujudkan yaitu Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran 3 ini jika dibandingkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.30 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021 – 2023

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	153,76	230,62	149,99	155,30	272,35	175,37	156,85	291	185,53

*angka sementara Sumber : DKP,2023

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja dari Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah melebihi target yaitu di atas 100% yaitu capaian tahun 2023 sebesar 185,53%, capaian tahun 2022 sebesar 175.37% dan capaian tahun 2021 sebesar 149,99%. Target indikator kinerja sasaran 3 ini sudah tercapai dan termasuk kategori Sangat Tinggi.

Nilai ekspor hasil perikanan dari tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.9 Perbandingan Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.31 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2023 terhadap 2026
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	291	161.60	180

Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) pada tahun 2023 sebesar 291 milyar telah mencapai 180% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 161,60 milyar. Capaian ini Sangat Tinggi. Nilai ekspor hasil perikanan diambil dari jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin maupun olahan. Jenis komoditi yang dominan untuk di ekspor yaitu tuna, frozen tuna, lobster, layur segar, tenggiri dan lain-lain.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023*	Ket (+/-)
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	291	258,82	+

*angka sementara Sumber : Pusdatin, KKP 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (milyar) sebesar 291 (milyar) dengan tingkat capaian 185,53% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat seperti mempromasikan hasil – hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat, memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan kepada masyarakat antara lain:

1. Penyerahan Bantuan Fish Box



2. Penyerahan Bantuan SPG Roda 3



3. Dilaksanakannya pertemuan petugas informasi pasar



4. Penghitungan Angka Konsumsi Ikan



Adapun ***hambatan*** yang ditemui dalam meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan yaitu:

1. Belum terpenuhinya kuota produk yang akan diekspor.
2. Keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal
3. Masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standard
4. Pemberlakuan standar oleh masing-masing negara tidak sejalan dengan yang diterapkan di beberapa industri, sehingga hal ini kadang kala menyebabkan terjadinya penolakan produk perikanan Indonesia di negara importir.

Beberapa ***upaya ke depan*** yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan nilai ekspor hasil perikanan antara lain :

1. Standarisasi dan sosialisasi produk ekspor hasil perikanan
2. Peningkatan sarana pemasaran ikan
3. Peningkatan investasi dan memfasilitasi akses permodalan untuk pelaku usaha
4. Peningkatan promosi dan pemasaran produk dengan mengikuti pameran
5. Perbaikan mekanisme pemberian izin
6. Pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan.
7. Menerapkan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam penentuan strategi peningkatan ekspor

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Nilai Ekspor Hasil Perikanan* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.33. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program	Mendorong investor melakukan investasi terhadap pelaku usaha perikanan
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemasaran produk perikanan adalah sebesar Rp.5.203.673.774,- dan terealisasi Rp.5.158.425.711,- (99,13%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar dengan uraian tabel di bawah ini:

Tabel 3.34 Program/Kegiatan dan Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13	100	45.248.063
1	Kegiatan Penerbitan Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800	988.452.180	99,40	100	5.999.620
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800	988.452.180	99,40	100	5.999.620
2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.621.702.260	1.613.931.614	99,52	100	7.770.646
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	323.815.000	323.132.094	99,79	100	682.906
2.2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar [UPTD - UPTD PPMHP]	166.368.700	165.921.100	99,73	100	447.600
2.3	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	641.493.560	638.683.724	99,56	100	2.809.836
2.4	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing [UPTD - UPTD PPMHP]	490.025.000	486.194.696	99,22	100	3.830.304
3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714	2.556.041.917	98,78	100,00	31.477.797
3.1	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714	2.556.041.917	98,78	100	31.477.797

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 3 (tiga) ini adalah Meningkatnya pemasaran produk perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pengolah.

Tabel 3.35 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	156,85	291	185,53	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13

Sumber : DKP,2023

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 3.36 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	185,53 %	99,13%	99%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(5.203.673.774 \times 185,53\%) - 5.158.425.711}{(5.203.673.774 \times 185,53\%)} \times 100\% = 99\%$$

Dari rumusan di atas diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja meningkatnya pemasaran produk perikanan dengan capaian indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (Milyar) sebesar 185,53% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,13% telah mengefisieni penggunaan sumberdaya sebesar 99% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Data nilai ekspor hasil perikanan tahun 2023 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Sasaran 4	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan
------------------	---

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan dan kedua sebagai penyanggah (buffer) bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produk perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan.

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran)

Pemasaran produk perikanan dapat menjadi penghela bagi pengembangan sub sistem produksi baik dari hulu sampai hilir. Peningkatan pemasaran akan mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi di sisi hulu maupun peningkatan produksi pengolahan di sisi hilir yang pada

akhirnya mampu menyerap tenaga kerja sektor perikanan yang cukup besar. Sebagai penyedia lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah perikanan.

Sasaran 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021 – 2026 yaitu “ Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan target 7,26 %

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi olahan perikanan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

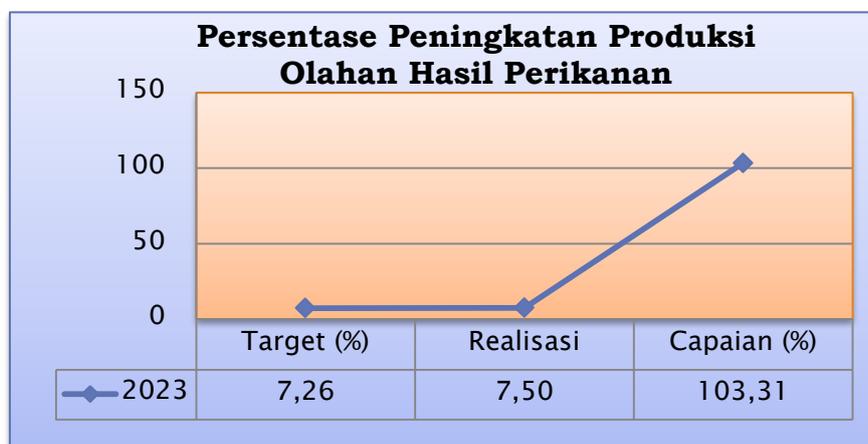
Data produksi olahan hasil perikanan tahun 2023 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.37 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Cara Penghitungan
1.	Persentase peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26	7,5	103,30	<p>a. Target 7,26 %</p> <p>b. Realisasi Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2023 sebesar 10.785,09 ton sehingga persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sebesar :</p> $\frac{\text{Realisasi Thn 2023} - \text{Realisasi Thn 2022}}{\text{Realisasi Tahun 2021}} \times 100\%$ $= \frac{10.785,09 \text{ ton} - 10.032,64 \text{ ton}}{10.032,64 \text{ ton}} \times 100\%$ $= \frac{752,47}{10.032,64} \times 100\% = 7,5 \%$ <p>c. Maka persentase Capaian yaitu :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ </div> $= \frac{7,5}{7,26} \times 100 = 103,30 \%$

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 target dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan dengan target sebesar 7,26% dan terealisasi sebesar 7,5% dengan tingkat capaian sebesar 103,30% termasuk kategori Sangat Tinggi. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik 3.10 di bawah ini:



Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan merupakan penghitungan besarnya penghitungan produksi olahan hasil perikanan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu (sebelumnya) dikali 100%.

Dengan adanya kegiatan di atas capaian pada indikator kinerja Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan pada tahun 2023 sebesar 10.785,09 ton meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 10.032,64 ton. Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing – masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38 Jumlah Produksi Pengolahan Ikan Tahun 2022 -2023

No.	Kab/Kota	Produksi (ton)	
		2022	2023
01	Kab. Kep. Mentawai	66,31	71.283,30
02	Kab. Pesisir Selatan	903,48	971.241,00
03	Kab. Solok	59,80	64.285,00
04	Kab. Sijunjung	16,82	18.080,80
05	Kab. Tanah Datar	0,30	322,50
06	Kab. Padang Pariaman	184,24	198.058,60
07	Kab. Agam	639,45	687.408,80
08	Kab. Lima Puluh Kota	357,13	383.910,50
09	Kab. Pasaman	71,20	76.541,10
10	Kab. Solok Selatan	65,36	70.262,00
11	Kab. Dharmasraya	2,97	3.190,30
12	Kab. Pasaman Barat	7.131,70	7.666.577,50
13	Kota Padang	229,31	246.512,60
14	Kota Solok	23,34	25.089,90
15	Kota Sawahlunto	1,68	1.806,10
16	Kota Padang Panjang	0,30	326,80
17	Kota Bukittinggi	39,65	42.623,80
18	Kota Payakumbuh	11,12	11.954,60
19	Kota Pariaman	228,48	245.618,20
	TOTAL	10.032,64	10.785,09

*angka sementara Sumber : DKP,2023

Dari hasil produksi perikanan olahan hasil perikanan tahun 2023 dapat diperoleh persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sebesar 7,5 % dengan rumus produksi tahun 2023 dikurang produksi tahun sebelumnya (2022) dibagi dengan produksi 2022 dikalikan 100 yaitu $10.785,09 \text{ ton} - 10.032,64 \text{ ton} = 752,47 / 10.032,64 \times 100 = 7,5\%$. Data produksi olahan hasil perikanan dapat juga dilihat dari grafik di bawah ini :



Grafik 3.11 Produksi Olahan Hasil Perikanan 2022-2023

Dilihat dari grafik diatas adanya peningkatan dan penurunan produksi dari Kab/Kota, produksi yang tertinggi dari Kab. Pasaman Barat sebesar 7.666.577,50 ton dan Kab. Pesisir Selatan produksi olahan hasil perikanan sebesar 971.241,00 ton.

Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan, sehingga harga ikan sangat mahal.

Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly perishable).

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

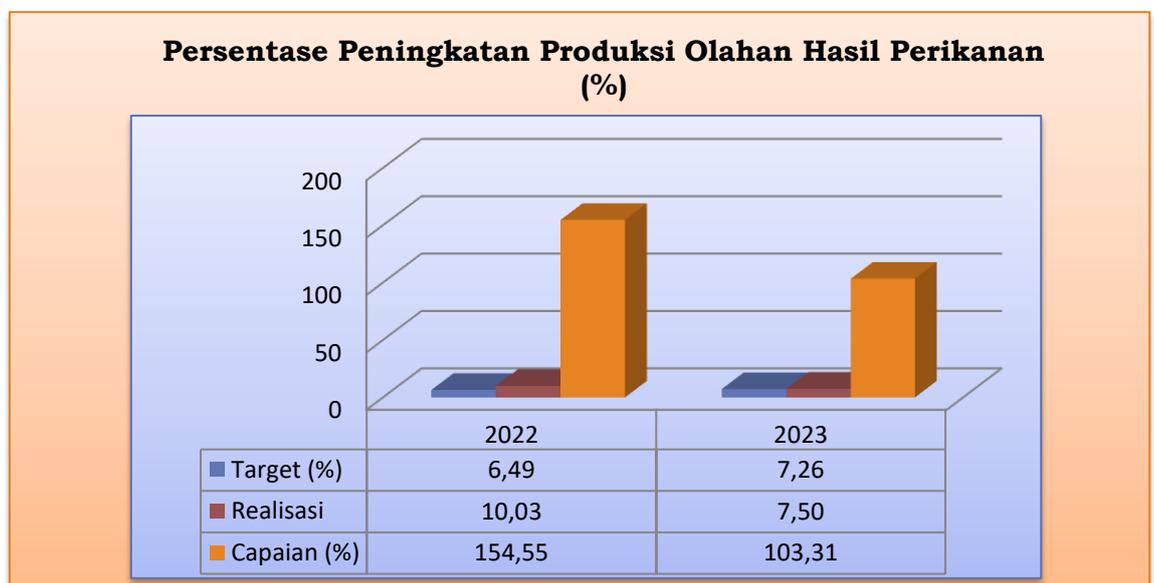
Capaian Indikator sasaran 4 ini jika dibandingkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.39 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Olahan Hasil Perikanan		10		6,49	10,03	154,55	7,26	7,5	103,30

Sumber : DKP,2023

Jika dilihat dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan perikanan, indikator kinerjanya meningkat, dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan untuk target dan realiasi tahun 2021 dan 2022 tidak bisa dibandingkan karena indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan baru ditetapkan.



Grafik 3.12 Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan 2022-2023

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.40 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi*	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2023 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,5	11	68,18

*angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan Tahun 2023 sebesar 7,5 % dengan capaian sebesar 68,18% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 11 %.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.41 Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Nasional Tahun 2023*	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,5	-	

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Untuk angka nasional, data belum di dapatkan karena masih dalam penghitungan.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sebesar 7,26 dengan tingkat capaian 103,30% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Mempromasikan hasil – hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat,
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan kepada masyarakat antara lain : Rehab UPI

3. Memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan dari Sumatera Barat dengan mengadakan lomba masak menu serba ikan, gemarikan dan lain-lain
4. Meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas
5. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi olahan hasil perikanan yaitu :

1. Rehabilitasi /Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI)



2. Melakukan pertemuan Diversifikasi dengan Kab/Kota



3. Pelatihan Pengolahan Ikan dengan pengolah di Kab/Kota



4. Peningkatan SDM petugas mutu hasil kelautan dan perikanan



5. Pelatihan penerapan GMP/SSOP dalam Sistem HACCP



6. Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan



7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan



8. Pengembangan Produk Perikanan Non Konsumsi



9. Kegiatan forikan



Faktor pendorong untuk peningkatan pengolahan yaitu dengan pembelian produksi olahan dari UPI dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemberian produksi olahan ikan pada kegiatan gemarikan.

Adapun ***hambatan*** yang ditemui dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan yaitu :

1. SDM pengolah kurang
2. Ragam menu dari ayam dan daging masih lebih dimintai oleh masyarakat.
3. Belum seluruhnya masyarakat mengkonsumsi ikan sesuai dengan standar yang seharusnya.
4. Masyarakat masih banyak menyukai komoditi lain untuk dikonsumsi.

Beberapa ***upaya ke depan*** yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan produksi olahan hasil perikanan antara lain :

1. Memanfaatkan potensi perikanan dan perkembangan teknologi, untuk menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas.
2. Diversifikasi produk olahan hasil perikanan
3. Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan
4. Peningkatan SDM pelaku usaha pengolahan hasil perikanan
5. Pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Peningkatan peran pemda dalam pengembangan produk dan pemasaran olahan hasil perikanan
7. Membangun kemitraan dengan pihak swasta yang difasilitasi pemerintah daerah.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan persentase produksi olahan hasil perikanan.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.42. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program	Mendorong investor melakukan investasi terhadap pelaku usaha perikanan
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemasaran produk perikanan adalah sebesar Rp.5.203.673.774,- dan terealisasi Rp.5.158.425.711,- (99,13%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar dengan uraian tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13	100	45.248.063
1	Kegiatan Penerbitan Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800	988.452.180	99,40	100	5.999.620
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800	988.452.180	99,40	100	5.999.620

2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.621.702.260	1.613.931.614	99,52	100	7.770.646
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	323.815.000	323.132.094	99,79	100	682.906
2.2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar [UPTD - UPTD PPMHP]	166.368.700	165.921.100	99,73	100	447.600
2.3	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	641.493.560	638.683.724	99,56	100	2.809.836
2.4	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing [UPTD - UPTD PPMHP]	490.025.000	486.194.696	99,22	100	3.830.304
3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714	2.556.041.917	98,78	100,00	31.477.797
3.1	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714	2.556.041.917	98,78	100	31.477.797

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 4 (empat) ini adalah Meningkatnya produksi olahan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengolah.

Tabel 3.43 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7,26	7,5	103,30	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 3.44 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Persentase peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	103,30 %	99,13%	4%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(5.203.673.774 \times 185,53\%) - 5.158.425.711}{(5.203.673.774 \times 185,53\%)} \times 100\% \\ &= 4\% \end{aligned}$$

Dari rumusan di atas diketahui bahwa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja meningkatnya produksi olahan perikanan dengan capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sebesar 103,30% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,13% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 4% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

2.	Tujuan 2	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan
-----------	-----------------	---

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km² , maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta Km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources), sumberdaya alam tidak dapat pulih (non-renewable resources), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

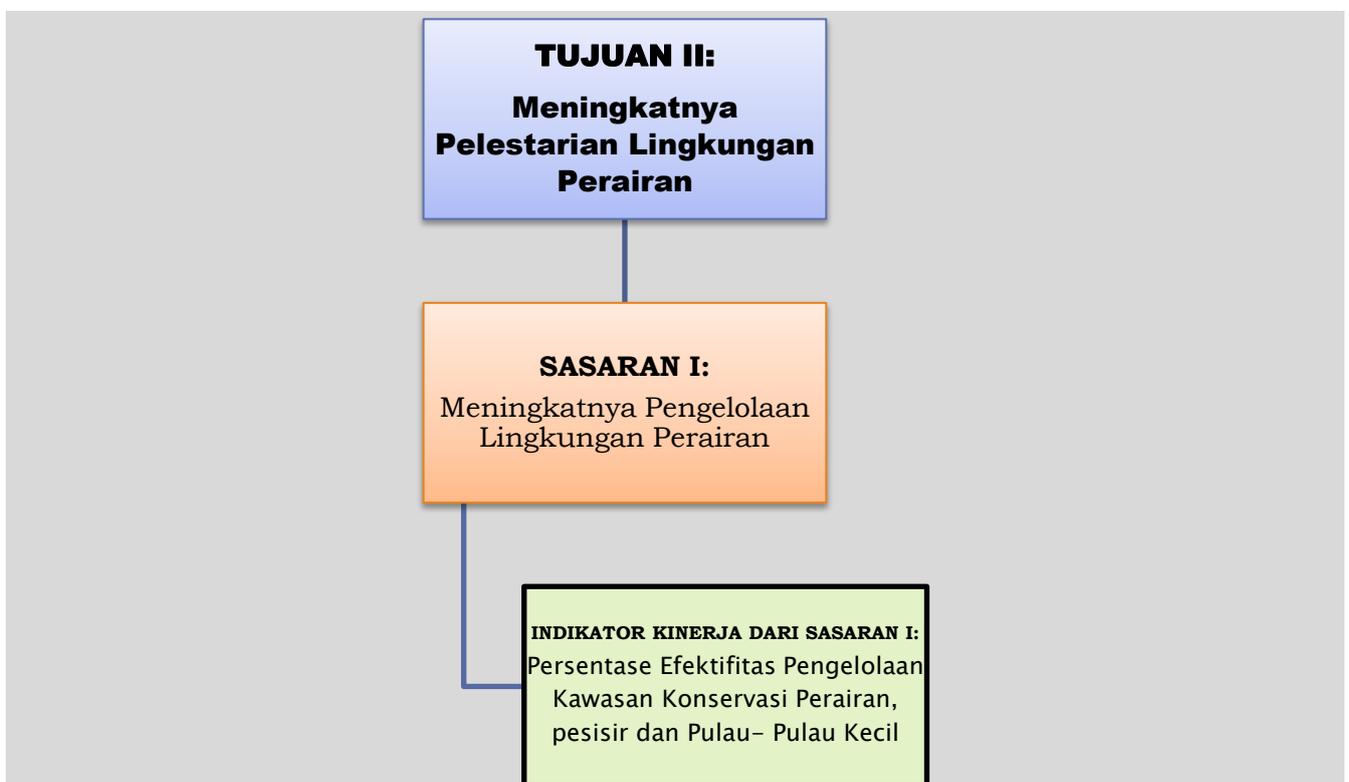
Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Salah satu perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dipandang efektif adalah melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan/atau laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan

berkelanjutan. Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khusus.

Tujuan Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan dengan indikator tujuan terdiri dari: Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Perairan

Tujuan Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.3. Tujuan II dan 1 Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan yang telah ditetapkan dengan 1 sasaran dan 1 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 1 sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan

Dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang optimal serta berkelanjutan, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir Sumatera Barat. Pengelolaan kawasan konservasi ini merupakan salah satu upaya strategis nasional sektor kelautan karena upaya ini mempunyai kaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya maupun aspek lingkungan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan dan/atau perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional. Kawasan Daerah dengan kriteria berada di Perairan Pesisir, diluar yang menjadi kewenangan Menteri.

Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 6 aspek utama, yaitu :

1. Pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan parapihak yang terlibat.
2. Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan
3. Alokasi sumberdaya (input), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan

4. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses)
5. Produk dan jasa (output) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan
6. Dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada BAB V. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah yang Berciri kepulauan . Pada Pasal 27 Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi : a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Melalui Pergub No. 109 tahun 2017 UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP ditunjuk sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) 7 (tujuh) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Perairan di wilayah Sumatera Barat. Dari tujuh kawasan, 6 (enam) kawasan sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan pada tahun 2023 ini, kawasan ke 7 ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 126 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam di Provinsi Sumatera Barat. Ke tujuh kawasan konservasi tersebut adalah Kawasan Konservasi Selat Bunga Laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pesisir Selatan, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Padang, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Pariaman, Kawasan Konservasi Batang Gasan di Perairan di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kawasan Konservasi di perairan di Wilayah Kabupaten Agam.

Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Sumatera Barat di kelola dengan sistem zonasi yang berpedoman kepada (Permen KP No.31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi) yang meliputi :

1. Zona Inti

Ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi.

Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi.

Zona inti mempunyai fungsi :

- a. perlindungan sumber daya genetik;
- b. habitat alami/penting bagi sumber daya ikan yang meliputi: daerah pemijahan, daerah asuhan dan daerah mencari makan.
- c. pelimpahan biota laut ke daerah penangkapan ikan;
- d. pemulihan biota dan habitat;
- e. perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan; dan/atau f. perlindungan cagar budaya.

2. Zona pemanfaatan terbatas

ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat di sekitar Kawasan Konservasi.

3. Zona lain sesuai peruntukan

Merupakan kawasan merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas seperti :zona rehabilitasi, zona bangunan dan instalasi laut, zona Pelabuhan/tambat labuh, zona jalur lalu lintas kapal, zona religi/situs budaya; dan/atau zona sesuai karakteristik kawasan.

Keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Perairan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi olahan perikanan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

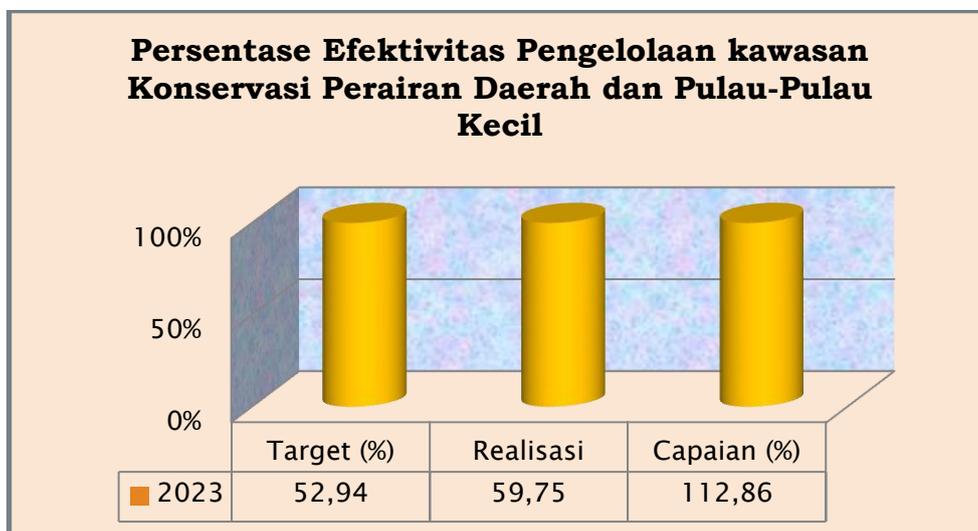
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.45 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1.	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	52,94	59,75	112,86

Sumber : DKP, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 target dari indikator kinerja persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target sebesar 52,94% dan terealisasi sebesar 59,75% dengan tingkat capaian sebesar 112,86% termasuk kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.13 Persentase Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Pulau-Pulau Kecil 2023

Penilaian Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dari tabel

NO	KAWASAN KONSERVASI DAERAH	NILAI EVIKA % 2022	STATUS PENGELOLAAN	NILAI EVIKA % 2023	STATUS PENGELOLAAN
1	SELAT BUNGA LAUT MENTAWAI	47,68	DIKELOLA MINIMUM	58,51	DIKELOLA OPTIMUM
2	PESISIR SELATAN	39,56	DIKELOLA MINIMUM	55,60	DIKELOLA OPTIMUM
3	PADANG	47,56	DIKELOLA MINIMUM	59,22	DIKELOLA OPTIMUM
4	PARIAMAN	61,52	DIKELOLA OPTIMUM	72,12	DIKELOLA OPTIMUM
5	BATANG GASAN PD. PARIAMAN	49,96	DIKELOLA MINIMUM	55,75	DIKELOLA OPTIMUM
6	PASAMAN BARAT	-	DIKELOLA MINIMUM	57,31	DIKELOLA OPTIMUM
	RATA-RATA	49,26		59,75	

Sumber : DKP, 2023

Proses penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prakondisi, proses penilaian, verifikasi hingga penyusunan resume penilaian dan rekomendasi, seperti tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 3.4 Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Proses penilaian dilakukan melalui sebuah forum diskusi terbuka. Diskusi ini dipimpin oleh fasilitator-fasilitator yang memahami tentang proses penilaian Efektivitas pengelolaan. Diskusi ini dihadiri pihak-pihak yang telah diidentifikasi pada tahap prakondisi dan diundang oleh pengelola kawasan.

Dokumentasi



Dengan adanya kegiatan di atas, capaian pada indikator kinerja Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil penilaiannya diperoleh dari 6 kawasan konservasi daerah yaitu Selat Bunga Laut, KKD Pesisir Selatan, KKD Padang, KKD Pariaman dan KKD Batang Gasang Padang Pariaman dan KKD Pasaman Barat. Capaian kinerja ini meningkat dengan kategori Sangat Tinggi.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2023 telah memiliki tujuh Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan diantaranya terdapat satu kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2018, empat Kawasan

Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2021 dan satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023.

Ada tujuh kawasan konservasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Organisasi Pengelola UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP), yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	No. SK	Luas Kawasan (Ha)	Target Konservasi
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	Kepmen KP No. 22 Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018	129.566,00	Mangrove, Terumbu Karang, Ikan Balong Padang, Napoleon
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 104 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	175.583,56	Terumbu Karang dan Penyu
3.	Kota Padang	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 105 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	2.188,70	Terumbu Karang
4.	Kota Pariaman	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 106 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	11.778,22	Terumbu Karang dan Penyu
5.	Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 107 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	735,93	Terumbu Karang dan Penyu
6.	Kabupaten Pasaman Barat	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 2 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022	6.122,14	Terumbu Karang
7.	Agam	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 126 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023	6.535,98	
Jumlah ditetapkan				332.510,53	

Sumber : DKP, 2023

Pada setiap Kawasan Konservasi yang pengelolaannya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka akan dilakukan Verifikasi dan Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tersebut

Pada tahun 2022 terdapat lima Kawasan Konservasi yang dilakukan penilaian efektifitas pengelolaannya melalui verifikasi dan evaluasi oleh tim penilai, Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Perwakilan dari Setiap Pengelola Kawasan Konservasi. Berdasarkan Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 mendapatkan Rata-rata Persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 yaitu 49,26% dari lima kawasan konservasi yang telah ditetapkan dengan status pengelolaan satu kawasan **dikelola Optimum** dan Tiga Kawasan **dikelola Minimum**.

Pada tahun 2023 terdapat enam Kawasan Konservasi yang dilakukan Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, Teknis penilaian EVIKA tahun 2023 ini sama seperti tahun sebelumnya namun terdapat penambahan satu kawasan konservasi yaitu KKPD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2023, Enam Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sudah **Dikelola Optimum** dengan Rata-rata persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2023 yaitu **59,75%** meningkat dari tahun 2022.

Adapun sarana dan prasarana pada 6 kawasan konservasi daerah di Sumatera Barat serta 2 Konservasi Jenis yaitu :



1. KKD SELAT BUNGA LAUT KAB.KEPULAUAN MENTAWAI



2. INSTALASI KKD PESIR SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



3. INSTALASI KKD KOTA PADANG



4. INSTALASI KKD KOTA PARIAMAN



5. INSTALASI KKD BATANG GASAN



6. INSTALASI KKD PASAMAN BARAT



7. INST. KONSERVASI JENIS IKAN SUNGAI DI SICINCIN



8. INSTALASI KONSEVASI DANAU SINGKARAK

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan ini jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.46 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Perairan Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	37,24	-	47,06	49,26	104,67	52,94	59,75	103,30

Jika dilihat dari indikator kinerja persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2023 indikator kinerjanya meningkat, dengan kategori Sangat Tinggi.



Grafik 3.14 Persentase Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan Daerah dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021 – 2023

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.47 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2023 terhadap 2026
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	52,94	70.59	75

Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2023 sebesar 52,94 telah mencapai 75% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 70,59%. Capaian ini dengan kriteria Sangat Tinggi.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.48 Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023	Ket (+/-)
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	52,94	77,21	+

Sumber : BA Pleno Hasil Evika Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar 52,94% dengan tingkat capaian 112,86% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Penanaman mangrove sebanyak 8.500 batang di Kab. Pasaman Barat



Dalam melakukan penanaman mangrove maka hasil yang diperoleh kawasan pesisir menjadi lebih hijau dan terlindungi. Dan dampaknya mengurangi resiko seperti intrusi air laut, bencana abrasi dan tsunami dan bertambahnya luasan kawasan pesisir yang direhabilitasi

2. Monitoring mangrove di KKPD Selat Bunga Laut



3. Monitoring terumbu karang



4. Penanaman pohon pelindung pantai sebanyak 875 batang



Dalam melakukan penanaman pohon pelindung pantai maka hasil yang diperoleh meningkatnya perlindungan kawasan pesisir melalui penanaman pohon pelindung pantai dan wilayah pesisir menjadi teduh dan asri serta terlindungi dari bencana, seperti badai, angin kencang dan intrusi air laut.

5. Pengawasan di perairan laut dan perairan umum



6. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota.
7. Melakukan monitoring biofisik perairan pesisir dimana manfaat dari kegiatan monitoring biofisik tersedianya data biofisik diperairan Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan

seputar pengelolaan kawasan dilingkungan perairan kawasan konservasi dan terpantaunya kondisi biofisik diperairan

Faktor pendorong untuk mencapai persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu:

1. Telah dilakukan penilaian Evika di 6 kawasan
2. Penetapan 1 kawasan konservasi daerah di Kab. Agam
2. Dilakukan data series biofisik di 4 kawasan (Kawasan Selat Bunga Laut Mentawai, KKPD Pesisir Selatan, KKPD Padang dan KKPD Kota Pariaman
3. Dilakukan pengambilan data kawasan yang berdampak kepada sosial ekonomi kepada masyarakat disekitar 3 kawasan yaitu Padang Pariaman, Ko. Pariaman dan Selat Bunga Laut.
4. Dilakukan pengawasan di 4 kawasan yaitu Selat Bunga Laut, Ko. Padang, Padang Pariaman dan Ko. Pariaman
5. Dilakukan rehabilitasi atau transplantasi terumbu karang di 2 kawasan yaitu KKPD Pesisir Selatan dan Pasaman Barat.
6. Dilakukan aktivitas monitoring penyu dan terumbu karang di 6 kawasan

Adapun ***hambatan*** yang ditemui dalam upaya mencapai persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

1. Kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum clear and clean, belum selesainya proses penataan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal.
2. Kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.
3. Adanya kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan; kurangnya sumberdaya yang tersedia; ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki; serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan.

4. Belum semua KKPD memiliki sarana dan prasarana yang lengkap tidak layak dan tdk tercukupi, bahkan untuk KKPD Mentawai belum memiliki gedung dan bangunan tetap.
5. Belum semua SDM di KKPD memiliki kompetensi yang dibutuhkan. SDM trampil konservasi dan SDM Pengawasan masih kurang.
6. Masih banyaknya nelayan lokal dan nelayan luar belum mengetahui kawasan konservasi dan aturan pengelolaan kawasan konservasi.
7. Masih banyaknya ditemukan pelanggaran illegal fishing yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem pada Kawasan.
8. Masih maraknya perdagangan telur penyu secara tersembunyi.
9. Sosial ekonomi masyarakat belum semua yang dinilai.
10. Belum semua KKPD memiliki data-data monitoring biofisik.

Beberapa **upaya tindak lanjut ke depan** yang dapat dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

1. Pendanaan/anggaran berkelanjutan yang bersumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Government Organization (NGO) yang berfokus pada program pelestarian lingkungan khususnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
2. Menjalinkan kemitraan melalui pengelolaan bersama (comanagement) yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat lokal, LSM/NGO, dan sektor swasta.
3. Peningkatan dan penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan untuk kesadaran menjaga sumber daya, pengawasan bersama, dan pelestarian kearifan lokal/budaya yang berhubungan dengan laut.
4. Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan jasa ekosistem laut antara lain: kegiatan wisata laut, rekreasi, budidaya laut, pembangunan resort/cottage, pembangunan fasilitas pendukung wisata (jeti/dermaga). Selanjutnya digunakan untuk mendukung operasional dan pemulihan serta pelestarian sumberdaya kawasan konservasi.

5. Pemulihan dan perbaikan habitat ikan untuk peningkatan populasi ikan melalui proses rantai makanan yang tetap sehat dan terjaga serta tempat pemijahan ikan
6. Perlindungan pesisir dengan mengurangi dampak badai dan abrasi.
7. Mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak habitat ikan akibat aktivitas manusia dan pembangunan.
8. Membuat rencana pengelolaan zonasi pada kawasan yang telah ditetapkan (RPZ)
9. Menambah sdm dan memberikan peningkatan sdm dengan memberikan bimbingan teknis sertifikasi kompetensi keahlian berupa keahlian kompetensi terumbu karang, ikan karang, megamentos, mangrove, dan padang lamun
10. Meningkatkan sarana dan prasarana, koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Dirjen PRL dan PSDKP KKP RI tentang pembangunan dan rehabilitasi kawasan konservasi dan pengawasan SDKP yang telah ditetapkan melalui dana DAK dan Dekonsentrasi dari Kementerian.
11. Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab/Kota dalam penerapan Perda RZWP3K dengan RTRW.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil .
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.49. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Kebutuhan terhadap Pendanaan/anggaran berkelanjutan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan adalah sebesar Rp.14.383.371.358,- dan terealisasi Rp. 13.113.155.339,- (91,17%). Kegiatan ini didukung oleh dua program yaitu Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan anggaran Rp.8.663.526.401,- terealisasi sebesar Rp.7.733.534.924,- (89,27%) dan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran Rp.5.719.844.957,- terealisasi sebesar Rp.5.379.620.415,- (94,05%). Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar dengan uraian tabel di bawah ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan persisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	8.663.526.401	7.733.534.924	89,27	100	929.991.477
1	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	7.451.574.677	6.562.251.624	88,07	100	889.323.053
1.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	63.674.000	47.288.000	100,00	100	16.386.000
1.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat [UPTD - UPTD KPSDKP]	6.656.909.177	5.798.279.874	100,00	100	858.629.303
1.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	442.558.000	428.873.000	96,91	100	13.685.000
1.4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	288.433.500	287.810.750	99,78	100	622.750
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.211.951.724	1.171.283.300	96,64	100	40.668.424
2.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.001.285.024	977.407.650	97,62	100	23.877.374
2.2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	107.418.000	102.555.650	95,47	100	4.862.350
2.3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	103.248.700	91.320.000	88,45	100	11.928.700
Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan persisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.719.844.957	5.379.620.415	94,05	100	340.224.542
1	Kegiatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	5.563.584.707	5.227.064.611	93,95	100	336.520.096
1.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	63.284.000	56.398.350	89,12	100	6.885.650
1.2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil [UPTD - UPTD KPSDKP]	519.759.001	469.977.251	90,42	100	49.781.750
1.3	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	4.607.761.606	4.368.820.250	94,81	100	238.941.356
1.4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	372.780.100	331.868.760	89,03	100	40.911.340

2	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	156.260.250	152.555.804	97,63	100	3.704.446
2.1	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	156.260.250	152.555.804	97,63	100	3.704.446
	Total	14.383.371.358	13.113.155.339	91,17	100,00	1.270.216.019

Sumber ; DPPA DKP, 2023

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan dengan indikator kinerja persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 3.50 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	52,94	59,75%	112,86	14.383.371.358	13.113.155.339	91,17

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 2 program yaitu Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 3.51 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	112,86 %	91,17%	19%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(14.383.371.358 \times 112,86\%) - 13.113.155.339}{(14.383.371.358 \times 112,86\%)} \times 100\% \\ &= 19\% \end{aligned}$$

Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan dengan capaian indikator kinerja Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar 112,86% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 91,17% telah mengefisieni penggunaan sumberdaya sebesar 19 % dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

3.	Tujuan 3	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani
-----------	-----------------	--

Tujuan “ Meningkatkan Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani” dicapai dengan menetapkan dua indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Dari tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani maka ditetapkan juga dua sasaran strategis yaitu 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi .Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar 3.5 ini



Gambar 3.5 Tujuan III dan 2 Sasaran Strategis

Tujuan “ Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun.

Pada dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan yang tertuang adalah Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Target untuk mengukur indikator tujuan sama dengan indikator sasaran yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 3.52

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				2023	2023	2023
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,15)	A (80,22)	100,09
	2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82,50	86,65	105,03

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran strategis 6 dan 7 pada tahun 2023 berhasil dicapai. Dimana capaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 80,22 dengan capaian 100,09% dan capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 86,65 dengan capaian 105,03% dengan kategori Sangat Tinggi.

Sasaran 6

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Organisasi dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi merupakan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam sasaran strategis. Hal ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Sasaran ini didukung dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Harapannya, OPD mampu fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*)

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 diukur dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.53 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A (80,15)	A (80,22)	100,09	Sangat Tinggi

Di lihat dari tabel di atas bahwa capaian indikator kinerja yaitu nilai AKIP sudah tercapai 100,09% dengan kategori Sangat Tinggi.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 diperoleh dari komponen sebagai berikut :

Tabel 3.54 Capaian Komponen Pembentuk

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Hasil Evaluasi	
	30%	25 %	15%	10 %	20 %	Nilai	Kategori
2019	25,77	15,76	12,41	6,35	13,38	73,67	B
2020	26,52	18,78	15,88	6,35	13,56	81,09	A
2021	26,58	21,81	13,48	6,88	12,47	81,21	A
2022	26,68	19,17	10,97	6,19	17,06	80,06	A
Pada Tahun 2023, Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu :							
Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Hasil Evaluasi		
	30%	30%	15%	25%	Nilai	Kategori	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Hasil Evaluasi	
					Nilai	Kategori
	30%	30%	15%	25%		
2023	27,36	20,40	12,59	19,88	80,22	A

Sumber : DKP

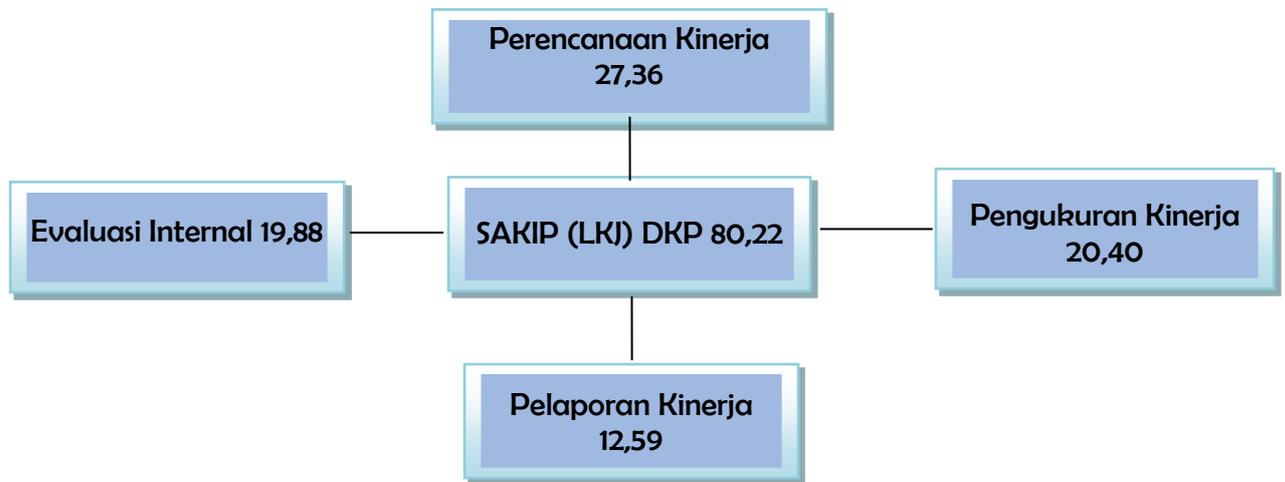
Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP. Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 4 komponen :

1. Komponen pertama adalah : perencanaan kinerja yang terdiri dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.
2. Komponen kedua adalah : pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.
3. Komponen ketiga adalah : pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.
4. Komponen ke empat adalah : evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi

Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 nilai A (80,15%) berdasarkan hasil penilaian Tim Inspektorat nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi sebesar 80,22% dengan capaian sebesar 100,09% (Sangat Tinggi).

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja masih perlu peningkatan nilai akuntabilitas kinerja khususnya terkait pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 ditargetkan A (80,15%). Penilaian AKIP ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat hal ini dapat dilihat dari uraian di bawah ini :



Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tersebut, setiap tahun dilakukan oleh Tim Inspektorat.

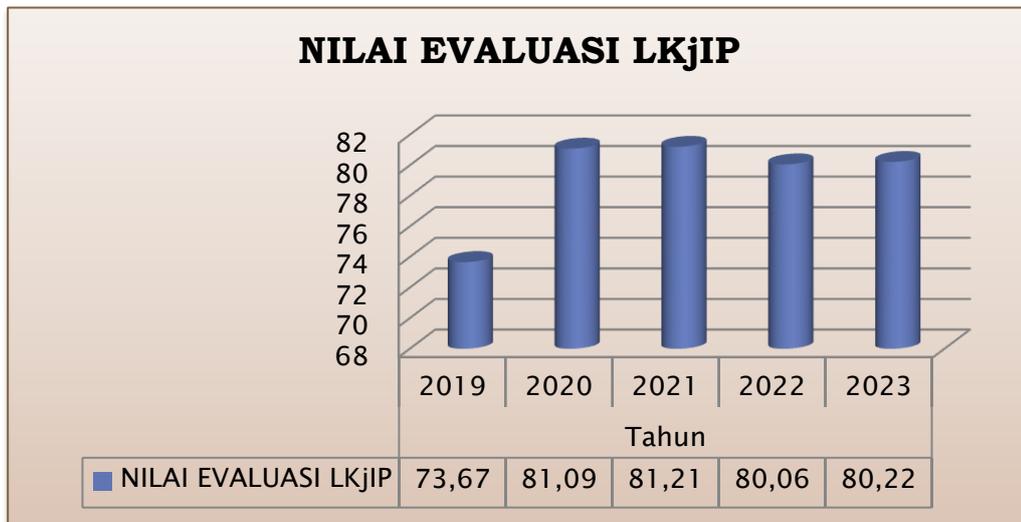
Hal ini juga dapat dilihat dari Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2019, target kinerja predikat BB (72,00) dan realisasinya predikat BB (73,67) dengan capaian 102,32%.
- Tahun 2020, target kinerja predikat A (80,01) dan realisasinya predikat A (81,09) dengan capaian 101,36%.
- Tahun 2021, target kinerja predikat A (80,10) dan realisasinya predikat A (81,21) dengan capaian 101,39%.
- Tahun 2022, target kinerja predikat A (80,12) dan realisasinya predikat A (80,06) dengan capaian 99,93%
- Tahun 2023, target kinerja predikat A (80,15) dan realisasinya predikat A (80,22) dengan capaian 100,09%

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.15 Nilai Evaluasi LKjIP

Tabel.3.55 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A 80,10	A 80,12	A 80,15	A 81,21	A 80,06	A 80,22	101,39	99,93	100,09

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.56 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2023 terhadap 2026
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,22	80,20	100,02

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 sebesar 80,22 telah mencapai 100,02% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80,20. Capaian ini dengan kriteria Sangat Tinggi.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.57 Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nasional)

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023	Ket (+/-)
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,22	80,88	+

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar 80,22% dengan tingkat capaian 100,02% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, terutama Pimpinan Unit Kerja.
2. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang sesuai dengan cascading.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi
4. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
5. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
7. Sumber daya Manusia yang kompeten dan professional
8. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan penjabaran tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan
9. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi dan transparan, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa, keuangan, pengelolaan aset dan pengelolaan barang inventaris
10. Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
11. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
12. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kerjanya kurang baik

Adapun ***hambatan***/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

1. Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
2. Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
3. Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Rencana tindak lanjut dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah :

1. Memperkuat komitmen para pimpinan unit kerja.
2. Perbaiki renstra (penyempurnaan indikator program dan kegiatan) dan cascading beserta crosscutting.
3. Sosialisasi dan pembinaan tentang penerapan sakip pada unit kerja.
4. FGD dalam rangka penentuan indikator kinerja, target kinerja, monitoring kinerja dan evaluasi kinerja internal baik pada tataran eselon II sd staf
5. FGD dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan kinerja dengan anggaran.
6. Membangun aplikasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Membangun sistem monitoring anggaran untuk efisiensi dan refocussing anggaran.
8. Evaluasi upaya pencapaian kinerja secara berjenjang per triwulan.
9. Monitoring dan evaluasi kinerja asn per triwulan.
10. Penyusunan rencana aksi eselon II hingga pejabat pelaksana/staf.
11. Melaksanakan perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi tim evaluasi SAKIP.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Nilai akuntabilitas kinerja OPD* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja OPD.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.58. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih dibutuhkannya penambahan anggaran	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Keberhasilan capaian indikator Sasaran 6 ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaian realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran diantaranya dukungan alokasi dana APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 466.601.342,- terealisasi sebesar Rp. 453.623.222,- (97,22%). Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran 6 sebagai tabel berikut :

Tabel. 3.59 Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 6

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.601.342	453.623.222	97,22	100	12.978.120
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.601.342	164.941.910	97,83	100	3.659.432
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	298.000.000	288.681.312	96,87	100	9.318.688

Persentase Realisasi Anggaran IK 6 (*Input*) : 97,22%
 Persentase Capaian IK 6 (*Output*) : 100,09 %
 Efisiensi IK : 3%

Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 6 merupakan sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah, sisa kontrak dan lain-lain. Berhasilnya capaian kinerja tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta berkat dukungan 2 (dua) sub kegiatan utama yang ke 6 (enam) targetnya terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan dapat terealisasi 100%.

Tabel 3.60 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,15	80,22	100,09	466.601.342	453.623.222	97,22

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 3.61 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,09 %	97,22%	3%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(466.601.342 \times 100,09\%) - 453.623.222}{(466.601.342 \times 100,09\%)} \times 100\% \\ &= 3\% \end{aligned}$$

Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan capaian indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja sebesar 100,09% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,22% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 3% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Sasaran 7	Meningkatnya Kepuasan terhadap pelayanan organisasi
------------------	--

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi” terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.62 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
			2023	2023	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	82,50	86,65	105,03

Sumber : DKP,2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi” adalah sebesar 105,03% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Untuk penentuan target Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2023 didasarkan kepada target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yakni:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	%	82	82	82.5	83	84	85

Pelaksanaan survey menggunakan kuisioner diisi menggunakan google form dengan link sebagai berikut: https://bit.ly/SKL_OPD_DKP2023, dimana kuisioner dibagikan ke Dinas Kab/Kota,UPTD, instansi terkait dan relasi.

/e/1FAIpQLSeb4ppMOMru4Ep3MHCs1dxL9mLBwUxAc_afmMCLYkD1SewENw/viewform

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Koto Tinggi No. 9 Padang Telp. 0751 - 841584

**KUESIONER PELAYANAN DKP PROVINSI
SUMBAR**

Yth. Bapak/Ibu
Sebelumnya terima kasih sudah bersedia mengisi kuisioner ini, kuisioner ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggapan Bapak/ibu terhadap ketersediaan pelayanan yang diberikan DKP meliputi : **Konsultasi,Evaluasi,Pemantauan dan Pendampingan di Lingkup OPD Provinsi Sumbar.**

Petunjuk Pengisian
1. Pilihlah salah satu jawaban dari masing-masing pertanyaan.
2. Kuisioner agar diisi sesuai pengalaman Bapak/Ibu atas pelayanan DKP.
3. Untuk Keterangan Skor :
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Kurang Baik
1 = Tidak Baik

rieka.soe@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Survey kepuasan masyarakat pada unit layanan dipilih berdasarkan instansi, UPTD, umur, jenis kelamin.

➤ **Pengolahan Data**

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (IKM) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam penghitungan IKM terdapat 11 unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{11}$$

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25–100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

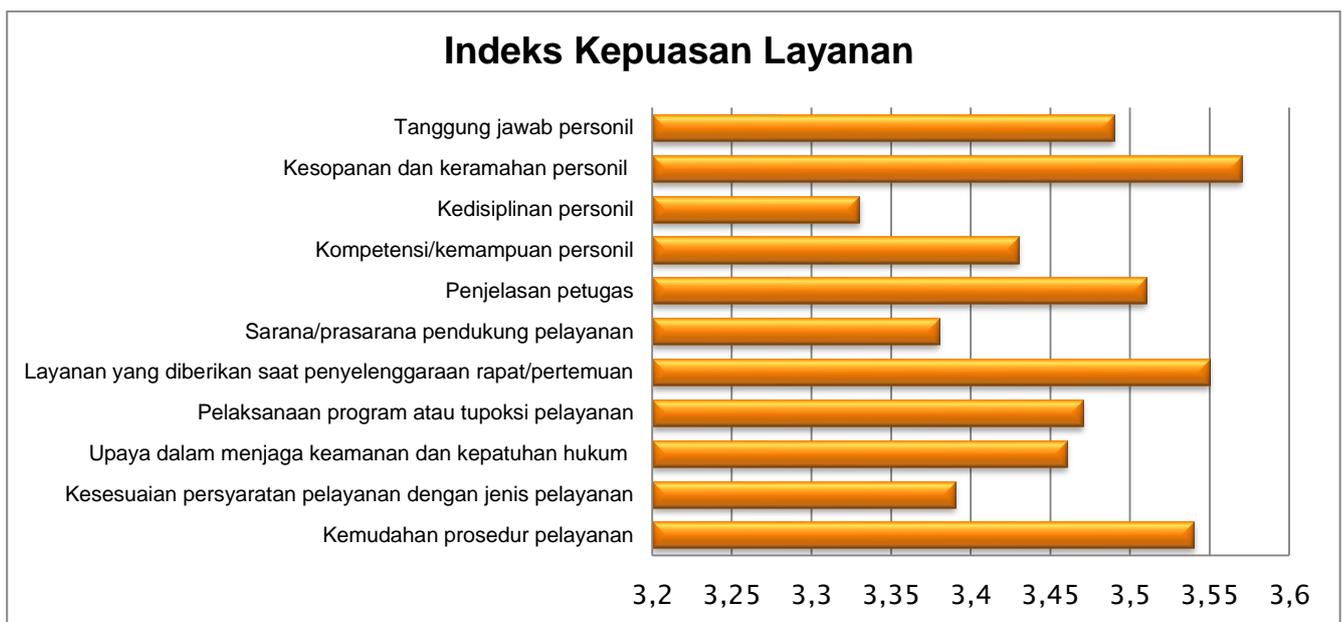
$$\text{Nilai IKM (sebelum konversi)} \times 25$$

Adapun nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang Digunakan untuk pengukuran Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Hasil penilaian pelayanan melalui kuisisioner dengan 11 unsur pelayanan kepada 102 responden dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.6 Unsur Indeks Kepuasan Layanan

Hasil dari penilaian pada 11 (Sebelas) unsur tersebut memiliki nilai 86,65 dimana nilai ini mencerminkan pelayanan tergolong **BAIK**. Tentunya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan upaya *Service Excelent* mampu meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Barat melalui kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat.

Berikut terlampir Kuisisioner Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden untuk Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

HASIL KUESIONER PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JENIS KELAMIN	UMUR ANDA	INSTANSI TEMPAT ANDA BEKERJA	PENDIDIKAN ANDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laki - Laki	31	BPPP Medan	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Perempuan	22	universitas riau	D4/S1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
3	Perempuan	54	TK Pertiwi Kota Solok	D2	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3	3
4	Laki - Laki	35 tahun	SDIT Iqra Kota solok	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
5	Perempuan	19 tahun	Universitas Negeri Padang	D4/S1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
6	Laki - Laki	55 th	Nelayan tangkap/Pembudi Daya Kerapu.	SMA/Sederajat	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
7	Perempuan	22	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Perempuan	22	Pt deka	D4/S1	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4
9	Perempuan	22 tahun	Universitas Muhammadiyah Riau	D4/S1	3	4, 3	3	3	4	4	3	3	2	4	3
10	Laki - Laki	49	Pembudidaya Kerapu dan Bawal Bintang	SMP/Sederajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Laki - Laki	23	Kampus politeknik ahli usaha perikanan	D4/S1	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3
12	Perempuan	21	Mahasiswa	D4/S1	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
13	Perempuan	20	Unisbar	D4/S1	4	3	2	2	2	2	3	4	3	4	4
14	Laki - Laki	40	UPT KKP	S2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
15	Laki - Laki	43 th	Polri satpolair pd pariaman	SMA/Sederajat	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Laki - Laki	43	DS3 INDONESIA	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
17	Laki - Laki	23 tahun	Kompak raja samudra	SMA/Sederajat	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
18	Laki - Laki	55 th	Universitas bung hatta	S3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
19	Laki - Laki	39	BPSPL Padang	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	Laki - Laki	39	Rajasamudra	D4/S1	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3
21	Laki - Laki	43	Wiraswasta	SMA/Sederajat	4	3	3	3	4	2	4	4	2	4	4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

22	Laki - Laki	42 tahun	Kantor wali nagari limau gadang lumpo	SMA/Sederajat	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3
23	Laki - Laki	36	BPSPL Padang	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Perempuan	51	Dinas perikanan dan pangan Kabupaten Pesisir Selatan	D4/S1	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
25	Perempuan	37 thn	SDIT IQRA Kota Solok	D4/S1	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4
26	Perempuan	29	Yayasan safa marwa	D4/S1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
27	Perempuan	24 Tahun	SDIT Iqra' Kota Solok	D4/S1	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3
28	Perempuan	25	SDIT IQRA' Solok	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	Laki - Laki	28	Pokmaswas hulu sinamar	D4/S1	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4
30	Laki - Laki	33	Tiram kab, Padang Pariaman RS	Lainnya	3	1	4	4	4	4	3	2	3	4	4
31	Laki - Laki	60 tahun	Universitas bung Hatta	S3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4
32	Laki - Laki	40	Swasta	D4/S1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	Laki - Laki	36	ANDESPIN	D4/S1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
34	Laki - Laki	30	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	D4/S1	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4
35	Laki - Laki	27	DPPP Kota Pariaman	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
36	Laki - Laki	26	PT BOEMI BAHARI NUSANTARA	S2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Perempuan	22	PT. Boemi Bahari Nusantara	D4/S1	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4
38	Laki - Laki	36	Minangkabau Diver	S2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2
39	Laki - Laki	28		D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	Laki - Laki	28	Tabuik Diving Club	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	Perempuan	43 tahun	SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH	D4/S1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3
42	Laki - Laki	43	Dinas perikanan dan pangan kota Padang	S2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
43	Perempuan	28	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELUATAN DAN	D3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	Perempuan	57 tahun	Dinas perikanan dan pangan	D4/S1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
45	Laki - Laki	41	DPP KOTA PADANG	D4/S1	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
46	Laki - Laki	39	Dinas Perikanan dan Pangan Kab Pasaman	S2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	2	3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

47	Perempuan	53	KKP	S2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
48	Laki - Laki	56 th	Agam	D4/S1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	Laki - Laki	29 Tahun	Kementerian Kelautan dan Perikanan	D4/S1	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3
50	Perempuan	37	Kkp	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	Laki - Laki	53 tahun	BPPP Medan	D3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	Perempuan	40	BPPP Medan	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
53	Perempuan	55	BPPP Medan	S2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	Laki - Laki	49	Kab. Solok	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	Laki - Laki	56 tahun	BPPP Medan	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
56	Perempuan	45	Umkm	D2	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4
57	Laki - Laki	46	Poklasar sipujuk	S2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
58	Laki - Laki	49	0	SMA/Sederajat	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3
59	Laki - Laki	39	UPTD PPW I	D4/S1	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4
60	Laki - Laki	43	BPPP Medan	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	Laki - Laki	55	Dinas pangan dan pertanian	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	Perempuan	50 THN	Dapur Yonica	SMA/Sederajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	Perempuan	52	Tidak ada	D3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	Perempuan	56	KOMP fillano jaya 2 blok DD 0 no 5	SMA/Sederajat	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3
65	Laki - Laki	28	Kelompok Pengawas Rimba Peduli	D4/S1	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
66	Perempuan	57	poklasar	SMA/Sederajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	Perempuan	67 th	Umkm	SMA/Sederajat	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3
68	Laki - Laki	34	Cv agung prakasa	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	Perempuan	60th	Cita rasa lokan	SMA/Sederajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	Laki - Laki	42 Tahun	TNI AL	SMA/Sederajat	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
71	Perempuan	43 th	Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota	S2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

72	Perempuan	45 tahun	IRT	D3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
73	Laki - Laki	44	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Sijunjung	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	Perempuan	51 thn	Tidak ada	SMA/Sederajat	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
75	Perempuan	52 th	Rt	SMA/Sederajat	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3
76	Laki - Laki	38	Destana BPBD	D4/S1	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4
77	Laki - Laki	29	Pemerintahan Nagari	D3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4
78	Laki - Laki	30	pengurus	SMA/Sederajat	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4
79	Laki - Laki	55 th	Pelaku Nelayan tangkap/Budi Daya ikan kerapu.	SMA/Sederajat	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
80	Laki - Laki	50 tahun	Air bangis pasaman barat sumbar	SMP/Sederajat	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
81	Laki - Laki	28	JK	SMA/Sederajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	Perempuan	35	CV. DAVINDO JAYA MANDIRI	D3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	Laki - Laki	46	dikp prov sumbar	D4/S1	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4
84	Laki - Laki	53 tahun	Swasta	SMA/Sederajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	Laki - Laki	50 tahun.	Air bangis pasaman barat sumbar.	SMP/Sederajat	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3
86	Laki - Laki	29	Guide	D4/S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	Perempuan	40thn	UKM	SMA/Sederajat	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
88	Perempuan	38 th	Usaha sendiri	SMA/Sederajat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	Laki - Laki	31	Di laut	SMA/Sederajat	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4
90	Perempuan	55 th	Rumah produksi BABUROSAYADI	SMA/Sederajat	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
91	Perempuan	66 th	Tidak bekerja	SMA/Sederajat	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
92	Perempuan	37	Di rumah	SMA/Sederajat	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
93	Laki - Laki	45 Tahun	Nagari Maligi	D4/S1	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4
94	Laki - Laki, Perempuan	Padang 22 08 1968	Ibu rumah tangga	SMA/Sederajat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	Perempuan	53	Ibu rumah tangga	SMA/Sederajat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	Laki - Laki	55 thn	Dinas perikanan dan panga pessel	D4/S1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4

97	Perempuan	36	Dinas Pertanian Kota Solok	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	Laki - Laki	55 thn	BPPSDM	SMA/Sederajat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	Laki - Laki	50	Dinas penkanaan dan pangan kab solok	D4/S1	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4
100	Perempuan	49	Bp3 medan	D4/S1	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3
101	Laki - Laki	55 thn	BPPSDM	SMA/Sederajat	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
102	Laki - Laki	53	Diskan Padang Pariaman	D4/S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

Total Nilai Peresepsi Per Unit	361	346	353	354	362	345	358	350	340	364	356
Total Yang Tidak Terisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Yang Terisi	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
NRR/Unsur	3.54	3.39	3.46	3.47	3.55	3.38	3.51	3.43	3.33	3.57	3.49
NRR Tertimbang/Unsur	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.32	0.32

1	Bobot Nilai Tertimbang	0.09
2	IKM	3.47
3	Konversi IKM	86.65
4	Nilai Pelayanan	B

Bobot Nilai Rata Rata Tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah Unsur

IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang / Total Nilai Terisi

IKM Unit Pelayanan X 25

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL(M)	NILAI INTERVAL KONVERSI (MK)	MUTU PELAYANAN
1	1.00 - 2.5596	25.00 - 64.99	D
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.00	C
3	3.644 - 3.532	76.61 - 88.30	B
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100.00	A

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja

Tabel.3.63 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	82	82,5	82	86,65	100	105,03

Sumber : Data survey DKP

Jika dilihat dari indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha meningkatkan pelayanan guna kepuasan masyarakat.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.64 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2023 terhadap 2026
1.	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	86,65	85	101,94

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2023 sebesar 86,65% dengan capaian sebesar 101,94% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 85%. Dilihat dari capaian tahun ini, telah melebihi target akhir Renstra.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi nilai 86,65 dengan tingkat capaian 105,03%. Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sangat baik. **Upaya** peningkatan Kinerja pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran aparaturnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pelayanan *Service Excellent*.

2. Struktur kelembagaan yang telah terbentuk untuk mendorong terwujudnya sistem pelayanan yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Pembagian tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
5. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.
6. Peningkatan SDM aparatur dalam pelayanan prima.
7. Rekondisi lingkungan kerja yang nyaman untuk pelayanan publik.

Dalam mendorong capaian tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi, ditemui beberapa ***hambatan*** yaitu :

1. Tujuan yang tidak jelas. Dimana alasan dalam pelaksanaan tugas tidak dijelaskan dengan baik sehingga pelaksana tidak mengetahui apa sebenarnya yang ingin dicapai.
2. Kurangnya perencanaan dan pengembangan manajemen. Dimana orang-orang di dalam organisasi kurang dapat belajar secara efisien dalam mengerjakan tugasnya dan kurang dapat meningkatkan hasil kinerjanya.
3. Kontrol yang tidak memadai , dimana keputusan yang buruk akan didapat karena informasi yang kurang tepat dan kurang ditangani oleh orang yang tepat pula.
4. Rekrutmen dan seleksi yang tidak tepat. Dimana orang-orang yang direkrut kurang memiliki pengetahuan, kepribadian, atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5. Komunikasi yang tidak berjalan lancar . Visi organisasi tidak dimengerti, koordinasi antar anggota organisasi lemah, iklim organisasi rusak dan para pembuat keputusan kekurangan informasi.
6. Tim kerja yang tidak berjalan baik . Orang-orang di dalam organisasi yang seharusnya dapat bekerja sama tidak dapat menjalankan perannya dalam kelompok dan menemui banyak hambatan dalam bekerja sama.

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan **upaya di masa yang akan datang** dalam pengendalian resiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti:

1. Meningkatkan kapabilitas SDM Kelautan dan Perikanan menjadi SDM aparatur yang melayani.
2. Optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan penerapan *good governance*.
3. Pelayanan publik menerapkan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi.
4. Meningkatkan standar kualitas pelayanan.
5. Membangun kualitas pelayanan serta memperbaiki manajemen pelayanan. Membangun budaya untuk adanya kesadaran akan pentingnya kualitas pelayanan harus melekat pada seluruh sumber daya manusia yang ada dalam organisas

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumberdaya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3. 65 Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM yang kompeten dalam pelaksanaan pelayanan melayani	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan penganggaran tepat guna	Anggaran belum dapat menjangkau semua unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah.
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya, sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk pelayanan	Optimalisasi sarpras yang ada serta penggunaan sarpras tepat guna

Keberhasilan capaian indikator Sasaran 7 ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaian realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran diantaranya dukungan alokasi dana APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 27.971.232.302,- terealisasi sebesar Rp. **27.138.925.615,-** (97,02%). Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran 7 sebagai tabel berikut :

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.971.232.302	27.138.925.615	97,02	100	832.306.687
1,1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	19.046.786.612	18.421.506.569	96,72	100	625.280.043
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.315.087.412	17.708.232.769	96,69	100	606.854.643
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	597.828.000	584.225.920	97,72	100	13.602.080
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	133.871.200	129.047.880	96,40	100	4.823.320
1,2	Kegiatan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	440.833.135	439.036.888	99,59	100	1.796.247
1.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	184.764.635	184.764.633	100,00	100	2
1.2.2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	123.951.500	122.574.390	98,89	100	1.377.110

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

	pada SKPD					
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	132.117.000	131.697.865	99,68	100	419.135
1,4	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	191.485.000	191.485.000	100,00	100	0
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	178.985.000	178.985.000	100,00	100	0
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	12.500.000	100,00	100	0
1,5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.548.902.240	2.498.238.714	98,01	100	50.663.526
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	39.111.500	78,22	100	10.888.500
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.354.200	175.354.200	100,00	100	0
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.390.000	80.390.000	100,00	100	0
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.613.740	202.181.300	94,65	100	11.432.440
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.375.000	42.710.500	70,74	100	17.664.500
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.030.000	22.010.000	91,59	100	2.020.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.945.139.300	1.936.481.214	99,55	100	8.658.086
1,6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.637.300	308.240.500	97,04	100	9.396.800
1.6.1	Pengadaan Mebel	183.279.000	183.079.000	99,89	100	200.000
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.358.300	125.161.500	93,16	100	9.196.800
1,7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.826.016.473	4.708.093.403	97,56	100	117.923.070
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.993.870	99,91	100	6.130
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.990.146.325	1.932.737.055	97,12	100	57.409.270
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.828.870.148	2.768.362.478	97,86	100	60.507.670
1,8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.571.542	572.324.541	95,46	100	27.247.001
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.316.600	302.253.708	99,00	100	3.062.892
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.950.000	33.150.000	89,72	100	3.800.000
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.254.942	208.945.833	95,73	100	9.309.109
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.050.000	27.975.000	71,64	100	11.075.000

Persentase Realisasi Anggaran IKU 7 (*Input*) : 97,02%
 Persentase Capaian IKU 6 (*Output*) : 105,03 %
 Efisiensi IK : 8%

Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 7 merupakan sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah, , sisa belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan PNS) dan sisa-sisa kontrak

Berhasilnya capaian kinerja tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta berkat dukungan 7 (tujuh) kegiatan utama dengan 24 sub kegiatan.

Tabel 3.66 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	82,5	86,65	105,03	27.971.232.302	27.138.925.615	97,02

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 3.67 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	105,03 %	97,02%	8%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(27.971.232.302 \times 105,03\%) - 27.138.925.615}{(27.971.232.302 \times 105,03\%)} \times 100\% \\ &= 8\% \end{aligned}$$

Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Kepuasan terhadap pelayanan dengan capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 105,03% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,02% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 8% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

3.4 REALISASI ANGGARAN

3.4.1 Realisasi Anggaran APBD

Pencapaian sasaran-sasaran strategis yang menjadi perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2023, dialokasikan anggaran pendukungnya kedalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program kelautan dan perikanan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat terlaksana dari pagu dana sebesar Rp. 89.837.588.451,- terealisasi sebesar Rp. 85.498.276.782,- atau sebesar 95,17% dengan sisa dana Rp. 4.339.311.669,-.

Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 89.837.588.451,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.68 Analisis Akuntabilitas Keuangan / Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% Fisik	Sisa
1.	Belanja Langsung	89.837.588.451	85.498.276.782	95,17	99,91	4.339.311.669
Total belanja langsung		89.837.588.451	85.498.276.782	95,17	99,91	4.339.311.669

Sumber : DKP,2023

Tidak terlaksananya fisik 100% karena adanya 2 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu :

- 1). Belanja Modal Pagar (Pembangunan Gapura dan Pagar KKPD Padang-DAK) Putus Kontrak 2), Belanja Jasa Konsultansi Dokumen Lingkungan PPI Kambang statusnya adalah Luncuran (Lewat Tahun).

Tabel 3.69 Daftar Paket Penyedia Yang Tidak Selesai Tahun 2023

NO	NAMA PAKET	PAGU (Rp)	TERHUTANG (Rp)	KETERANGAN/ ALASAN
1	Belanja Modal Pagar (Pembangunan Gapura dan Pagar KKPD Padang)	690.000.000 Kontrak 613.387.562	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pemutusan kontrak sepihak kepada CV.EMPAT LIMA EMPAT 2. Telah dilaksanakan pengajuan klaim Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada si penjamin (Bank Nagari Cabang Utama Padang) 3. Telah diberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 1 tahun
2	Belanja Jasa Konsultansi Dokumen Lingkungan PPI Kambang	99.000.000 Kontrak 97.683.000	97.683.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik pekerjaan sudah 75% 2. Belum terbitnya persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Kementerian Perhubungan RI 3. Belum bisa dilakukan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Sempadan Sungai Batang Kambang Kabupaten Pesisir Selatan dari Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat 4. Belum bisa dilakukan Pembahasan/Penapisan Dokumen Lingkungan PPI Kambang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.437.833.644	27.592.548.837	97,03	100	845.284.807
1,1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.601.342	453.623.222	97,22	100	12.978.120
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.601.342	164.941.910	97,83	100	3.659.432
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	298.000.000	288.681.312	96,87	100	9.318.688
1,2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	19.046.786.612	18.421.506.569	96,72	100	625.280.043
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.315.087.412	17.708.232.769	96,69	100	606.854.643
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	597.828.000	584.225.920	97,72	100	13.602.080
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	133.871.200	129.047.880	96,40	100	4.823.320
1,3	Kegiatan Adminsitration Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	440.833.135	439.036.888	99,59	100	1.796.247
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	184.764.635	184.764.633	100,00	100	2
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	123.951.500	122.574.390	98,89	100	1.377.110
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	132.117.000	131.697.865	99,68	100	419.135
1,4	Kegiatan Adminsitration Kepegawaian Perangkat Daerah	191.485.000	191.485.000	100,00	100	0
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	178.985.000	178.985.000	100,00	100	0
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	12.500.000	100,00	100	0
1,5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.548.902.240	2.498.238.714	98,01	100	50.663.526
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	39.111.500	78,22	100	10.888.500
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.354.200	175.354.200	100,00	100	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.390.000	80.390.000	100,00	100	0
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.613.740	202.181.300	94,65	100	11.432.440
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.375.000	42.710.500	70,74	100	17.664.500
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.030.000	22.010.000	91,59	100	2.020.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.945.139.300	1.936.481.214	99,55	100	8.658.086
1,6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.637.300	308.240.500	97,04	100	9.396.800
1.6.1	Pengadaan Mebel	183.279.000	183.079.000	99,89	100	200.000
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.358.300	125.161.500	93,16	100	9.196.800
1,7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.826.016.473	4.708.093.403	97,56	100	117.923.070
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.993.870	99,91	100	6.130
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.990.146.325	1.932.737.055	97,12	100	57.409.270
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.828.870.148	2.768.362.478	97,86	100	60.507.670
1,8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.571.542	572.324.541	95,46	100	27.247.001
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.316.600	302.253.708	99,00	100	3.062.892
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.950.000	33.150.000	89,72	100	3.800.000
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.254.942	208.945.833	95,73	100	9.309.109
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.050.000	27.975.000	71,64	100	11.075.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	8.663.526.401	7.733.534.924	89,27	100	929.991.477
2,1	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	7.451.574.677	6.562.251.624	88,07	100	889.323.053
2.1.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	63.674.000	47.288.000	100,00	100	16.386.000
2.1.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat [UPTD - UPTD KPSDKP]	6.656.909.177	5.798.279.874	100,00	100	858.629.303
2.1.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	442.558.000	428.873.000	96,91	100	13.685.000
2.1.4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	288.433.500	287.810.750	99,78	100	622.750
2,2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.211.951.724	1.171.283.300	96,64	100	40.668.424
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.001.285.024	977.407.650	97,62	100	23.877.374
2.2.2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	107.418.000	102.555.650	95,47	100	4.862.350
2.2.3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	103.248.700	91.320.000	88,45	100	11.928.700
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.820.494.643	27.993.438.978	93,87	99,78	1.827.055.665
3,1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	25.582.421.774	23.820.162.946	93,11	99,75	1.762.258.828
3.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	29.648.250	27.185.603	91,69	100	2.462.647
3.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD - UPTD PPW I]	604.019.800	475.969.565	78,80	89,29	128.050.235
3.1.3	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD - UPTD PPW II]	4.299.832.522	3.102.924.375	72,16	100	1.196.908.147
3.1.4	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap [UPTD - UPTD PPW III]	1.733.904.650	1.491.345.791	86,01	100	242.558.859
3.1.5	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	18.915.016.552	18.722.737.612	98,98	100	192.278.940

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
3,2	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.456.501.920	1.437.183.255	98,67	100	19.318.665
3.2.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.456.501.920	1.437.183.255	98,67	100	19.318.665
3,3	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai 30 GT	300.776.750	270.043.910	89,78	100,00	30.732.840
3.3.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	59.252.000	58.997.000	99,57	100	255.000
3.3.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	241.524.750	211.046.910	87,38	100	30.477.840
3,4	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.480.794.199	2.466.048.867	99,41	100	14.745.332
3.4.1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW I]	700.718.970	688.601.717	98,27	100	12.117.253
3.4.2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW II]	1.308.152.879	1.306.985.850	99,91	100	1.167.029
3.4.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW III]	471.922.350	470.461.300	99,69	100	1.461.050
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.992.215.032	11.640.707.917	97,07	99,85	351.507.115
4,1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	41.725.600	41.222.400	98,79	100	503.200
4.1.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	41.725.600	41.222.400	98,79	100	503.200
4,2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	11.950.489.432	11.599.485.517	97,06	99,85	351.003.915

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
4.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD - UPTD BPBALP]	488.248.600	482.316.600	98,79	100	5.932.000
4.2.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.144.332.400	1.143.353.225	99,91	100	979.175
4.2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD - UPTD BPBALP]	1.224.901.750	1.220.664.150	99,65	100	4.237.600
4.2.4	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.796.963.629	7.470.838.725	95,82	99,77	326.124.904
4.2.5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD - UPTD KPSDKP]	568.346.000	559.084.717	98,37	100	9.261.283
4.2.6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	227.208.853	227.081.400	99,94	100	127.453
4.2.7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	171.267.700	170.207.100	99,38	100	1.060.600
4.2.8	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi [UPTD - UPTD BPBALP]	329.220.500	325.939.600	99,00	100	3.280.900
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.719.844.957	5.379.620.415	94,05	100	340.224.542
5,1	Kegiatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	5.563.584.707	5.227.064.611	93,95	100	336.520.096
5.1.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	63.284.000	56.398.350	89,12	100	6.885.650
5.1.2	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil [UPTD - UPTD KPSDKP]	519.759.001	469.977.251	90,42	100	49.781.750
5.1.3	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	4.607.761.606	4.368.820.250	94,81	100	238.941.356
5.1.4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	372.780.100	331.868.760	89,03	100	40.911.340

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
5,2	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	156.260.250	152.555.804	97,63	100	3.704.446
5.2.1	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	156.260.250	152.555.804	97,63	100	3.704.446
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.203.673.774	5.158.425.711	99,13	100	45.248.063
6,1	Kegiatan Penerbitan Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800	988.452.180	99,40	100	5.999.620
6.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	994.451.800	988.452.180	99,40	100	5.999.620
6,2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.621.702.260	1.613.931.614	99,52	100	7.770.646
6.2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	323.815.000	323.132.094	99,79	100	682.906
6.2.2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar [UPTD - UPTD PPMHP]	166.368.700	165.921.100	99,73	100	447.600
6.2.3	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	641.493.560	638.683.724	99,56	100	2.809.836
6.2.4	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing [UPTD - UPTD PPMHP]	490.025.000	486.194.696	99,22	100	3.830.304
6,3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714	2.556.041.917	98,78	100,00	31.477.797
6.3.1	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.587.519.714	2.556.041.917	98,78	100	31.477.797
Total Belanja Langsung		89.837.588.451	85.498.276.782	95,17	99,91	4.339.311.669

**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Keuangan per Program Pencapaian
Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan**

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU TA 2023	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			FISIK (%)	KEUANGAN	KEUANGAN	
				(Rp)	(%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.437.833.644	100	27,592,548,837	97.03	845,284,807
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	8.663.526.401	100	7,733,534,924	89.27	929,991,477
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.820.494.643	99.78	27,993,438,978	93.87	1,827,055,665
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	11.992.215.032	99.85	11,640,707,917	97.07	351,507,115
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.719.844.957	100	5,379,620,415	94.05	340,224,542
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.203.673.774	100	5,158,425,711	99.13	45,248,063
	TOTAL	89.837.588.451	99.91	85,498,276,782	95.17	4,339,311,669

3.4.2 Realisasi Anggaran APBN

Pada kegiatan yang di danai dari APBN Tahun 2023 dari jumlah anggaran sebesar Rp. **1.934.168.000,-** telah direalisasikan sebesar Rp. **1.897.352.430,-** atau sebesar 98,09% dengan realisasi fisik 100% dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Yang Tidak Dapat Digunakan (*9)	Pagu Revisi	Realisasi Keuangan sd 31 Desember 2023		Realisasi fisik (%)
					Jumlah (Rp.)	Persentase (%)	
DEKONSENTRASI							
1	SEKJEND	415.409.000	195.017.000	220.392.000	209,629,369	95.12	100
2	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	588.035.000	264.518.000	323.517.000	322,529,954	99.69	100
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	180.477.000	0	180.477.000	177,979,424	98.62	100
4	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	232.500.000	0	232.500.000	229,731,236	98.81	100
5	Ditjen Perikanan BudiDaya	650.342.000	113.660.000	536.682.000	534.374.267	99.57	100
6	Ditjen Perikanan Tangkap	602.094.000	161.494.000	440.600.000	423.108.180	96.03	100
	TOTAL	2.668.857.000	734.689.000	1.934.168.000	1.897.352.430	98.09	100
TUGAS PEMBANTUAN							
1	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Ditjen Perikanan Tangkap	467.700.000	467.700.000		0	0	0

3.4.3 Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	Laboratorium di UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	40.000.000	37.802.959	94
	Jumlah	40.000.000	37.802.959	94
	Pelayanan Jasa Kepelabuhan			
	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I	587.500.000	191.773.000	33
	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II	1.475.000.000	659.687.000	45
	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III	500.000.000	246.910.000	49
	Jumlah	2.562.500.000	1.098.370.000	43
	Tempat Rekreasi dan Olah Raga (KKPD)			
	Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KKPD)	150.000.000	54.759.000	37
	Jumlah	150.000.000	54.759.000	37

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Penjualan Produksi Usaha Daerah			
	UPTD Balai Budidaya Air Laut dan Payau	475.000.000	387.468.000	82
	Jumlah	475.000.000	387.468.000	82
	Jumlah Semua	3.227.500.000	1.578.399.959	49

Dilihat dari tabel di atas, target capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 3.227.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.578.399.959,- (49%). Capaian ini diperoleh dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah, pelayanan jasa ke pelabuhan, tempat rekreasi dan olah raga (KKPD), penjualan produksi usaha daerah dan penerimaan lain-lain.

Pada umumnya semua realisasi keuangan yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis telah memenuhi pencapaian diatas 80%, adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 80% adalah kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 39.111.500,- atau 78,22% dengan realisasi fisik 100% karena merupakan belanja rutin, sisa anggaran Rp. 10.888.500,- merupakan sisa dari UPTD.
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana Rp. 60.375.00,-, terealisasi sebesar Rp. 42.710.000,- atau 70,74% dengan realisasi fisik 100% karena merupakan belanja rutin, sisa anggaran Rp. 17.664.500,- termasuk ke dalam yang terkena efisiensi anggaran.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana Rp. 39.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 27.975.000,- atau 71,64% dengan realisasi fisik 100% karena merupakan belanja rutin, sisa anggaran Rp. 11.075.000,- termasuk ke dalam yang terkena efisiensi anggaran.

Inovasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha untuk menciptakan inovasi pelayanan publik guna memudahkan masyarakat mengakses apapun terkait kelautan dan perikanan. Adapun inovasinya yaitu:

TAMAN SIMAS : Tanaman mangrove dengan partisipasi masyarakat tujuan inovasi ini dalam melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove yang mempunyai fungsi ekologi, ekonomi dan social dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mereka bisa merawat, memelihara dan memiliki ekosistem pesisir.

Taman Simas (Tanam Mangrove Partisipasi Masyarakat) adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja dari kegiatan penanaman mangrove yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021. Program perlindungan dan rehabilitasi kawasan pesisir Sumatera Barat yaitu penanaman mangrove di pesisir pantai Sumatera Barat. Pada tahun 2023 Taman Simas (Tanam Mangrove Partisipasi Masyarakat) mendapatkan nilai kematangan 102 yang artinya pelaksanaannya sudah baik.

PROPOSAL INOVASI DAERAH

1	Nama Inovasi	:	TAMAN SIMAS (Tanam Mangrove Partisipasi Masyarakat)
2	Tahapan Inovasi	:	Penerapan
3	Inisiator	:	OPD
4	Jenis Inovasi	:	Non Digital
5	Bentuk Inovasi	:	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6	Urusan Inovasi	:	Kelautan dan Perikanan
7	Waktu Uji Coba	:	01-12-2020
8	Waktu Implementasi	:	01-01-2021
9	Rancang Bangun	:	DASAR HUKUM <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

		<p>dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>PERMASALAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persoalan Makro Sumatera Barat berhubungan langsung dengan Samudera Hindia Barat dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang sebagian wilayahnya terletak di kawasan pesisir yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hutan mangrove tumbuh tersebar di sepanjang pantai pesisir Sumatera Barat tersebut dengan luasan sesuai daerah lingkungannya serta bermanfaat dalam menjaga keberlangsungan kawasan pesisir. <p>Telah terjadi kerusakan di wilayah pesisir khususnya pada ekosistem hutan mangrove yang disebabkan karena penebangan, polusi air oleh sampah dan konversi hutan. Selain itu, perubahan garis pantai karena pengalihan muara sungai dan terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir dan tsunami juga berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem ini. Kawasan pesisir Sumatera Barat menjadi rusak sehingga Sumatera Barat yang rentan terhadap gempa dan tsunami beresiko mengalami degradasi ekosistem dan dikhawatirkan menjadi semakin parah. Rusaknya ekosistem mangrove juga menyebabkan kerusakan biota perairan seperti ikan, udang dan kepiting. Oleh karena itu perlunya dilakukan rehabilitasi ekosistem mangrove yang mampu melindungi kawasan pesisir Sumatera Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persoalan Mikro Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah bagaimana agar rehabilitasi kawasan pesisir Sumatera Barat dapat terlaksana secara berkelanjutan, dimana tanaman tersebut dapat terpelihara dari bentuk bibit hingga tanaman yang besar agar manfaat dapat dirasakan masyarakat. <p>ISU STRATEGIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Global Sumatera Barat yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sangat rawan terjadi gempa dan tsunami. Selain itu besarnya arus gelombang yang menuju pesisir pantai dapat menimbulkan abrasi yang dapat mengubah garis pantai. • Nasional Berdasarkan data statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir tahun 2020 menyebutkan hanya 31,34 persen ekosistem mangrove seluruh Indonesia dalam keadaan baik. Oleh karena itu diperlukan rehabilitasi mangrove untuk
--	--	---

		<p>menambah luasan mangrove di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokal Adanya ancaman tsunami di Pantai Barat Sumatera membuat pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi kawasan pesisir secara alami melalui penanaman mangrove. Hutan mangrove mampu jadi pelindung dari bencana seperti tsunami hingga bisa mengurangi korban jiwa dan harta benda. Ketika tsunami datang, mangrove bisa menahan dan memecah gelombang pasang Selain itu kondisi bencana alam yang rutin terjadi seperti abrasi, banjir serta berkurangnya lahan mangrove akibat perubahan fungsi lahan mengurangi luas kawasan vegetasi pantai di wilayah Sumatera Barat. <p>METODE PEMBAHARUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Sebelum adanya inovasi Kondisi sebelum adanya inovasi adalah minimnya kesadaran masyarakat atas manfaat hutan mangrove, diantaranya adalah degradasi luas hutan mangrove yang diakibatkan penebangan mangrove untuk alih fungsi lahan, pembuatan kapal, dan lain-lain. • Kondisi setelah adanya inovasi Setelah dilaksanakan kegiatan inovasi penanaman mangrove dimana dalam proses penanam ini juga disertakan dengan sosialisasi dan bimtek sehingga masyarakat mulai memahami manfaat mangrove yang diperlukan untuk masyarakat itu sendiri dengan mempertahankan keberadaan hutan mangrove. Dengan adanya mangrove ini kawasan pesisir akan terjaga dari ancaman tsunami, erosi, perubahan garis pantai. Selain itu keberadaan mangrove dapat menjaga biota perairan seperti ikan, udang dan kepiting yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat setempat. <p>KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Dimana letak kebaruannya? Keunggulan/kebaharuan terletak dari peran serta masyarakat dalam menanam dan menjaga mangrove yang sudah ditanami. Metode penanaman bibit mangrove adalah menggunakan pagar pelindung bibit untuk melindungi dari serangan ternak. Masyarakat juga diberikan sosialisasi dan bimtek untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar penanaman mangrove berjalan sesuai yang direncanakan.</p> <p>Tujuan Inovasi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merehabilitasi hutan mangrove serta memperbaiki kualitas ekosistem mangrove sehingga fungsi fisik, ekologi dan ekonomi yang dimiliki ekosistem mangrove bisa kembali. 2. Ekosistem mangrove berperan penting dalam
--	--	---

		<p>mengendalikan pemanasan iklim global</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove bisa kembali utuh. 4. Meningkatkan produktivitas daerah sebagai langkah dalam upaya penyelamatan dan pelestarian ekosistem mangrove. 5. Mengurangi potensi resiko baik moril maupun materil masyarakat pesisir akibat bencana seperti abrasi dan tsunami di masa yang akan datang. 6. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengolahan hasil mangrove. <p>Manfaat yang diperoleh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terehabilitasinya daerah pesisir yang mengalami degradasi/kerusakan 2. Keberadaan mangrove yang sehat di kawasan pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. 3. Mangrove sebagai penyerap gas karbondioksida (CO₂) dan penghasil oksigen (O₂) yang dibutuhkan manusia 4. Dampak penghijauan pantai bagi masyarakat pesisir 5. Membuka peluang terciptanya kawasan wisata bahari melalui wisata tracking mangrove. 6. Menambah pendapatan masyarakat melalui pengolahan hasil mangrove dan wisata bahari. <p>Hasil Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya luasan kawasan mangrove yang direhabilitasi. - Keberadaan mangrove dapat memberikan manfaat bagi penduduk sekitar maupun terhadap iklim global seperti mampu menahan arus laut yang mengikis daratan pantai serta mempertahankan garis pantai, - Sebagai penyerap gas karbondioksida (CO₂) dan penghasil oksigen (O₂), - Sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan, - Buah mangrove dapat diolah menjadi berbagai produk seperti kerupuk, kue bolu, peyek, dodol dan sirup serta menjadi tempat wisata hutan mangrove. <p>Rentang Waktu Untuk Mendapatkan Inovasi Daerah</p> <p>Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penanaman mangrove dengan melibatkan masyarakat hingga seluruh mangrove telah ditanami sekitar 3-4 bulan</p> <p>Cara Kerja Inovasi</p> <p>TAMAN SIMAS merupakan penanaman mangrove yang dilaksanakan di kawasan pesisir dengan bentuk inovasinya melibatkan masyarakat dan menggunakan pagar sebagai</p>
--	--	--

		<p>penanda kawasan.</p> <p>Cara kerjanya yaitu:</p> <p>a. Pemilihan Lokasi</p> <p>Lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan rehabilitasi hutan mangrove harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tersebut dianggap perlu dilakukan rehabilitasi dan penanaman mangrove. Oleh karena itu diperlukan data-data terkait ekosistem mangrove, potensi, tingkat kerusakan, status lahan dan kualitas areal tanam. • Lokasi tersebut merupakan lokasi yang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Pasaman Barat serta didukung oleh lintas sektor dan masyarakat setempat. Dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan fisik, biologi dan sosial serta secara teknis memang layak untuk dilakukan penanaman. • Bukan merupakan kawasan hutan produksi, hutan konversi, hutan lindung dan suaka alam. • Kepemilikan lahan yang akan ditanami mangrove sudah jelas dan disertai surat pernyataan kesediaan penanaman mangrove yang ditanda tangani oleh Pemilik Lahan / Ninik Mamak / Wali Nagari setempat. • Sudah terbentuk kelompok masyarakat yang akan menerima dan mengelola bibit mangrove yang sudah ditanam. <p>b. Koordinasi, Sosialisasi dan Bimtek</p> <p>Koordinasi, sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilakukan di kabupaten/kota dengan tujuan agar kegiatan ini diketahui oleh Pemerintah Daerah (mulai dari desa sampai kabupaten/kota) dan masyarakat setempat sehingga proses kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga akhir pekerjaan.</p> <p>c. Pembibitan</p> <p>Penyiapan bibit dilakukan dengan pembuatan persemaian terlebih dahulu dan persiapan media tanah untuk menanam benih yang telah diseleksi. Persemaian berfungsi untuk menyesuaikan bibit dengan lingkungan tempat tumbuh.</p> <p>d. Penanaman</p> <p>Penanaman dilakukan dengan pertimbangan dan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bibit hasil persemaian telah tumbuh dengan baik ditandai dengan munculnya daun beberapa helai. • Areal tanam telah dipersiapkan terlebih dahulu (dibersihkan) • Sistem tanam yang akan dilakukan adalah sistem banjar
--	--	---

			<p>Harian</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jarak tanam 1 x 1 m² jenis Rhizophora (untuk perlindungan pantai) ➤ Areal penanaman sebaiknya diberi pagar pembatas untuk pengamanan dari sampah, ternak dan gangguan lainnya yang dapat merusak tanaman ➤ Kegiatan penanaman melibatkan masyarakat yang sebelumnya telah dilatih (telah dibentuk kelompok) <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumur dan alat penyiraman <p>e. Penyiangan dan penyulaman Penyiangan dilakukan setelah bakau ditanam. Hal ini bertujuan membersihkan areal tumbuh dari rumput liar. Penyulaman diperlukan untuk menggantikan mangrove yang tidak berhasil tumbuh dengan baik (rusak) selama masa pemeliharaan dan pihak ketiga</p> <p>f. Pemeliharaan Pemeliharaan setelah penanaman masih tanggung jawab pihak ketiga. Setelah beberapa bulan diserahkan kepada masyarakat untuk menjaga dan merawatnya.</p>

BAB IV

PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mendukung pelaksanaan capaian target sasaran strategis tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp. 89.837.588.451,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 85.498.276.782,- (95,17%) dan realisasi fisik sebesar 99,91%. Serta alokasi dana APBN tahun 2023 sebesar Rp. 1.934.168.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.897.352.430,- sebesar 98,09% dengan realisasi fisik 100%.

Rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama sebesar 173,17%. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Tujuh Sasaran dan Tujuh Indikator Kinerja yang diukur mendapat nilai bobot kategori **Sangat Tinggi dan Rendah** dari 7 indikator kinerja ada 6 indikator yang diatas 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator capaiannya 60,53% **Rendah**. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.
 - Target capaian kinerja yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap terealisasi sebesar 5,83% dengan capaian 544,86% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
2. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

- Target capaian kinerja yaitu persentase peningkatan produksi perikanan budidaya terealisasi sebesar 2,052% dengan capaian 60,53% dengan demikian capaian ini tidak mencapai target (Rendah).
3. Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai ekspor Hasil Perikanan.
 - Target capaian kinerja yaitu nilai ekspor hasil perikanan terealisasi sebesar 291 Milyar dengan capaian 185,53% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
 4. Capaian sasaran strategis 4 "Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan
 - Target capaian kinerja yaitu persentase produksi olahan hasil perikanan terealisasi sebesar 7,5% dengan capaian 103,30% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
 5. Capaian sasaran strategis 5 "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konserevasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - Target capaian kinerja yaitu persentase efektifitas pengelolaan terealisasi sebesar 59,75% dengan capaian 112,86% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
 6. Capaian sasaran strategis 6 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD A (80,15).
 - Target capaian kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD terealisasi sebesar A (80,22) dengan capaian 100,09% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
 7. Capaian sasaran strategis 7 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
 - Target capaian kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi terealisasi sebesar 86,65 dengan capaian 105,03% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).

Secara umum sasaran-sasaran yang telah disusun dan rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah tercapai dengan persentase capaian 6 indikator yang Sangat Tinggi dan 1 indikator dengan kategori Rendah, hal ini tentunya didukung dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, baik melalui dukungan APBD maupun APBN.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat masih ditemui sejumlah kendala/permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi perikanan budidaya
- c. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan
- d. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih untuk usaha budidaya laut dan payau
- e. Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- f. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan
- g. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik dilaut maupun perairan umum
- h. Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir dan juga perairan umum
- i. Pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut maka solusi dan upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan sektor perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat

2. Mengembangkan usaha – usaha ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
 - b. Pengembangan budidaya laut, payau dan komoditas perikanan lainnya.
3. Pengembangan *system value chain*, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
 - b. Pengembangan jaringan pemasaran produk perikanan
 - c. Pengintegrasian program perikanan dan lingkungan hidup
4. Fasilitasi pembangunan industri hilir perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan

Dari kegiatan yang dilaksanakan maka hasil yang dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2023 dari pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN adalah :

1. Produksi Perikanan

Produksi (ton)	Tahun 2022	Tahun 2023*	% Kenaikan
Perikanan Tangkap	218.688,65	231.443,20	5,83
Budidaya	268.774.30	274.290,00	2,052

* angka sementara

2. Tingkat Pendapatan Petani/Nelayan/tahun :

Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2023*	% Kenaikan
Nelayan	41.661.646	41.758.325	0,23
Pembudidaya Ikan	50.465.580	50.989.400	1,04

* angka sementara

3. Produksi Benih (ekor)

Produksi Pembenihan	Tahun 2022	Tahun 2023*	% Kenaikan
Produksi Pembenihan	3.068.719.000	3.394.859.000	10,63

* angka sementara

4. Konsumsi Ikan kg/kapita/th

Konsumsi	Tahun 2022	Tahun 2023*	% Kenaikan
Konsumsi Ikan perkap/th	41,80	43,08	3,06

* angka sementara

5. Ekspor Komoditas Perikanan (Milyar)

Ekspor	Tahun 2022	Tahun 2023*	% Kenaikan
Ekspor Komoditas Perikanan	272,35	291	6,85

* angka sementara

6. Tercapainya PAD Provinsi Sumatera Barat

PAD	Tahun 2022	Tahun 2023	% Kenaikan
PAD	1.529.606.439	1.578.399.959	3,19

Sumber : DKP,2023

7. BBI dan UPR yang berserifikat CPIB

Sertifikat	Tahun 2022	Tahun 2023*	% Kenaikan
BBI dan UPR	170	210	23,53

Sumber : DKP,2023

Selama Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan telah mampu meraih keberhasilan dan prestasi yang cukup membanggakan sebagai bentuk dari kerja keras dan upaya yang dilakukan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, yaitu:

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Gubernur Penggerak Pengelolaan Sampah Laut Pada Kegiatan Puncak Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Gubernur dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Surabaya, 08 November 2023
2	Kawasan Konservasi Daerah dengan Progres Nilai Evaluasi Efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tertinggi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan (Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat)	Batam, 08 Mei 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



Penggerak Pengelolaan Sampah



Kawasan Konservasi (EVKA)

Dari hasil yang dicapai, masih banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa peningkatan sarana dan prasarana produksi bagi Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Ikan, Peningkatan SDM Aparatur maupun Masyarakat Perikanan, Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Lain-lain.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah di capai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTOTINGGI No. 9

PADANG

Kode Pos 25 128

Telp . (0751) 841584 (Kepala)

(0751) 27089 (Sekretariat)

(0751) 33288 (umum)

Fax. (0751) 27089

Kotak Pos . 42

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir.RETI WAFDA,MTp

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Februari 2023

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

Dr.Ir.RETI WAFDA,MTp
NIP. 19670312 199308 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTOTINGGI No. 9

PADANG
Kode Pos 25 128

Telp . (0751) 841584 (Kepala)
(0751) 27089 (Sekretariat)
(0751) 33288 (umum)
Fax. (0751) 27089

Kotak Pos . 42

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir.RETI WAFDA,MTp

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Februari 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MAHYELDI


Dr.Ir.RETI WAFDA,MTp
NIP. 19670312 199308 2 001

PERJANJIAN KINERJA

OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

TAHUN : 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.07 %
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39%
3.	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	1. Nilai Ekspor hasil Perikanan (Milyar)	156,85
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	1. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7.26 %
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	1. Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	52.94 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,15)
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (82,50)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.085.651.298,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9.969.635.725,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	32.006.574.944,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.497.235.764,-	APBD
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.775.547.658,-	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	5.455.846.014,-	APBD
7.	Sekretariat Jenderal (01)	415.409.000,-	APBN – DK
8.	Ditjen Perikanan Tangkap (03) Dekonsentrasi	1.051.454.000,-	APBN – DK
9.	Ditjen Perikanan Tangkap (03) Tugas Pembantuan	467.700.000,-	APBN - DK

PERJANJIAN KINERJA

OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

TAHUN : 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.07 %
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39%
3.	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	1. Nilai Ekspor hasil Perikanan (Milyar)	156,85
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	1. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	7.26 %
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	1. Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	52.94 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,15)
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (82,50)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.085.651.298,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	9.969.635.725,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	32.006.574.944,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.497.235.764,-	APBD
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5.775.547.658,-	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	5.455.846.014,-	APBD
7.	Sekretariat Jenderal (01)	415.409.000,-	APBN – DK
8.	Ditjen Perikanan Tangkap (03) Dekonsentrasi	1.051.454.000,-	APBN – DK
9.	Ditjen Perikanan Tangkap (03) Tugas Pembantuan	467.700.000,-	APBN - DK

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
10.	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	650.342.000,-	APBN – DK
11.	Ditjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05)	180.477.000,-	APBN – DK
12.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06)	752.285.000,-	APBN – DK
13.	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (07)	297.500.000,-	APBN - DK

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

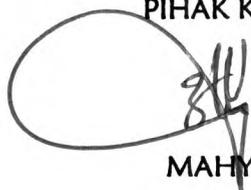
PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. REFTI WAFDA, MTp
NIP. 19670312 199308 2 001

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
10.	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	650.342.000,-	APBN – DK
11.	Ditjen Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05)	180.477.000,-	APBN – DK
12.	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06)	752.285.000,-	APBN – DK
13.	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (07)	297.500.000,-	APBN - DK

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. REFTI WAFDA, MTp
NIP. 19670312 199308 2 001



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI**

SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**



**NOMOR : 700/10/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023
TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023**

DAFTAR ISI

Halaman

I	: PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Hukum Evaluasi	1
	B. Latar Belakang Evaluasi	1
	C. Tujuan Evaluasi	2
	D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
	E. Jangka Waktu Evaluasi	2
	F. Susunan Tim Evaluasi	2
	G. Metodologi Evaluasi	2
	H. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
	I. Komponen dan Predikat Penilaian	3
II	: GAMBARAN HASIL EVALUASI	
	A. Hasil Evaluasi	4
	B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	7



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : itprovsumbar@gmail.com

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN : 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-321-2023 tanggal 28 April 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
8. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0058/Insp-SAU/2023 tanggal 06 Februari 2023, Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0089/Insp-SAU/2023 tanggal 20 Februari 2023, Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0141/Insp-SAU/2023 tanggal 12 Maret 2023 dan Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/0198/Insp-SAU/2023 tanggal 03 April 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya ; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2022.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 06 Februari 2023 s.d 17 April 2023.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Delliyarti. SM |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Rahmah Febri Yeri |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : 1. Elvita Darma
Sri Pusparani Oktavia
Dewi Selvie |
| 5. Anggota | : Jelita Alamsyah
Khairul
Rahmi Izzati
Rosiana
Fakhru Rozi
Gerhana Bulan Butet Lubis
Yanti Jasvia
Erlina
Egi Kurniawan |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan teknis bidang Kelautan dan perikanan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	2,5	12,5	25,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **80,22** dengan **kategori A (Sangat Baik)** dengan pengertian terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,36
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,40
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,59
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,88
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,22
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 27,36 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Renstra, RKT, PK dan IKU dan Rencana Aksi di tingkat eselon II serta PK, IKI, Rencana Aksi ditingkat individu (eselon III sampai staf) tahun 2022 dan 2023.
- b. Terdapat dokumen Perencanaan anggaran (DPA, DPA Perubahan) yang mendukung kinerja.
- c. Renstra, RKT, PK dan IKU sudah diformalkan dan sudah dipublikasikan diwebsite <https://dkp.sumbarprov.go.id>
- d. Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target telah memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, achievable, relevan dan terukur).
- e. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras mulai ditingkat Eselon II, III dan IV.
- f. Target yang ditetapkan dalam PK telah tercapai dengan baik (*on the right track*).
- g. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran realisasi rencana aksi telah dilaksanakan ditingkat eselon II, III dan IV yang dilakukan pertriwulan dan namun bukti pemantauan atas realisasi rencana aksi berupa notulen yang telah memberikan alternatif perbaikan untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan pada tingkat eselon II, III dan IV sedangkan untuk level staf masih terdapat rencana aksi yang belum dipantau secara berkala.
 - 2) Belum setiap pegawai peduli dan memahami serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan, hal ini terlihat dari masih terdapat pegawai dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang belum menyusun rencana aksi dan mengukur realisasi rencana aksi secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 20,40 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun SOP pengumpulan kinerja dan pengukuran data kinerja.
- b. Indikator kinerja utama Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan telah menyajikan defenisi operasional yang jelas untuk mengukur target yang diperjanjikan.
- c. Kepala Dinas telah terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja pada notulen hasil monitoring dan evaluasi pemantauan kinerja yang dilakukan pertriwulan.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran kinerja secara berkala sudah dilakukan pertriwulan mulai tingkat eselon II sampai staf namun belum terhadap seluruh pegawai.
 - 2) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga capaian atau progress kinerja belum dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.

- 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 4) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja, hal ini terlihat dari hasil wawancara dan kuisioner yang dilakukan terhadap eselon III, IV dan beberapa staf dan masih adanya pegawai yang belum melakukan pengukuran secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 12,59 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja sudah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan serta sudah disampaikan ke Biro Organisasi tanggal 31 Januari 2023.
- b. Laporan Kinerja sudah menginfokan pencapaian kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan secara nasional, perbandingan dengan tahun sebelumnya, menyajikan keberhasilan/kegagalan pencapaian target, efisiensi penggunaan sumber daya dan rekomendasi perbaikan kinerja.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Informasi pelaporan kinerja telah memberikan dampak perbaikan namun belum signifikan.
 - 2) Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, hal ini terlihat dari belum seluruh pegawai peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja, belum ada bukti informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja Internal sebesar 19,88 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Telah terdapat SOP pemantauan capaian kinerja internal.
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
 - 1) Belum terdapat bukti dokumentasi pemantauan kinerja sampai level staf.
 - 2) Bukti pemantauan capaian kinerja internal yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyajikan bukti telah terdapat pendalaman yang memadai untuk setiap capaian kinerja diantaranya belum menyajikan faktor pendorong, hambatan/kendala, rekomendasi dan evaluasi pada pemantauan berikutnya untuk target atau aksi yang tidak tercapai
 - 3) Hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
 - 4) Pemantauan capaian kinerja internal belum memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi)

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan
Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala setiap bulannya mulai eselon II sampai staf dan didokumentasikan dengan baik, apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisis atas hambatan/kendala yang ditemukan serta dicarikan solusinya.
- b. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai target kinerja yang direncanakan pada dokumen perencanaan yang telah disusun (penetapan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target).

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Pengukuran kinerja secara berkala dilaksanakan setiap bulannya mulai di tingkat eselon II, III, IV dan staf.
- b. Pemantauan kinerja dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat eselon II, III, IV dan staf dan dilakukan setiap bulannya yang dapat memberikan alternatif perbaikan untuk pencapaian target yang ditetapkan, bukti pemantauan didokumentasikan dengan baik.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi e-sakip (sakup.sumbarprov.go.id) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.
- d. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.
- e. Pengukuran kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- f. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Informasi kinerja hendaknya dimanfaatkan dalam penilaian dan perbaikan pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan dan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- b. Agar meningkatkan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan pemantauan kinerja mulai tingkat eselon II sampai staf dan mendokumentasikan bukti pemantauan tersebut dan dilaksanakan oleh SDM dan pendalaman yang memadai.
- b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-sakip (sakup.sumbarprov.go.id) dalam melakukan pemantauan capaian kinerja sehingga memudahkan atasan langsung dalam mengetahui capaian progres kinerja secara cepat dan tepat.

- c. Memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana

INSPEKTUR



DELLYARTI. SM,SE,Ak,CA,CFrA
Pembina Utama Madya
NIP.196412311993032001